

**PRAKTIK PEMERINTAHAN PADA
KESULTANAN BUTON TAHUN 1540-1960
MASEHI**

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar sarjana ilmu politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan minat utama reformasi pemerintahan

OLEH:

Muh. Ide Apurines

105120607111015



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

2015

**PRAKTEK PEMERINTAHAN PADA KESULTANAN
BUTON TAHUN 1540-1960**

SKRIPSI

Disusun oleh:

Muh. Ide Apurines
NIM. 105120607111015

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.Si

NIK. 792410 1111 0413

Restu Karlina Rahayu, S.IP.,M.Si

NIP. 83081711120337

Tanggal : 6 Februari 2015

Tanggal : 6 Februari 2015

**PRAKTEK PEMERINTAHAN PADA KESULTANAN
BUTON TAHUN 1540-1960 MASEHI**

SKRIPSI

Disusun oleh:

Muh. Ide Apurines
NIM. 105120607111015

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana Ilmu Pemerintahan
pada tanggal 28 Januari 2015

Tim Penguji:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.Si

Restu Karlina Rahayu, S.IP., M.Si

NIP. 792410 1111 0413

NIP. 83081711120337

Anggota Penguji 1

Anggota Penguji 2

Fathur Rahman, S.IP., M.Si

Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev

NIP. 8204291110338

NIP. -

Malang, 06 Februari 2015

Dekan,

Prof. Dr. Ir. H. Darsono Wisadirana, M.S

NIP. 19561227 198312 1 001

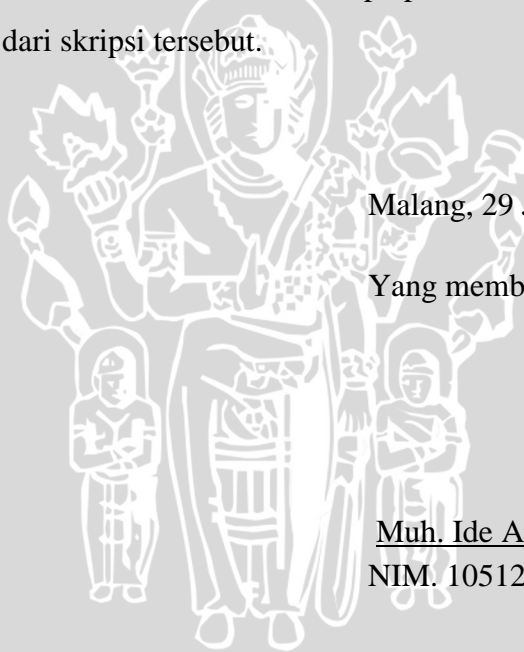
PERNYATAAN

Nama : Muh. Ide Apurines

NIM : 105120607111015

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul PRAKTEK PEMERINTAHAN PADA KESULTANAN BUTON TAHUN 1540-1960 adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.



Malang, 29 Januari 2015

Yang membuat pernyataan

Muh. Ide Apurines

NIM. 105120607111015

PERSEMBAHAN

Dengan berkat rahmat Allah yang maha kuasa, Akhirnya skripsi ini bisa saya persembahkan untuk keluarga tercinta saya.

Bapak saya Surasa yang tidak kenal lelah memberi support dalam bentuk materi dan semangat Dan Ibu saya yang penuh pengertian Amna Tima Serta Kakak saya Sketsa Utara Pelangi yang memberi motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini



KATA PENGANTAR

Dengan selesainya penulisan skripsi yang berjudul **“Praktek Pemerintahan pada Kesultanan Buton tahun 1540-1960”** maka berakhir pula proses panjang yang telah peneliti tempuh sejak tahun 2010 dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya. Puji syukur kehadirat **Allah SWT**. Hasil ini bukan semata-mata prestasi peneliti sendiri. Oleh karena itu sudah selayaknya peneliti mengucapkan terima kasih kepada sejumlah pribadi dan instansi atas bantuan yang telah di berikan dengan berbagai caranya masing-masing.

Pertama-tama dengan hati yang tulus dan penuh kasih peneliti sampaikan kepada bapak **Surasa, S.H.**, dan Ibu **Amna Tima**, selaku orang tua peneliti yang senantiasa memberi do’a, motivasi dan kasih sayang yang tak pernah henti.

Ucapan terima kasih peneliti tujukan kepada bapak **Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.Si.**, selaku pembimbing utama yang tidak pernah lelah dalam membimbing penyelesaian skripsi ini. Beliau yang mendorong peneliti untuk tetap memilih tema sejarah pemerintahan kesultanan. Disamping itu beliau selalu menyempatkan untuk berdiskusi, memberikan saran, bahkan meminjamkan buku mengenai tema skripsi peneliti. Tema penulisan ini masih langka dalam historiografi Indonesia, khususnya yang dilakukan oleh mahasiswa yang bergerak di bidang ilmu sosial dan politik. Oleh sebab itu masih terbuka lebar bagi peneliti untuk mengembangkan lagi kajian seperti ini di masa mendatang.

Ucapan terimakasih peneliti tujukan kepada ibu **Restu Karlina Rahayu. S.IP., M.Si.**, selaku pembimbing pendamping yang tidak kalah luar biasa dalam membimbing penyelesaian skripsi ini. Beliau selalu mengingatkan proses pengerjaan skripsi ini, memberikan kritik-kritik yang membangun pada skripsi peneliti. Pengalaman yang peneliti dapat petik dari beliau adalah dalam mengerjakan sesuatu harus mempunyai tekad dan niat yang sungguh-sungguh.

Disamping sebagai pembimbing dua beliau adalah Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah banyak memberi sumbangsih terhadap prodi pemerintahan hingga saat ini.

Ucapan terimakasih peneliti tujukan kepada bapak **Fathur Rahman, S.IP., M.Si.**, selaku dosen penguji I sekaligus ketua majelis dalam persidangan skripsi. Beliau memberikan usulan-usulan serta kritik-kritik yang sangat membangun untuk memperbaiki skripsi ini. beliau

Ucapan terimakasih peneliti tujukan kepada ibu **Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev.**, selaku dosen penguji II sekaligus sekretaris penguji. Beliau memberikan banyak masukan yang sangat bermanfaat untuk memperbaiki skripsi ini.

Ucapan terimakasih peneliti tujukan kepada bapak **Aswin Ariyanto Azis, S.IP., M.Dev.St.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan. Berkat usaha beliau serta dosen-dosen Prodi Ilmu Pemerintahan lainnya sehingga prodi ini bisa mendapatkan banyak prestasi, dan dapat menjadi jurusan/prodi unggulan di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya

Segenap **Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan** peneliti ucapkan terimakasih atas segenap ilmu pengetahuan dan perhatian yang diberikan selama ini.

Ucapan terimakasih peneliti tujukan kepada bapak **Drs. A.S Tamrin, MH.**, selaku Bapak Walikota BauBau yang telah menerima peneliti dengan ramah di kota BauBau. Beliau salah satu orang yang menginspirasi peneliti untuk berani mengangkat budaya buton menjadi tema skripsi ini, serta memotivasi peneliti untuk teguh membangun daerah.

Ucapan terimakasih peneliti tujukan kepada bapak **Prof. DR. La Niampe, M.Hum**, selaku Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Haluoleo Kendari yang telah memberikan banyak masukan serta bahan-bahan mengenai skripsi ini. beliau orang yang betul-betul mendorong peneliti untuk lebih mengembangkan skripsi ini untuk kedepannya

Ucapan terimakasih peneliti tujukan kepada **La Ode Asrul. SS. M.A** beserta jajaran **Dinas Pariwisata Kota BauBau** selaku informan peneliti yang telah memberikan banyak data sebagai acuan pembuatan skripsi ini

Ungkapan terimakasih peneliti tujukan untuk sahabat-sahabat terkasih **Amirul Mukmin, Rizka Syukri, Mego Widi Hakoso, Bramantio Ari, Alifi Muslian, Ivan Rusli dan Erfansyah R.** serta teman-teman Nol Derajat, KineClub UMM, Eksekutif Mahasiswa Uniersitas Brawijaya 2011, dan segenap Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya 2010 yang senantiasa memberikan pengalaman berharga selama berada di Kota Malang

Terimakasih peneliti tujukan untuk sahabat SIS Baubau **Arief Gunawan, Dyta Purwanti, Fahrul Rozi, Giant Ardiansyah, Vega Noris, Wahyu Wuliono, dan Nur Laiyla** yang selalu mendukung peneliti dalam menempuh S1 di Universitas Brawijaya Malang

Akhirnya atas segala bantuan semua pihak semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Harapan peneliti semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, terutama kepada peneliti selanjutnya yang nantinya akan mengembangkan penelitian ini.

Malang, 29 Januari 2015

Peneliti

ABSTRAK

Muh. Ide Apurines, 2015. : Praktik Pemerintahan Pada Kesultanan Buton Tahun 1540-1960 Masehi. Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya.

Dosen Pembimbing : DR. M. Lukman Hakim, S.IP., M.Si. dan Restu Karlina Rahayu. S.IP., M.Si.

Penelitian ini berfokus pada praktik pemerintahan Kesultanan Buton Tahun 1540-1960 Masehi. Penelitian dilakukan di Pulau Buton Kota BauBau Sulawesi Tenggara dengan menggunakan jenis penelitian sejarah-kualitatif. Tujuan dari penelitian adalah mengetahui proses pemerintahan yang berjalan di Kesultanan Buton dari tahun 1540-1960 serta untuk mengetahui adanya praktik demokrasi yang terdapat di Kesultanan Buton. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori demokrasi yang digagas oleh Robert A. Dahl. Teori tersebut menawarkan kriteria untuk mencapai pemerintahan demokratis untuk menilai sejauh mana demokrasi berjalan di Kesultanan Buton. Selain teori tersebut, peneliti juga menggunakan metode pengumpulan data heuristik yang terdiri dari studi pustaka dan dokumen serta wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Kesultanan Buton mempunyai bentuk pemerintahan yang berubah-ubah dikarenakan proses transisi kerajaan menuju kesultanan; (2) adanya praktik demokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Kesultanan Buton; (3) struktur pemerintahan yang berbeda dengan kerajaan/kesultanan pada umumnya, yang telah mempraktekkan struktur pemerintahan modern; (4) konstitusi tertulis Murtabat Tujuh menjadi dasar bernegara di Kesultanan Buton.

Kata Kunci : Bentuk Pemerintahan, demokrasi, dan Konstitusi Murtabat Tujuh.

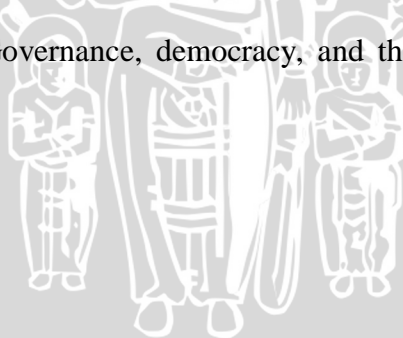
ABSTRACT

Muh. Ide apurines, 2015: Governance Practices In Buton Sultanate Year 1540-1960 AD. Skripsi Program Government Science, Faculty of Sosial and political Sciences, University of brawijaya.

Supervisor: Dr. M. Lukman Hakim, SIP, M.Sc. and Restu Karlina Rahayu. S.IP., M.Sc.

This Research focuses on the practice of government of the Sultanate of Buton year 1540-1960 AD. This research was conducted in the City Baubau Buton Island Southeast Sulawesi using historical research-qualitative types. The purpose of this study was to determine the governance process that runs in the Sultanate of Buton of the year 1540-1960 and to investigate the practice of democracy contained in the Kingdom of Buton. theory used in this research is the theory of democracy initiated by Robert A. Dahl. The theory offers the criteria to achieve a democratic government to assess the extent to which democracy works in the Sultanate of Buton. In addition to this theory, the researchers also used the method of data collection heuristic consisting of literature and documents as well as in the additional method of interview. The results of this study are; (1) the Sultanate of Buton has a form of government that is changing due to the transition process towards the kingdom of the empire; (2) the practice of democracy in the governance process in the Sultanate of Buton; (3) different governance structures with royal/ sultanate in general, who has been practicing modern governance structures; (4) a written constitution Murtabat Seen became the basis of the state in the Sultanate of Buton.

Keywords; Form of Governance, democracy, and the constitution Murtabat Seen



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	I
LEMBAR PENGESAHAN	II
PERNYATAAN ORISINALITAS	III
PERSEMBAHAN	IV
KATA PENGANTAR.....	V
ABSTRAK	VIII
ABSTRACT.....	IX
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR TABEL	XIII
DAFTAR GAMBAR.....	XIV
DAFTAR ISTILAH	XV
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan	7
1.4 Manfaat	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Sistem Pemerintahan.....	13
2.2.1 Bentuk Pemerintahan.....	14
2.3 Teori Demokrasi Robert Dahl.....	16
2.3.1 Kriteria Demokrasi Robert A. Dahl	20
2.3.2 Faktor Pendukung Demokrasi dalam sistem pemerintahan.....	21
2.4 Kerangka Berfikir	23
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	24
3.2 Lokasi Penelitian.....	25
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	25



3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.4.1 Metode Studi Pustaka	27
3.4.2 Metode Dokumentasi	28
3.4.3 Metode Wawancara	28
3.5 Penentuan Informan Penelitian	30
3.6 Teknik Analisis Data.....	30

BAB IV : DESKRIPSI KESULTANAN BUTON

4.1 Deskripsi Wilayah.....	32
4.1.1 Kondisi Geografis Kesultanan Buton	32
4.1.2 Demografi Kesultanan Buton	36
4.1.2.1 Asal Mula Etnis Buton.....	36
4.1.2.2 Tipikal Etnis Buton	39
4.1.2.3 Bahasa dan Keekerabatan	40
4.1.3 Sejarah Masyarakat Buton	43

BAB V : PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian	47
5.1.1 Sistem Pemerintahan di Kesultanan Buton.....	47
5.1.1.1 Sistem Pemerintahan di Masa Kerajaan	47
5.1.1.2 Sistem Pemerintahan di Masa Sultan Ke 1-3.....	53
5.1.1.3 Sistem Pemerintahan di Masa Sultan ke 4-38.....	55
5.2 Praktek Demokrasi pada Kesultanan Buton	62
5.2.1 Partisipasi efektif dalam Kesultanan Buton	62
5.2.1.1 Hubungan Negara dengan Masyarakat	65
5.2.2 Persamaan Hak dalam Lingkup Kesultanan Buton	69
5.2.2.1 Stratifikasi Sosial	69
5.2.3 Tanggung Jawab Politik dalam Kesultanan Buton	73
5.2.3.1 Kesejahteraan.....	75
5.2.3.2 Perluasan dan Penguatan Kesultanan Buton.....	76
5.2.4 Pengawasan Agenda dan Ketersediaan Lembaga Negara	77
5.2.4.1 Hubungan Sultan dan Siolimbona	79
5.2.4.2 Pusat Kesultanan dengan Kadie.....	80

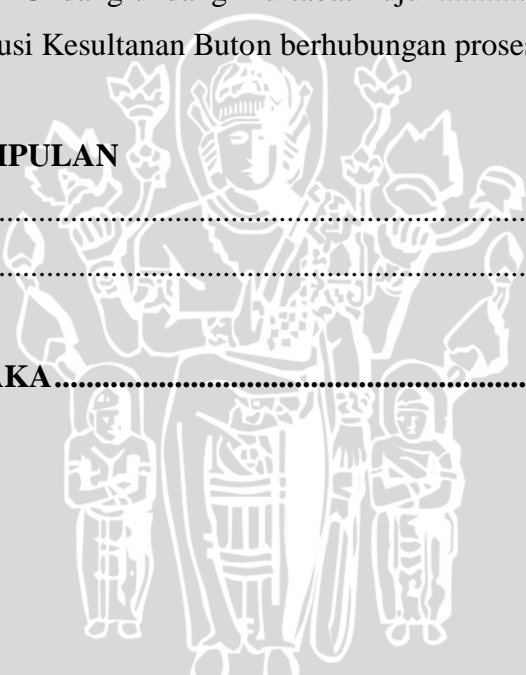
5.2.5 Pemilihan Sultan Buton	83
5.2.5.1 Sistem Kepartaian	83
5.2.5.2 Tata Cara Fali	88
5.2.5.3 Pengukuhan Kandidat Sultan	89
5.2.5.4 Tahap Pelantikan	92
5.3 Struktur Pemerintahan dan Pertahanan Kesultanan Buton	96
5.3.1 Pemerintahan Pusat	96
5.3.2 Pemerintahan Kadie	101
5.3.3 Pemerintahan Barata	103
5.3.4 Sistem Pertahanan dan Keamanan	107
5.4 Masuknya ajaran Murtabat Tujuh	111
5.4.1 Keistimewaan Undang-undang Murtabat Tujuh	118
5.4.2 Nilai Konstitusi Kesultanan Buton berhubungan proses politik	121

BAB VI : KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan	125
6.2 Rekomendasi	128

DAFTAR PUSTAKA	130
-----------------------------	------------

LAMPIRAN





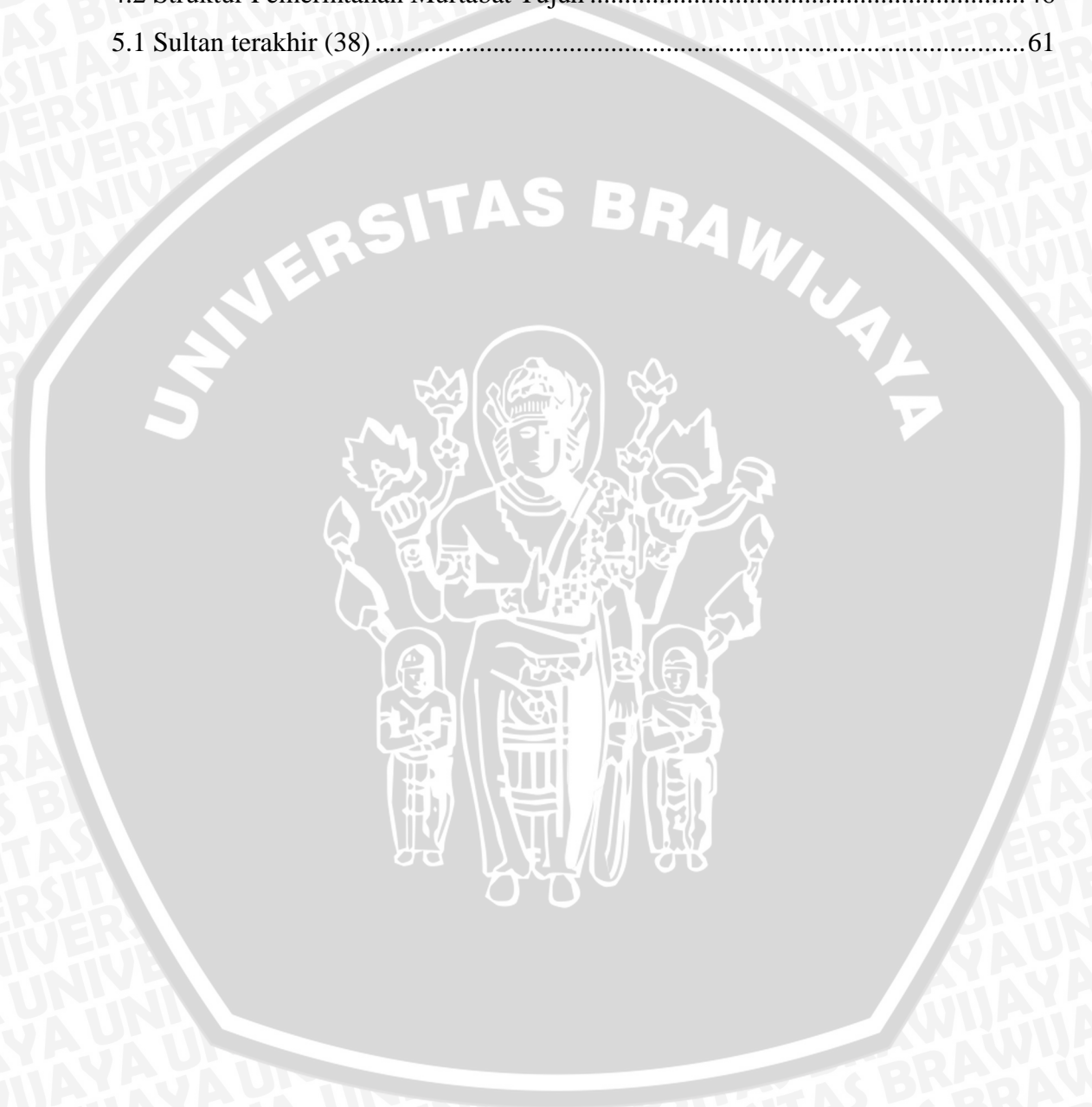
DAFTAR TABEL

2.1 Daftar Penelitian Terdahulu.....	12
3.1 Penentuan Informan Penelitian.....	29



DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikiran.....	23
4.1 Lokasi Kesultanan Buton.....	33
4.2 Struktur Pemerintahan Murtabat Tujuh	46
5.1 Sultan terakhir (38)	61



DAFTAR ISTILAH

Bante	Istilah dalam bahasa Buton yang berarti pajak berupa hasil kebun kepada sultan
Barata	Sebuah kerajaan yang menyokong ataupun tergabung dalam Kesultanan Buton dalam istilah Kesultanan Buton Barata sering disimbolkan sebagai perahu bercadik, maksudnya Kesultanan Buton bersama kerajaan-kerajaan layaknya laksana sebuah perahu yang tidak gampang tenggelam dan terbalik oleh kekuatan angin yang akan menghancurkannya
Batua	Golongan rakyat terendah atau biasa disebut dengan budak
Bhinci-Bhinciki Kuli	falsafah Buton yang dimanifestasikan keberbagai macam pedoman hidup
Bonto	Jabatan Mentri dalam Kesultanan Buton
Bonto Yinunca staf	Staf kesultanan yang bertugas membantu sultan dalam sehari-harinya, serta memberikan pertimbangan bila dibutuhkan
Buton	Nama pulau yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dahulu merupakan pusat Kesultanan Buton
Kabanti	Syair, sajak atau nyanyian
Kadie	Merupakan wilayah desa yang diberikan otonomi sendiri tetapi dalam hal agama ataupun perdagangan masi mengikuti aturan dari pusat Kesultanan Buton

Kenepulu	Jabatan ini untuk kalangan bangsawan Kaomu orang yang bertanggung jawab atas hukum (hakim besar)
Kaomu	Golongan yang diberi hak untuk memimpin pemerintahan di Kesultanan Buton
Kapitalao	Jabatan menteri pertahanan dalam Kesultanan Buton
Kerajaan	Salah satu bentuk pemerintahan terpusat dimana kepala negaranya dipimpin oleh seorang raja/ratu
Kesultanan	Salah satu bentuk pemerintahan yang berlandaskan islam dimana kepala negaranya dipimpin oleh seorang sultan
Lakina Agama	Jabatan yang mengurus masalah keagamaan dalam kesultanan. Jabatan ini di emban oleh golongan kaomu.
Mia Patamia	Si empat orang yang dianggap pendiri Kerajaan Buton berasal dari Johor
Murtabat Tujuh	Produk konstitusi Undang-undang Kesultanan Buton yang dibuat oleh Sultan ke 4 Dayanu Ikhsanuddin yang didasari oleh ajaran Tasawuf (sifat 20 puluh yang dimiliki Allah SWT)
Nagarakartagama	Kitab dari Kerajaan Majapahit yang ditulis oleh Mpu Prapanca
Pangka	Lapisan jabatan tinggi dalam Kesultanan Buton
Patalimbona	Berasal dari empat penguasa kampung yang berada di Buton yaitu kampung Balawulu, Peropa, Barangkatopa, dan Gundu-gundu. Yang

	kemudian menjadi cikal bakal dewan pengangkat raja
Papara	Masyarakat/orang-orang yang mendiami Kadie
Sapati	Patih, Perdana Menteri
Sara Bhitara	Istilah dalam Bahasa Buton yang berarti Yudikatif dalam cabang pembagian kekuasaan
Sara Gau	Istilah dalam Bahasa Buton yang berarti Legislatif dalam cabang pembagian kekuasaan
Sara Pangka	Istilah dalam Bahasa Buton yang berarti eksekutif dalam cabang pembagian kekuasaan
Syarana Hukumu	Jabatan yang mengatur perangkat mesjid keraton dan merupakan sentral dari sarana agama yang mengatur masalah keagamaan serta pelaksanaan ibadah.
Syarana Pancana	Undang-undang yang mengatur daerah yang ditaklukkan oleh Kesultanan Buton
Syarana Pataanguna	Hasil ijtihad Sultan Buton dalam upaya memperbaiki kerusakan moral dari anak-anak remaja dan menteri-menterinya
Syarana Wolio	Peraturan yang mengatur didaerah Wolio turunan dari Murtabat Tujuh Kesultanan Buton
Walaka Buton	Golongan kelas kedua didalam masyarakat
Wolio	Pusat (Kesultanan Buton)

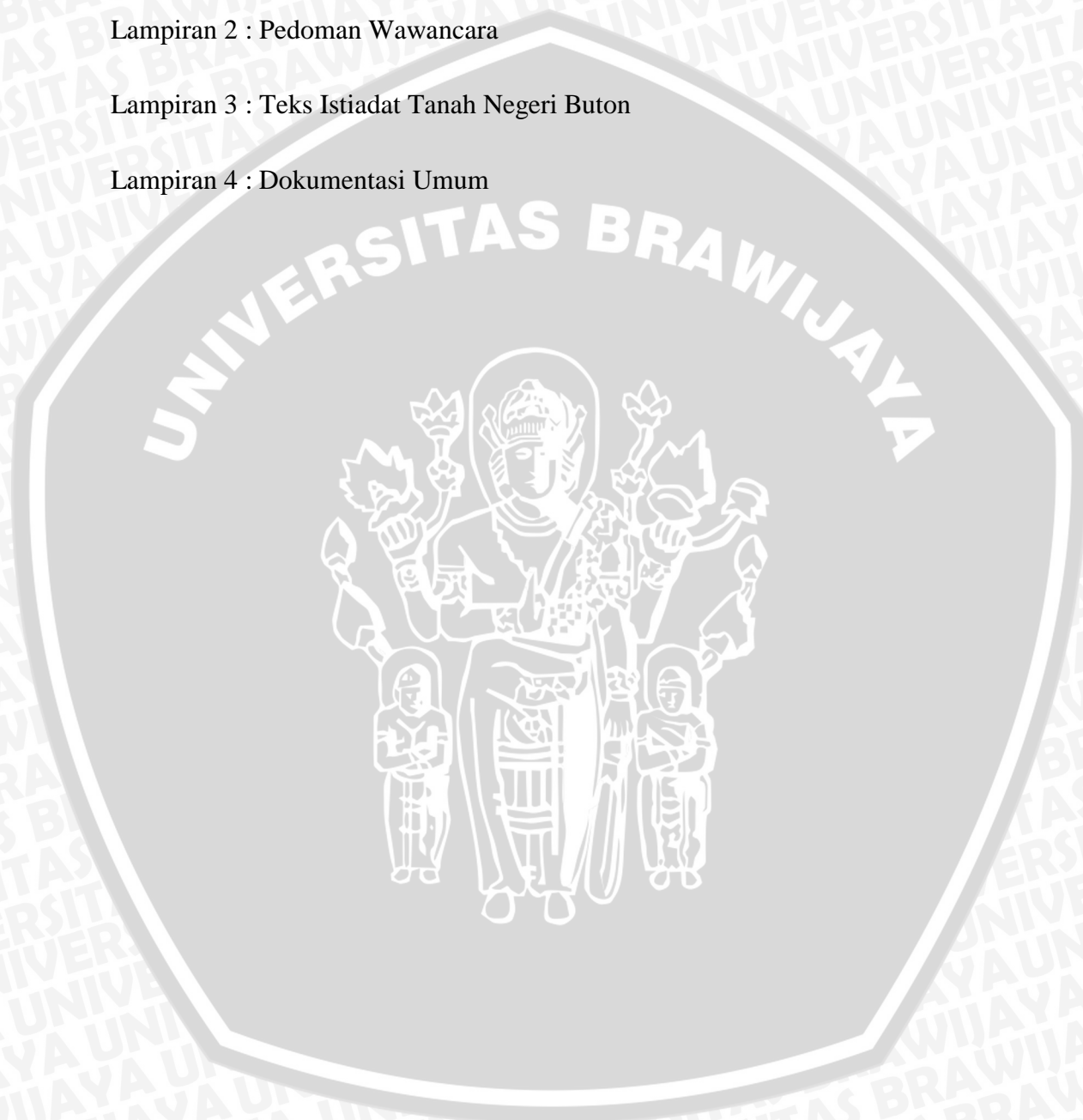
DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi Pribadi

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

Lampiran 3 : Teks Istiadat Tanah Negeri Buton

Lampiran 4 : Dokumentasi Umum



Curriculum vitae Peneliti

Nama : Muh. Ide Apurines

Tempat/tanggal lahir : Baubau, Sulawesi Tenggara 16 Agustus 1992

Alamat : Jln Limbo Wolio No 10, Kel. Tanganapada, Kec. Murhum, Kota Baubau

Email : apurinesi@yahoo.com

Telepon : 0852-9989-8162

I. Pendidikan Formal

- 1997-1998 : TK Candra Kirana
1998-2004 : SD Negeri 2 Baubau
2004-2007 : SMP Negeri 1 Baubau
2007-2010 : SMA Negeri 1 Baubau
2010-2015 : Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang

II. Pengalaman Organisasi

- 2010-2011 : Anggota Divisi Eksternal Eksekutif Mahasiswa Brawijaya
2010-2011 : Sekretaris Divisi Kaderisasi Himpunan Mahasiswa Pemerintahan (HIMAP)
2010 – 2011 : Ketua Divisi Kaderisasi Nol_Derajat Periode Pertama
2011 – 2012 : Anggota event orginazer MIX UB

III. Seminar dan Pelatihan

- Peserta acara seminar nasional “menakar kualitas demokrasi melalui kinerja wakil – wakil rakyat berlatar belakang selebriti”
- Sekolah Parlemen 2011
- Sekolah parlemen 2013
- Peserta Pekan Wirausaha “seminar nasional kewirausahaan”
- Peserta
- Peserta “Leaders of Government”

IV. Pengalaman Bekerja/Magang

- a. 2012 – 2013 : Divisi Sarana dan Prasarana BAPPEDA Kota Denpasar.
- b. 29 juli – 8 agustus 2013 : Magang BAPPEDA Kota Denpasar.



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penelitian ini berfokus pada praktik pemerintahan yang terdapat pada Kesultanan Buton pada tahun 1540-1960, yang dilakukan pada bulan September tahun 2014, yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara, Pulau Buton Kota Baubau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pemerintahan yang di jalankan dalam Kesultanan Buton di tahun 1540-1960. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data melalui beberapa teknik pengumpulan data yaitu, dari data primer yang bersumber dari data *heuristic* (studi pustaka dan dokumentasi) serta data sekunder yang bersumber dari wawancara. Disamping itu, peneliti juga akan memaparkan bagaimana sistem pemerintahan berjalan di Kesultanan Buton dapat dilihat dari proses-proses pemerintahan sejak masa Sultan Buton pertama hingga Sultan Buton ke 37.

Kata “Buton”, digunakan sebagai nama Kesultanan yang akan menjadi objek kajian penelitian ini, adalah nama sebuah pulau, yaitu pulau Buton.¹ Di pulau inilah terletak pusat pemerintahan Kesultanan Buton. Nama ini berasal dari nama jenis pohon, yaitu pohon butun.² Tidak diketahui, sejak kapan pulau itu bernama demikian. Yang pasti, sejak masa Gajah Mada menjadi patih Kerajaan

¹Orang-orang dulu di negeri ini menyebutnya “Buton”. Bukan “Butun”. Orang bugis-makassar juga menggunakan sebutan pertama. Sebutan pertama sangat dikenal di kota Makassar dikarenakan di kota Makassar terdapat suatu tempat yang bernama kampung butun, pasar butun dan jalan butun. Lihat ligtvoet, *beschrijving en Geschiedenis van Buton*, BKI, Vol. 26, 1878, hlm 1

²J.C. Anceaux, *Wolio dictionary*. 1987. Hlm 25. Orang Buton menyebut Pohon ini dengan “butu”. Dalam dunia ilmiah pertumbuhan ini dikenal dengan *Barringtonia asiatica*. Lihat Poerwadarminta. *Kamus umum bahasa Indonesia*, 1978, hlm 25.

Majapahit, Buton telah dikenal di Jawa. Hal ini dapat diketahui dari *kakawin Nagartagama* Karangan Mpu Prapanca. Prapanca dalam kitabnya menyebutkan sumpah Gajah Mada yang dikenal dengan “Sumpah Palapa”. Dalam kitab tersebut telah di temukan nama Butun sebagai bagian dari Kerajaan Majapahit pada masa kekuasaan Gajah Mada³. Dijelaskan dalam buku itu bahwa daerah takluk kerajaan Majapahit juga meliputi daerah-daerah di Sulawesi. Negeri-negeri di Sulawesi yang disebutkan oleh Prapanca dalam bukunya adalah sebagai berikut: *Muwah tanah I Batayan pramuka Batayan len Luwuk tentang Udamakatradyadhi nikanang sanusaspupul Ikangsakasananusana Makassar Butun Banggawi Kuni Craliyao mwangi (ng) Selaya Sumba Soto Muar, dst.*⁴

Dari informasi Mpu Prapanca tersebut, kita dapat memahami bahwa Buton, sejak zaman Majapahit atau sebelum Islam masuk di daerah Buton sekitar pertengahan abad ke-16, telah dikenal di daerah luar. Selain kitab *Nagarakartagama* sebagai sumber sejarah pertama yang menyebut nama Buton, seorang pelaut Portugal Tome Pires juga menyebut nama Buton ketika ia menceritakan pelayarannya di perairan nusantara pada tahun 1512-1515.⁵ Menurutnya, ia berangkat dari Singapura ke Maluku melalui Borneo, Makassar dan Buton.⁶ Informasi ini menunjukkan bahwa ketika itu Buton telah dikenal oleh pelaut-pelaut yang melintasi perairan nusantara, termasuk orang asing.

³Bambang pramudito. 2006. *Kitab Negara Kartagama : sejarah tata pemerintahan dan peradilan Keraton Majapahit*. Yogyakarta ; gelombang pasang. Hlm. 191

⁴Seluruh Sulawesi menjadi daerah ke Vi kerajaan Majapahit, Yaitu Bantayan(Bantaeng), Luwuk (Luwu), Udamakatraya (Taulaud), Makasar (Makassar), Butun (Buton), Banggawi (Banggai), Kunir (Pulau Kunit), Selaya (Selayar), Solot (Solor), dan seterusnya.

⁵ Armado Corteseo, *The Suma Oriental of Tome Pires*. Vol. 1, 1944. Hlm 220.

⁶ F.s.a. Declerqie. *Bijdragen tot de Kennis der Residentie Ternate*. 1890. Hlm 154

Pengenalan terhadap Buton oleh pihak luar, sebagaimana yang dikemukakan di atas, tidak jelas apakah Buton hanya sebagai suatu pulau ataukah sebagai suatu Kerajaan/Kesultanan yang berdaulat, yang mempunyai sistem pemerintahan tersendiri. Pengenalan dalam arti yang disebut terakhir, dipastikan terjadi pada tahun 1580. Informasi ini diperoleh dari sumber Ternate yang menyebutkan terjadinya serangan pasukan Kesultanan Ternate ke Kerajaan Buton untuk menyebarkan agama Islam.⁷

Kesultanan Buton berada di Pulau Buton (Provinsi Sulawesi Tenggara) tepatnya di kaki sebelah kiri dari pulau Sulawesi. Merupakan pulau yang letaknya strategis oleh jalur perdagangan di Indonesia timur berdekatan oleh dua kerajaan besar di wilayah timur Indonesia yaitu Kerajaan Goa/Talo dan Ternate/Tidore. Adapun kondisi eksisting saat ini kawasan yang akan menjadi tempat penelitian merupakan kawasan bersejarah Benteng Keraton Buton terletak di Kelurahan Melai dan termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara. Kawasan Bersejarah Benteng Keraton Buton berjarak tiga kilometer dari pusat Kota Baubau, untuk menuju ke kawasan ini dapat ditempuh melalui transportasi darat baik menggunakan kendaraan pribadi maupun angkutan umum.

Pada masa Kesultanan Buton Kawasan Benteng Keraton Buton merupakan ibukota kerajaan yang selain berfungsi sebagai pusat pemerintahan juga sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan dakwah (syiar) Islam sedangkan bangunan bentengnya sendiri memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu sebagai pembatas lingkungan

⁷ F.s.a. Declerqie. *Op. cit.* hlm 221

pusat pemerintahan Kesultanan Buton dan media pertahanan dari serangan musuh. Setelah Indonesia merdeka, kawasan benteng keraton Buton merupakan sebuah kawasan perkampungan penduduk yang termasuk dalam wilayah desa Melai Kecamatan Betoambari, Kabupaten Buton (pada saat itu Kota Bau-bau belum terbentuk). Pembentukan Kota Bau-bau terjadi pada tahun 2001 dan diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2001.⁸

Dimasa lampau Kesultanan Buton telah mengembangkan pemerintahan demokratis yang konstitusional sebagai landasan pemerintahan yang bersih dan berwibawa⁹. Modal dasar inilah yang menjadikan peneliti ingin mengangkat topik tersebut karena mempunyai nilai keunikan dan kearifan lokal yang menjadi nilai-nilai historis dan *culture*. Sehingga sangat berguna untuk dilestarikan dan dikembangkan dalam era otonomi daerah saat ini. Dalam upaya mendukung percepatan pembangunan dan pemeliharaan keamanan serta ketentraman melalui penghayatan terhadap keragaman budaya dan latar belakang sosialnya

Kesultanan Buton adalah salah satu dari sedikit kerajaan maritim di Nusantara, dan sebelum berdirinya Kesultanan Buton dahulunya berupa sebuah Kerajaan Buton yang pada akhirnya bertransformasi dengan masuknya Islam di Negeri Buton. Secara temporal berdasarkan kronologisnya, bahwa Kerajaan Buton terbentuk pada tahun 1332 oleh dewan yang di sebut *Patalimbona*¹⁰ yaitu penguasa ke empat kampung (Kampung Balawulu, Peropa, Barangkatopa, dan

⁸ UU RI No. 13 tahun 2001 *Tentang Pemekaran Kota Baubau Dari Wilayah Kabupaten Buton*

⁹ Said D. 2006. *Menelusuri Jejak Kota Bau-Bau*. BauBau: Prisma. hlm. 3.

¹⁰ *Patalimbona* merupakan cikal bakal dari dewan siolimbona yang mempunyai fungsi utama untuk melantik raja/sultan

Gundu-Gundu)¹¹. Namun ada hal yang istimewa disini yaitu pengangkatan Raja Buton yang pertama, Dimana raja pertama yang diangkat adalah seorang wanita yang bukan berasal dari keempat kampung tersebut, sedangkan raja dari keempat kampung itu lalu diangkat menjadi menteri (*Bonto*)¹² Dapat diartikan bahwa di mata keempat raja dan rakyat dari keempat kerajaan tersebut, mereka melihat adanya sifat kepemimpinan dan kewibawaan serta keteladanan yang dimiliki Ratu Wa Kaka yang melebihi mereka, sehingga ia dipilih secara aklamasi menjadi raja/ratu pertama bagi kerajaan Buton¹³. Di samping itu, Kerajaan Buton dengan Raja pertama adalah seorang wanita, ini menandakan antara wanita dan pria memiliki hak dan kedudukan yang sama sebagai seorang pemimpin.

Pengangkatan Ratu Wa Kaka menunjukkan adanya kriteria dari sebuah bentuk pemerintahan demokrasi walaupun secara menyeluruh model pemerintahannya masih menggunakan sistem monarki di karenakan dari Raja pertama Wa Kaka hingga raja ke-5 masih merupakan keturunan raja pertama. Adapun dengan pengangkatan raja ke-enam Lakilaponto (1491-1537)¹⁴. Pengangkatannya sebagai seorang raja disebabkan karena jasanya dalam menumpas Armada perang La Bolontio¹⁵, yang kerap mengganggu Kerajaan Buton, yang selanjutnya menjadi Sultan Buton pertama (1518) setelah Raja Lakinaponto tertarik dengan ajaran Islam yang di bawa oleh Syekh Abd Wahid

¹¹ Said D. *Op.cit* hlm. 31

¹² *Bonto* adalah menteri turunan dari bangsawan walaka yang bertugas di 34 kadie, yang tugas utamanya adalah mengawasi dan memajukan kesejahteraan rakyat serta memperhatikan usul dari kehendak rakyat.

¹³ Anceau.J.C. 1987. *Op.cit.* hlm 35

¹⁴ Achadiati Ikram. 2000. *Istiadat Tanah negeri Buton*. Jakarta : Depdikbud. hlm 8

¹⁵ La Bolontio dikisahkan dalam sejarah Buton sebagai seorang bajak laut yang sering mengganggu daerah perairan Buton, dia dikisahkan sebagai orang yang kuat, kejam, mempunyai kesaktian yang tinggi dan bermata satu. La Bolontio berhasil dikalah oleh La Kinaponto anak dari Raja Muna

dengan demikian mengubah status Kerajaan Buton menjadi Kesultanan Buton. Pada masa pemerintahan Sultan Dayanu Ikhsanudin (Sultan ke-4) barulah Kesultanan Buton menerapkan sistem pemerintahan kerakyatan dan pemerintahannya berbentuk demokrasi.

Tidak seperti kerajaan-kerajaan lain yang terdapat di Nusantara di mana jabatan sultan diwariskan secara tunggal turun-temurun. Namun pada sistem pemerintahan Kesultanan Buton, Sultan dipilih berdasarkan berdasarkan satu golongan tertentu (*Kaomu*).¹⁶ Sistem pemilihan ini disebut sebagai demokratis-*aristokratis* atau sistem pemilihan terbatas, dengan calon yang disiapkan oleh golongan *kaomu* dengan tiga cabang keluarga yang disebut *Kamboru-Mboru Talu Palena* (tiga cabang fraksi partai).¹⁷ Adapun dengan adanya pembagian kekuasaan (*power sharing*) di Kesultanan Buton antara eksekutif (*Sara Pangka*), legislatif (*Sara Gau*) dan, yudikatif (*Sara Bhitara*) yang bertujuan untuk menstabilkan sistem politik di Kesultanan Buton, terdapat juga sistem desentralisasi pusat-daerah, serta adanya kerajaan aliansi dalam Kesultanan Buton atau biasa lebih dikenal sebagai sistem negara federal

Disamping itu dengan adanya konstitusi tertulis yang telah di hasilkan oleh pemerintahan Kesultanan Buton di masa Sultan ke-empat. Yakni produk “Undang-Undang Murtabat Tujuh Sara Wolio”¹⁸, yang menjadi landasan bernegara dan memberikan nilai-nilai luhur terhadap masyarakat Buton.

¹⁶ *Kaomu* adalah golongan strata pertama dalam wilayah Kesultanan Buton yang diberi hak untuk memimpin pemerintahan (menjadi Sultan)

¹⁷ *Kamborumbu* artinya tiang, *tal* artinya tiga, *pale* artinya potong, dan *na* yang berarti nya atau menunjuk tempat tertentu

¹⁸ Martabat Tujuh Sara Wolio adalah peraturan perundang-undangan Kesultanan Buton yang mengatur adat ataupun hukum di buton yang berlandaskan pada murtabat tujuh murni/ Sara Patagunaa beserta ajaran tasawuf

Nusantara Indonesia kaya akan sejarah Kerajaan-Kerajaannya, sebagian besar dari sejarah tersebut mencatat bahwa pemerintahan kerajaan tersebut bersifat monarki, menurunkan putra mahkota sebagai pemimpin atau penerus dan praktik monarki lainnya.¹⁹ Namun diantara sejarah kerajaan tersebut ada diantaranya yang menerapkan bentuk pemerintahan yang mempunyai unsur demokrasi. Bentuk pemerintahan demokrasi tidak begitu populer di era kerajaan nusantara begitu pula kerajaan yang menerapkannya tidak begitu populer di buku sejarah yang kita baca. Dari sedikit gambaran latar belakang tersebut penelitian ini kemudian dimaksudkan untuk mengidentifikasi kemudian menganalisis bentuk praktik pemerintahan yang berlangsung di Kesultanan Buton pada tahun 1540-1960 Masehi.



¹⁹ Purwadi. 2009. *Sejarah sastra jawa klasik*. Yogyakarta ; panji pustaka. Hlm 28

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang ada, maka perumusan masalah yang diteliti adalah bagaimanakah penerapan pemerintahan pada masa Kesultanan Buton periode 1540-1960 ?

1.3 Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis praktik pemerintahan pada masa Kesultanan Buton pada tahun 1540-1960?

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

a. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat, dalam menghayati nilai-nilai demokratis yang sempat diterapkan oleh Kesultanan Buton.

b. Manfaat Akademis:

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya sumber referensi ilmu pengetahuan terkait dengan sistem pemerintahan yang pernah terjadi di nusantara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam Bab kedua ini akan dijelaskan mengenai teori demokrasi Robert A. Dahl yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian. Akan dipaparkan pula beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan untuk menunjukkan orisinalitas dari penelitian serta memperkuat isi dari penelitian ini sehingga layak menjadi sebuah penelitian ilmiah.

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada bagian studi terdahulu ini akan dijelaskan mengenai studi-studi relevan yang pernah dilakukan sebelumnya. Ada tujuh studi terdahulu yang disajikan dalam penelitian ini. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati yang berjudul Sistem Pemerintahan Kesultanan Buton Pada Masa Kepemimpinan Dayanu Ikhsanudin²⁰. Penelitian ini memfokuskan pada masa kepemimpinan Sultan Buton Dayanu Iksanuddin. Dimana dalam penelitian ini, peneliti mengkaji kepemimpinan Sultan Dayanu Iksanuddin dimana terdapat peraturan kesultanan/ undang-undang yang di sebut Murtabat Tujuh²¹, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori pembangunan politik, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif ekplanatif.

²⁰ Nurhayati. 2003. Tesis : *Sistem Pemerintahan Kesultanan Buton Pada Masa Kepemimpinan Dayanu Ikhsanuddin*

²¹ *Ibid.*

Kedua, dengan penelitian berjudul *Konsep Demokrasi To Manurung*²² (studi yang dilakukan di Sulawesi Selatan) oleh Jumadi penelitian tersebut membahas mengenai konsep demokrasi yang ada pada kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, di mana penulis mencoba mengkaji mengenai isi perjanjian *To Manurung* yang mengulas ajaran tentang moral kepemimpinan, hukum adat, termasuk hak dan kewajiban raja dan pembantu raja juga pada rakyat.

Ketiga, penelitian berjudul *Sejarah Buton Yang Terabaikan Labu Rope Labu Wana* penelitian ini berasal dari disertasi yang di tulis oleh Susanto Zuhdi²³, dalam penelitian ini penulis membahas mengenai prinsip kesultanan yang ada di Negeri Buton, penulis berusaha untuk mengkaji mengenai *labu rope* dan *labu wana* sebuah falsafah yang ada di negeri Buton. dimana dalam penelitian ini lebih membahas mengenai pengaruh ekspansi Kerajaan Bone, dan Kerajaan Ternate terhadap Kesultanan Buton. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Hassanudin Anwar mengenai Warisan Demokrasi Gorontalo²⁴. Dalam penelitian tersebut penulis mencoba menguak sistem pemerintahan demokrasi yang terdapat pada Kerajaan Gorontalo. Di samping itu penulis juga berusaha untuk mengetahui peran dari *bate* (dewan adat) dan *bantayo paboide* (dewan kerjaan) dalam proses pemerintahan serta pengangkatan Sultannya.

²² Jumadi. 2010. *Konsep Demokrasi To Manurung*. Jurnal Al-Risalah ; Volume 10 Nomor 2 Nopember

²³ Susanto Zuhdi. 2010. *Sejarah Buton yang terbaik labu wana labu rope*. Jakarta ; PT. Rajagrafindo

²⁴ Hasanudin Anwar. Jurnal : *Warisan Demokrasi Gorontalo*

Kelima, penelitian yang berjudul Masyarakat, Sejarah dan Budaya Buton. Penelitian ini di tulis oleh seorang guru besar Universitas Vrijo di Amsterdam yang bernama J.W. Schoorl.²⁵ Peneliti mencoba menjabarkan mengenai orang Buton, persekutuan antara Buton dan VOC, islam dan kekuasaan, peran wanita di Kesultanan Buton, serta fungsi *Kadie* (desa). Dalam tulisan tersebut dijabarkan secara spesifik inti sari dari perjalanan pembentukan negara muda Kesultanan Buton.

Keenam, penelitian yang berjudul menelusuri jejak Kota Baubau dalam lintas sejarah nusantara yang di tulis oleh Said D.²⁶ Penelitian ini berfokus pada asal usul Kerajaan/Kesultanaan Buton mulai dari bentuk pemerintahannya hingga penamaan Baubau dan alasan utama menjadikan Kota Baubau sebagai pusat pemerintahan. Dalam penelitian ini peneliti mencoba mengajak untuk melihat Kota Baubau di masa lampau, mulai dari masa Kerajaan, Kesultanan, Hindia-Belanda, dan awal kemerdekaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis

Ketujuh, penelitian yang berjudul Kesultanan Buton dalam sejarah dan naskah nusantara yang ditulis oleh La Niampe. Penelitian ini berfokus pada sejarah naskah masa Kerajaan Buton hingga masa Kesultanan Buton yang diambil dari naskah hikayat Negeri Buton. penelitian ini menceritakan awal mula terbentuknya Kerajaan Buton dan awal mula masuknya Islam di Buton dilihat dari jejak peninggalan naskahnya²⁷

²⁵ Schoorl. 2003. *Masyarakat Sejarah, Dan Budaya Buton*

²⁶ Said D. *Lot.cit.*

²⁷ Niampe. 2002. *Kesultanan Buton dalam sejarah dan naskah nusantara.*

Tabel 2.1
Daftar Penelitian Terdahulu yang relevan dengan peneliti

No	Judul	Metode	Hasil Penelitian dan Pembeda dari Skripsi Peneliti
1	Sistem Pemeritahan Kesultanan Buton Pada Masa Kepemimpinan Dayanu Ikhasnuddin, Penulis Nurhayati	Kualitatif Deskriptif eksplanatif	Dalam bidang-bidang ideology sosial budaya masih menunjukkan pengaruh nilai murtabat tujuh yang sangat kuat sekalipun telah ada dikalangan elite masyarakat yang meninggalkan sebagian nilai-nilai murtabat tujuh. Pembeda dari penelitian terdahulu yang peneliti telah paparkan adalah fokus masalah yang peneliti angkat dari sudut pandang demokrasi serta perjalanan transisi pemerintahan Kesultanan Buton
2	Konsep demokrasi <i>To Manurung</i> , Penulis Jumadi	Kualitatif	Demokrasi yang dipraktekkan pada kerajaan besar di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa, demokrasi telah dikenal dengan prinsip-prinsip kerakyatan yang murni. Idea demokrasi sangat bertentangan dengan dengan praktek diktator. Untuk membuktikan bahwa kerajaan di Sulawesi Selatan menganut demokrasi, maka dapat dibaca sebagaimana telah tertuang dalam perjanjian raja dengan rakyatnya. Pembeda dari penelitian terdahulu yang peneliti telah paparkan adalah fokus masalah yang peneliti angkat dari sudut pandang demokrasi serta perjalanan transisi pemerintahan Kesultanan Buton
3	Sejarah Buton Yang Terabaikan Labu Rope Labu Wana, Penulis Susanto Zuhdi	Kualitatif Deskriptif	Buton memiliki ancaman dari arah haluan (rope) yaitu kerajaan Gowa yang selalu berusaha mengambil alih kekuasaan di Buton dan disatu sisi terdapat ancaman dari buritan (wana) Kerajaan Ternate, adapun manfaatnya diperoleh pengetahuan tentang karakteristik dan potensi daerah yang unik, emelainkan juga bertambahnya pemahaman kita tentang kemaritiman Indonesia. Pembeda dari penelitian terdahulu yang peneliti telah paparkan adalah fokus masalah yang peneliti angkat dari sudut pandang demokrasi serta perjalanan transisi pemerintahan

			Kesultanan Buton
4	Warisan Demokrasi Gorontalo, Penulis Hassanudin Anwar	Kualitatif	Beberapa gambaran di atas tampak jelas bahwa sistem demokrasi Gorontalo memberi pemahaman tentang peran atau otoritas seorang raja tidak mutlak, dalam arti raja dapat diturunkan sewaktu-waktu oleh para penerus yang telah mengangkatnya. Selain itu masa kekuasaan raja tidak ditentukan oleh batas waktu tertentu, melainkan dari kesetiiaannya menjalankan peraturan yang ditetapkan dalam norma hukum, agama dan adat istiadat. Pembeda dari penelitian terdahulu yang peneliti telah paparkan adalah fokus masalah yang peneliti angkat dari sudut pandang demokrasi serta perjalanan transisi pemerintahan Kesultanan Buton
5	Masyarakat, Sejarah, Budaya Buton, Penulis J.W. Schoorl	Kualitatif	Menemukan banyak pengetahuan baru mengenai pola hidup masyarakat Buton serta perkembangan kesultannya di masa pemerintahan hindia belanda, terlebih lagi menambah pemahaman kita mengenai organisasi sosial politik yang tertata rapi dalam sebuah bentuk kerajaan. Pembeda dari penelitian terdahulu yang peneliti telah paparkan adalah fokus masalah yang peneliti angkat dari sudut pandang demokrasi serta perjalanan transisi pemerintahan Kesultanan Buton
6	Menelusuri jejak Kota Baubau dalam lintas sejarah nusantara, Penulis Said	Kualitatif Deskriptif-analitis	Perluasan permukiman di Kesultanan Buton cenderung kearah pesisir pantai. Pasar dan kantor didirikan di sekitar pantai yang dekat dengan pelabuhan. Apabila melihat dinamika yang terjadi di Kota Baubau, maka terlihat bahwa arah perkembangan kota lebih kepada suatu ciri kota niaga atau kota pelabuhan yang mengandalkan sektor perdagangan sebagai basis perkembangannya. Pembeda dari penelitian terdahulu yang peneliti telah paparkan adalah fokus masalah yang peneliti angkat dari sudut pandang demokrasi serta perjalanan

			transisi pemerintahan Kesultanan Buton
7	Kesultanan Buton dalam sejarah dan naskah nusantara	Kualitatif	Pengaruh munculnya Islam di Buton bermula dari datangnya para <i>Mia Patamiana</i> yang berasal dari Johor , serta munculnya ajaran Tasawuf yang menjadi landasan terbentuknya konstitusi di Kesultanan Buton. Pembeda dari penelitian terdahulu yang peneliti telah paparkan adalah fokus masalah yang peneliti angkat dari sudut pandang demokrasi serta perjalanan transisi pemerintahan Kesultanan Buton

Sumber : Diolah dari berbagai sumber tahun 2014

2.2 Bentuk-bentuk Pemerintahan

Dalam buku *The World Alamanac and Book of Fact 2013*, jumlah negara di dunia terhitung sebanyak 196. Dengan jumlah negara yang begitu banyak, beberapa negara mempunyai pengaturan pemerintahan yang serupa tetapi ada juga yang berbeda satu sama lain. Dengan demikian untuk menilai bentuk pemerintahan suatu negara paling tidak dengan beberapa tipologi dasar pemerintahan, baik yang dikemukakan oleh Plato, Aristoteles, Polybius, Machiavelli, Montesquieu dan lain-lain, dan dari hal tersebutlah peneliti mengelompokkan ada enam jenis pemerintahan:

1. Pemerintahan Monarki (pemerintahan oleh satu orang), Negara yang berbentuk monarki di kepalai oleh seorang raja. Sistem pemerintahan kerajaan pada umumnya, menggunakan sistem pemerintahan terpusat. Kontinuitas kepemimpinannya bersifat turun temurun. Raja dianjurkan mempunyai sifat-sifat ideal yakni adil, murah hati, bijaksana, dan mampu menjaga keamanan serta ketentraman negaranya. Sifat ideal semacam ini

adalah syarat universal bagi seorang raja di segala tempat. Sistem pemerintahan kerajaan biasanya menggunakan konsep religi ataupun keagamaan untuk menyatukan orientasi keseluruhan warganya.²⁸ Hampir seluruh sistem pemerintahan kerajaan yang ada di Asia termasuk Kerajaan Buton di pengaruhi oleh ajaran Hindu Budha.

2. Pemerintahan Aristokrasi, merupakan pemerintahan oleh sekelompok elit masyarakat yang mempunyai status sosial, kekayaan dan kekuasaan politik yang besar, bentuk ini dalam model pemerintahannya menggunakan sistem warisan dan terpusat pada sekelompok elit tertentu, keberuntungan-keberuntungan ini dinikmati oleh satu generasi ke generasi aristokrat yang lain. Status, kekuasaan dan kekayaan di wariskan
3. Oligarki (pemerintahan oleh sedikit orang yang tak bergelar, militer atau sipil) pemerintahan oleh suatu minoritas dalam masyarakat, suatu minoritas yang tidak perlu dibedakan oleh gelar aristokrasi bentuk pemerintahan atau hak istimewa, biasanya dipegang oleh elit-elit kecil daerah.
4. Plutokrasi adalah pemerintahan oleh beberapa orang kaya. Bentuk pemerintahan monarki, aristokrasi, oligarki dan plutokrasi semuanya adalah pemerintahan yang bersifat otoriter.
5. Pemerintahan Otoriterisme, adalah bentuk pemerintahan oleh sedikit orang dalam sistem pemerintahannya, dan hanya mengizinkan satu partai yang berkuasa pada sistem politiknya. Tidak ada oposisi politik yang

²⁸Ensiklopedi.Nasional Indonesia. 1990/1991. Jakarta. Cipta Adi Pustaka. Hlm 57

terorganisasi, tanpa adanya para pemimpin politik lain yang bisa menggantikan elit yang ada untuk melaksanakan program-program baru.

6. Pemerintahan Demokrasi, (bentuk pemerintahan yang ditentukan oleh banyak orang) sistem pemerintahannya menggunakan sistem pemerintahan kerakyatan. Dalam sistem politiknya seorang pemimpin dipilih oleh rakyat baik langsung maupun perwakilan. Dalam bentuk pemerintahan ini semua kelas dapat berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Suara semua kelas sama penting dan dapat di dengar, bentuk pemerintahan ini akan berjalan maksimal apabila keseimbangan antarkelas bisa tercapai. Bentuk pemerintahan demokrasi sendiri telah hadir dalam masa pemerintahan Kesultanan Buton terlihat dari proses pemerintahan yang dijalankan akan tetapi demokrasiya murni versi Kesultanan Buton tidak sesempurna dengan demokrasi procedural yang di kemukakan oleh Robert A. Dahl.

2.3 Teori Demokrasi Robert Dhal

Robert Dahl merumuskan sebuah ide mengenai tatanan politik yang disebut Polyarchy. Polyarchy merupakan istilah yang dikemukakan oleh Dahl untuk mengganti kata demokrasi. Bagi Dahl, demokrasi mengandung dua demensi - kontestasi dan partisipasi. Karena menekankan dua demensi ini maka konsep demokrasi ini sering disebut demokrasi minimalis. Dalam melihat bagaimana demokrasi bekerja cukup dilakukan dengan dua ukuran minimal:

1. seberapa tinggi tingkat kontestasi, kompetisi atau oposisi yang memungkinkan (Liberalisasi).

2. seberapa banyak warganegara yang memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kompetisi politik itu (*Inclusiveness*).

Berdasarkan dua dimensi tersebut, Dahl membuat tipologi empat sistem politik: hegemoni tertutup (kompetisi dan partisipasi sama-sama rendah) ; oligarki kompetitif (kompetisi tinggi tetapi partisipasi rendah) ; hegemoni inklusif (partisipasi tinggi-kompetisi rendah) dan Poliarki (partisipasi dan kompetisi tinggi).

Demokrasi telah didiskusikan kurang lebih selama 25 abad, kurung waktu yang cukup lama untuk memberikan suatu gagasan yang jelas mengenai demokrasi yang dapat disepakati oleh semua orang, atau oleh hampir semua orang. Kurun waktu 25 abad tersebut, dimana demokrasi telah dibahas, diperdebatkan, didukung, diserang, dilecehkan, ditegakkan, dipraktekkan, dihancurkan, dan kadang-kadang di tegakkan kembali, dan tidak menghasilkan kesepakatan tentang masalah-masalah yang paling pokok mengenai demokrasi.

Kenyataan yang membuktikan bahwa demokrasi ini telah memiliki sejarah demikian panjang benar-benar telah menimbulkan kekacauan dan perbedaan pendapat, karena demokrasi itu mempunyai makna yang berbeda-beda bagi orang yang berbeda-beda, pada waktu dan tempat yang berbeda-beda pula. Dalam periode yang panjang dalam sejarah manusia, demokrasi telah menghilang dalam praktek, dan hanya menjadi sebuah gagasan ataupun kenangan dikalangan sejumlah kecil orang tertentu saja. Sampai dua abad yang terakhir ini saja, dalam

sepuluh generasi, sedikit sekali sejarah yang memperlihatkan contoh-contoh demokrasi yang sesungguhnya.²⁹

Hingga abad ke-20, banyak negara didunia menyatakan bahwa sistem yang tidak demokratis itu lebih unggul baik dalam teori maupun dalam praktek. Mayoritas negara-negara yang ada di dunia ini berada di bawah pemimpin/penguasa yang tidak demokratis. Dan pimpinan rezim yang tidak demokratis biasanya berupaya untuk membenarkan pemerintahan mereka dengan mengemukakan pemahaman lama yang masih tetap dipertahankan dengan menyatakan bahwa rakyat tidak memiliki kemampuan untuk ikut serta memerintah negara. Pendapat tersebut selanjutnya diartikan bahwa rakyat akan menjadi lebih baik keadaanya apabila mereka menyerahkan segala urusan yang berhubungan dengan pemerintahan kepada orang lebih mengetahui tentang pemerintahan (pemerintah sendiri), atau kepada orang yang lebih bijak dari mereka.

Dalam praktek, alasan-alasan tersebut tidak pernah dianggap cukup, dan apabila alasan tersebut sudah tidak relevan lagi maka pemerintahan yang rezim baisanya akan menggunakan paksaan. Kebanyakan rakyat tidak pernah menyatakan apa yang mereka setuju secara terus terang untuk diperintah oleh orang –orang yang mengangkat diri sendiri sebagai pemimpin mereka; mereka cenderung dipaksa untuk menerimanya. Pandangan dan gagasan yang sudah tua ini sama sekali tidak mati hingga masa sekarang ini. Dalam bentuk pertanyaan apapun dan bagaimanapun sebuah pemerintahan yang dikuasai oleh

²⁹Robert A. Dahl. 2001. *Perihal Demokrasi*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. hlm 40

satu orang, beberapa orang, ataupun sekelompok orang, dan banyak orang, masih tetap ada di zaman ini.

Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang memberikan hak kepada setiap warga masyarakatnya untuk menentukan keputusan, dan demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dianggap baik oleh para pakar ketatanegaraan di seluruh dunia. Hasil penelitian dari UNESCO tahun 1949 disimpulkan bahwa untuk pertama kali dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh.³⁰

Demokrasi menggambarkan sistem pemerintahan yang berasaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat. Abraham Lincoln dalam pidato Gettysburg mendefinisikan demokrasi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, and for the people*). Rakyat mempunyai kekuasaan mutlak terhadap sebuah pemerintahan dalam negara, rakyat mempunyai kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara. Demokrasi memungkinkan semua rakyat untuk ikut andil dalam pembuatan, perumusan dan pengembangan hukum baik itu secara langsung maupun secara tak langsung (perwakilan). Suatu negara yang memiliki sistem pemerintahan demokrasi akan sangat berbeda dibandingkan dengan pemerintahan yang bentuknya monarki.

³⁰ Miriam Budiarmo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 50.

2.3.1 Kriteria Demokrasi Robert A. Dahl

Gagasan mengenai demokrasi sangatlah luas, untuk mengenali apakah bentuk pemerintahan suatu negara tersebut berbentuk demokrasi atau tidak, Dahl telah merumuskan lima kriteria untuk mencapai bentuk pemerintahan demokrasi kriteria tersebut yaitu:³¹

1. *Partisipasi efektif*. Sebelum sebuah kebijakan digunakan oleh kelompok, seluruh anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk membuat sebuah gagasan atau ide yang dapat diketahui oleh anggota-anggota lainnya sebagaimana kebijakan itu dibuat.
2. *Persamaan suara*. Ketika tiba saat dibuatnya keputusan mengenai kebijakan tersebut, maka setiap anggota berhak mempunyai kesempatan yang sama untuk memberikan suara dan seluruh suara harus dihitung sama
3. *Pemahaman yang cerah*. Dalam batas waktu yang rasional setiap anggota berhak mempunyai kesempatan yang sama untuk mempelajari kebijakan-kebijakan alternative yang relevan dan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin
4. *Pengawasan agenda*. Setiap anggota berhak mempunyai kesempatan eksklusif untuk memutuskan bagaimana dan apa permasalahan yang dibahas dalam agenda. Jadi proses demokrasi yang dibutuhkan oleh tiga kriteria sebelumnya tidak pernah tertutup. Berbagai kebijakan kelompok tersebut selalu terbuka untuk dapat diubah oleh para anggotanya, jika mereka menginginkannya.
5. *Pencakupan orang dewasa*. Semua, atau paling tidak sebagian besar, orang dewasa yang menjadi penduduk tetap seharusnya memiliki hak kewarganegaraan penuh, yang ditunjukkan oleh empat kriteria sebelumnya

Dari kesimpulan lima kriteria demokrasi yang dipaparkan oleh Dahl dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri demokrasi yaitu; adanya kebebasan, keadilan, persamaan hak bagi warga negara tanpa kecuali (pria dan wanita), mempunyai konstitusi (UUD), partisipasi, dan mempunyai sebuah parlemen nasional yang terdiri dari para wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat.

³¹ Robert A. Dahl. *Op.cit.* hlm 52

2.3.2 Faktor Pendukung Demokrasi Dalam Sistem Pemerintahan

Menurut Dahl dalam menghadapi sejarah yang demikian panjangnya, mengapa kita harus percaya bahwa konsep demokrasi adalah suatu cara yang lebih baik untuk memerintah suatu negara dibandingkan konsep-konsep pemerintahan lainnya yang bukan demokrasi?³² Dibandingkan dengan alternatif manapun yang mungkin ada, demokrasi paling tidak lebih unggul dalam sepuluh hal yaitu :

1. Demokrasi mencegah tumbuhnya pemerintahan yang dipimpin oleh kaum otokrat yang kejam dan licik
2. Demokrasi menjamin bagi warga negaranya dengan sejumlah hak asasi yang tidak diberikan dan tidak dapat diberikan oleh sistem-sistem yang tidak demokratis
3. Demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga negaranya dari pada alternatif lain yang memungkinkan.
4. Demokrasi membantu rakyat untuk melindungi kepentingan dasarnya
5. Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi orang-orang untuk menggunakan kebebasan dan menentukan nasibnya sendiri, yaitu untuk hidup di bawah hukum yang mereka pilih sendiri
6. Hanya pemerintah yang demokrasi yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggung jawab moral.
7. Demokrasi membantu perkembangan manusia lebih dari pada alternatif lainnya yang memungkinkan
8. Hanya pemerintah yang demokrasilah yang dapat membantu perkembangan tingkat persamaan politik yang relatif tinggi
9. Negara-negara demokrasi perwakilan modern tidak berperang satu sama lain.
10. Negara-negara dengan pemerintahan yang demokrasi cenderung lebih makmur daripada negara-negara dengan pemerintahan yang tidak demokratis.

³²Robert A. Dahl. *Op.cit.* hlm 84

Adapun beberapa ciri-ciri lembaga politik yang dibutuhkan dalam demokrasi berskala besar yaitu :³³

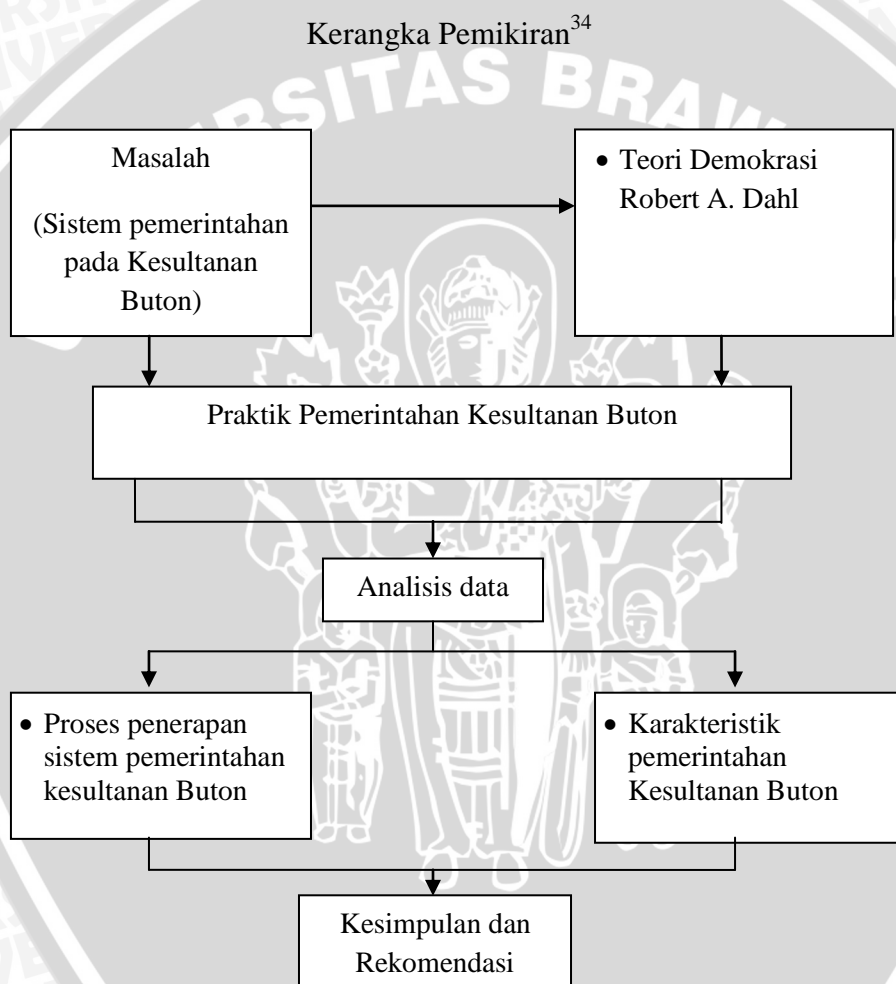
1. Para pejabat yang dipilih. Kendali terhadap keputusan pemerintah mengenai kebijakan secara konstitusional berada ditangan para pejabat yang dipilih oleh warga negara. Jadi, pemerintahan demokrasi skala besar yang modern merupakan perwakilan
2. Pemilihan umum yang bebas, adil, dan berkala. Para pejabat yang dipilih ditentukan dalam pemilihan umum yang seringkali diadakan dan dilaksanakan dengan adil, dimana tindakan pemaksaan agak jarang dipakai.
3. Kebebasan berpendapat. Warga negara berhak menyatakan pendapat mereka sendiri tanpa adanya bahaya hukuman yang keras mengenai masalah-masalah persamaan politik yang didefinisikan secara luas, termasuk kritik terhadap para pejabat, pemerintah, reim, tatanan sosial ekonomi, dan ideologi yang ada.
4. Akses ke sumber-sumber informasi alternatif. Warga negara berhak mencari sumber-sumber informasi alternatif dan bebas dari warga lain, para ahli, surat kabar, majalah, buku, telekomunikasi, dan lain-lain. Lagi pula, sumber-sumber informasi alternatif yang ada secara nyata tidak berada dibawah kendali pemerintah atau kelompok politik lain yang berusaha mempengaruhi keyakinan dan tingkah laku masyarakat, dan sumber-sumber alternatif ini secara efektif dilindungi undang-undang.
5. Otonomi asosiasional. Untuk mencapai hak mereka yang beraneka macam itu, termasuk hak yang diperlukan untuk keefektifan tindakan lembaga-lembaga politik demokrasi, maka warga negara juga berhak membentuk perkumpulan atau organisasi yang relatif bebas, termasuk partai politik dan kelompok kepentingan yang bebas.
6. Hak kewarganegaraan yang eksklusif. Tidak seorangpun yang menetap disuatu negara dan tunduk pada konstitusi negara tersebut dapat diabaikan hak-haknya, hal yang diberikan kepada warga lainnya dan diperlukan kelima cirri-ciri lembaga politik yang baru saja disebutkan. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk memberikan suara untuk memilih para pejabat dalam pemilihan umum yang bebas dan adil; hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan; hak untuk bebas berpendapat; hak untuk membentuk dan berpartisipasi dalam organisasi politik; hak untuk mendapatkan sumber informasi yang bebas; dan hak untuk berbagi kebebasan dan kesempatan

³³ Robert A. Dahl. *Op.cit.* hlm 118-120

lainnya yang memungkinkan diperlukan bagi keberhasilan tindakan lembaga-lembaga politik pada demokrasi skala besar.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berikut ini merupakan kerangka pemikiran dari penelitian ini yang di gunakan untuk mempermudah proses penelitian, dipaparkan dalam bentuk gambar sebagai berikut:



Gambar. 3.1

Sumber : Hasil olahan penulis 2014

³⁴ Model kerangka penelitian yang di pengaruhi ilmu atropolgi

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan peneliti. Peneliti menggunakan pendekatan historis, dengan data kualitatif yang didapat melalui beberapa teknik. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti berupa studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan model alur, yang akan dijelaskan pula pada bagian ini.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah adalah metode atau cara yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian peristiwa sejarah dan permasalahannya. Dengan kata lain, metode penelitian sejarah adalah instrumen untuk merekonstruksi peristiwa sejarah (*history as past actuality*) menjadi sejarah sebagai kisah (*history as written*). Dalam ruang lingkup Ilmu Sejarah, metode penelitian itu disebut metode sejarah.

Metode sejarah digunakan sebagai metode penelitian, pada prinsipnya bertujuan untuk menjawab enam pertanyaan (5 W dan 1 H) yang merupakan elemen dasar penulisan sejarah, yaitu what (apa), when (kapan), where (dimana), who (siapa), why (mengapa), dan how (bagaimana).³⁵

Dalam proses penulisan sejarah sebagai kisah, pertanyaan-pertanyaan dasar itu dikembangkan sesuai dengan permasalahan yang perlu diungkap dan dibahas. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itulah yang harus menjadi sasaran

³⁵Sugeng Priyady. 2012. *Metode Penelitian Ilmu Sejarah*. Yogyakarta. Ombak dua. Hlm 2

penelitian sejarah, karena penulisan sejarah dituntut untuk menghasilkan eksplanasi (kejelasan) mengenai signifikansi (arti penting) dan makna peristiwa.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada pada wilayah Kota Baubau yang merupakan wilayah bekas pusat kekuasaan Kesultanan Buton. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan atas beberapa pertimbangan, yaitu: *Pertama*, lokasi merupakan wilayah bekas Pusat Kesultanan Buton ;*Kedua*, selain memiliki keterkaitan sejarah yang kuat dengan kesultanan, lokasi juga masih dihuni masyarakat yang hidup turun temurun sejak jaman kesultanan dan orang-orangnya masih mengetahui sejarah kesultanan dengan baik. *Ketiga*, Tradisi jaman kesultanan masih dilestarikan dengan baik dilingkungan ini.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data adalah bahan, keterangan tentang suatu objek penelitian.³⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk keterangan-keterangan dan uraian-uraian.³⁷ Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu:

³⁶ Burhan Bungin. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press. hlm.123.

³⁷Lot.,cit

- **Data Primer**

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama dalam penelitian sejarah.³⁸ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data heuristik. Data sejarah terdapat pada sumber atau jejak sejarah sehingga data sejarah sama sama dengan teks yang terkandung dalam manuskrip (naskah, buku, document, arsip resmi, dan lain-lain).³⁹

- **Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber data kedua atau sumber sekunder.⁴⁰ Data sekunder dibagi menjadi dua, yaitu data internal dan eksternal. Data internal merupakan data hasil wawancara yang didapat dari sumber data sekunder. Misalnya data yang diperoleh dari pemerintah setempat dan orang yang dituakan dikampung tersebut. Sedangkan data eksternal adalah data yang diperoleh dari sumber luar. Misalnya, data yang didapat dari ilmuan yang ahli dibidang sejarah Buton.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam setiap penelitian, disamping jenis penelitian yang tepat diperlukan pula ketepatan dalam teknik pengumpulan data. Kecermatan dalam memilih dan menyusun teknik pengumpulan data ini sangat berpengaruh pada objektivitas hasil penelitian. Dengan kata lain, teknik pengumpulan data yang tepat dalam suatu

³⁸Kartodirdjo. 1982. *Pemikiran dan Perkembangan Histografi Indonesia, Suatu alternative*. Gramedia. Jakarta. Hlm 96

³⁹*Ibid*, hlm. 100

⁴⁰*Lot., cit*

penelitian akan memungkinkan dicapainya pemecahan masalah secara valid dan reliabel, yang pada gilirannya akan memungkinkan dirumuskannya generalisasi yang objektif.⁴¹ Sehubungan dengan itu, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: metode studi pustaka dokumentasi, dan wawancara

3.4.1 Studi Pustaka

Studi ini dilakukan dengan cara mencari materi-materi bahasan yang sesuai dengan materi penelitian untuk dijadikan dasar dalam melakukan analisis. Studi ini biasanya didapat dari buku-buku literatur.

Selain itu, studi ini juga dilakukan dengan mencari dokumen-dokumen penelitian yang sesuai dengan materi penelitian untuk dijadikan acuan atau gambaran dalam melakukan analisis. "Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada".⁴² Biasanya laporan-laporan yang diambil, selain memiliki kesamaan tentang tema penelitian studi agar ketika dijadikan sebagai bahan acuan dapat segera diketahui dampak-dampak yang akan ditimbulkan.

Beberapa literature studi pustaka yang diambil peneliti yaitu; menelusuri jejak Kota Baubau karya Said, sejarah Buton yang terabaikan karya Susanto Zuhdi, posisi Tasawuf dalam sistem kekuasaan di Kesultanan Buton pada abad ke19 karya Rahim Yunus, masyarakat, sejarah, dan budaya Buton karya Schrool, adat istiadat tanah negeri Buton karya Achadiati Ikram, sumber hukum azas dasar adab dan terakai adat istiadat Wolio Butuni karya Raaziki.

⁴¹*Ibid*, hlm. 94

⁴² Sugioyono, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Roasdakarya. Hlm 32

3.4.2 Metode Dokumentasi

Menurut Robert C. Bogdan seperti yang dikutip oleh Sugiono dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, karya monumental dari seseorang.⁴³ Kaitannya dengan penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data. Data dokumentasi yang peneliti gunakan antara lain foto-foto kegiatan yang telah dilakukan di Kelurahan Melai kompleks benteng keraton Buton. Adapun data dokumentasi yang didapatkan yaitu, Undang-Uundang RI No. 13 tahun 2001 Tentang Pemekaran Kota Baubau Dari Wilayah Kabupaten Buton, Nurhayati 2003 Tesis ; Sistem pemerintahan Kesultanan Buton pada masa Dayanu Ikhsanuddin, Murtabat Tujuh Dayanu Ikhsanuddin karya Tarafu 1996, Kesultanan Buton dalam sejarah dan naskah nusantara karya La Niampe, naskah dan sejarah Kerajaan Buton serta silsilah raja-raja Buton dan Muna karya La Ode Sirajudin Djarudju, naskah sebagai sumber kekayaan dunia ; sebuah deskripsi dari aspek historis karya Saidi.

3.4.3 Metode Wawancara

Wawancara adalah teknik penelitian yang paling sosiologi dari semua teknik-teknik penelitian sosial.⁴⁴ Hal ini dikarenakan wawancara merupakan interaksi verbal antara peneliti dan responden. Wawancara digunakan untuk menghimpun informasi dengan cara memberikan pertanyaan secara lisan kepada para responden. Pengertian lain dari metode wawancara adalah metode yang mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan tugas tertentu mencoba

⁴³ Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta. hlm 329

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 305

mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu.⁴⁵

Dalam kegiatan wawancara, terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya pewawancara, responden, dan materi wawancara.⁴⁶ Dalam penelitian ini, peneliti telah menentukan responden secara sengaja, dimana seluruh responden ini merupakan pihak yang mengetahui dengan baik serta memiliki pengetahuan tentang pemerintahan Kesultanan Buton.

Tabel 3.1
Penentuan Informan Penelitian

NO	Jabatan	Instansi	Informan
1	Staf bagian kesenian dan sejarah	Dinas Pariwisata Kota Baubau	La Ode Asrul. SS. M.A
2	Bidang Perencanaan	Dinas Pariwisata Kota Baubau	Siti Alfiah Mukmin SS,
3	Pengelola Museum Kebudayaan Wolio		Mujazi
4	Guru Besar Universitas Negeri Haluoleo (Kendari) Fakultas Ilmu Budaya	Universitas Negeri Haluoleo (Kendari) Fakultas Ilmu Budaya	Prof.Dr. La Niampe

Sumber : hasil olahan penulis 2014

⁴⁵ Koentjaraningrat. 1983. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia. hlm. 129.

⁴⁶ Burhan Bungin, *op.cit*, hlm. 133

3.5 Penentuan Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *key information* yang memiliki pengetahuan tentang pemerintahan Kesultanan Buton. Di dalam penelitian ini, akan dilakukan wawancara dengan beberapa informan kunci yang telah penulis bagi menjadi tiga yaitu informan kunci, informan ahli, dan informan pendukung. Adapun pengambilan sampel yang digunakan peneliti berupa :

- Pengambilan sampel secara keputusan (*judgemental sampling*) adalah penentuan sampel dan pemilihan masing-masing item sampelnya diambil dengan dasar keputusan yang masuk akal menurut si pengambil sampel. dalam *judgemental sampling*, pengetahuan atau opini dan pengalaman si pengambil sampel digunakan untuk menentukan item-item sampel yang akan dipilih dari populasi.

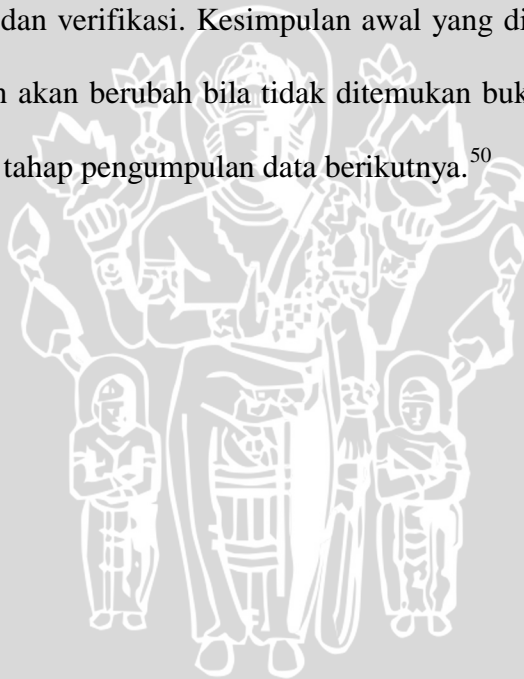
3.6 Teknik Analisis Data

Setelah melakukan tahap pengumpulan data, tahap selanjutnya yang harus dilakukan dalam penelitian adalah tahap analisis data. Terdapat beberapa teknik dalam menganalisis data, salah satunya adalah teknik analisis data menurut Miles and Huberman. Analisis data kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu.⁴⁷ Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif

⁴⁷ Matthew B. Miles & A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). hlm. xxi.

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.⁴⁸

Data reduksi yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan studi. Selanjutnya, penyajian data (*data display*), yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁴⁹ Penyajian data kualitatif yang lazim digunakan adalah dalam bentuk teks naratif. Langkah yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.⁵⁰



⁴⁸ Lot., *cit*

⁴⁹ Agus Salim, *op.cit*, hlm. 22-23

⁵⁰ Sugiyono, *op.cit*, hlm. 252

BAB IV

DESKRIPSI KESULTANAN BUTON

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang deskripsi wilayah penelitian yang mencakup seluruh wilayah Kesultanan Buton, yaitu wilayah administratif. Pada bab ini juga akan menjelaskan perihal kondisi geografis, kondisi demografis, serta struktur dan bentuk pemerintahan.

4.1 Deskripsi Wilayah

4.1.1 Kondisi Geografis Kesultanan Buton

Secara Geografis letak Kesultanan Buton sangat strategis dalam perkembangan pelayaran dan perdagangan di karenakan Kesultanan Buton menjadi jalur pelayaran penghubung barat nusantara menuju timur nusantara. Hal inilah yang menyebabkan Kesultanan Buton dikenal para pedagang dari dalam maupun luar negeri. Bahkan Kesultanan Buton Sempat menjadi rebutan dari dua Kerajaan Besar yaitu Gowa (Sulawesi Selatan) dan Ternate (Maluku Utara) yang mengapitnya serta membuat Gubernur Jendral VOC, ikut berusaha untuk mengambil alih Kesultanan Buton dengan strategi membentuk relasi kerjasama yang setara, dalam bentuk persabatan dan perjanjian diantara kedua belah pihak (Kesultanan Buton dengan VOC Belanda) sejak 5 januari 1613 di masa Sultan Buton keempat.⁵¹

Posisi astronomi wilayah Kesultanan Buton terletak pada 121 40' Bujur Timur dan 124 50' Bujur Timur di ujung Barat Pulau Kabaena dan 124 0' Bujur Timur ujung Timur Veldhoen Eiland serta 4 20' lintang Selatan ujung Utara Pulau

⁵¹Said; *Lot cit*, hlm 20

Buton dan 6 20' Lintang Selatan yang berada di ujung Selatan Pulau Binongko.⁵²

Batas wilayah Kesultanan Buton adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kerajaan Luwu, Laiwui, dan pulau Wawonii yang merupakan daerah pengaruh Kerajaan Ternate,
2. Sebelah Timur berbatasan dengan laut Banda/selat Maluku,
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores, dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Bone.



Gambar 4.1 Lokasi Kesultanan Buton

Sumber : Naskah Kesultanan Buton, Tahun 1850

Pusat pemerintahan Kesultanan Buton bertempat di *Syarana Wolio* lebih tepatnya lagi di Benteng Keraton Buton (Kelurahan Melai). Dalam kotaraja (Benteng Keraton Buton) ini di kelilini oleh Sembilan *limbo* sebagai konsentrasi permukiman penduduk ibu kota. Kesembilan kampung ini adalah; Kampung

⁵² Ligvoet, 1878, *Bescrijving en Geschiedenis Van Boeton*, Belanda. hlm 1-2

Baaluwu, Kampung Kalau, Kampung Paropa, Kampung Gundu-gundu, kampung, Barangkatopa, Kampung Rakia, Kampung Wandailolo, Kampung Gama, dan Kampung Melai. Sedangkan diluar Benteng Keraton Wolio masih termasuk dalam lingkungan wilayah kotaraja berkembang pemukiman, seperti Kampung Baadia dan Kampung Sambali.

Ketika ibu kota Kesultanan Buton masih berada di Benteng Keraton Wolio, kota bawah ini telah dijadikan sebagai daerah pelabuhan yang mendukung ibu kota Kesultanan Buton. Ada tiga pelabuhan di Buton yang berfungsi ssebagai pendukung perkembangan Kesultanan Buton yang menjadikannya sebagai kota Bandar Niaga.

Pertama pelabuhan Batuporo dibagian barat kota, pelabuhan ini sedikit tidak aman dari ombak pantai, sehingga untuk perahu berukuran kecil dan sedang tidak aman untuk berlabuh.

Kedua pelabuhan Kotamara terletak di daerah timur kota yang berada di muara sungai Baubau, pelabuhan ini aman dan terlindung dari bahaya ombak pantai dan dapat menampung perahu layar dalam jumlah yang besar, baik berukuran sedang ataupun besar.

Ketiga pelabuhan Bonesaala yang letaknya sangat strategis terdapat dalam teluk Baubau yang terlindung dari ombak. Pelabuhan ini dalam perkembangan selajutnya menjadi pelabuhan utama dilengkapi dengan berbagai fasilitas memadai, pelabuhan ini berganti nama menjadi pelabuhan besi (*Jambata Ase*)

dan pada abad ke-20 pelabuhan ini lebih dikenal dengan nama Pelabuhan Murhum Baubau.

Geografis Kesultanan Buton terdiri dari kepulauan dan sebagian besar terdiri dari lautan, kondisi daratan yang terdiri atas tanah yang di selimuti oleh bebatuan dan terhamparnya perbukitan diberbagai daerah kesultannya. Oleh karena itu membuat masyarakat Buton lebih banyak memiliki profesi di bidang maritime dari pada kehidupan agraris.⁵³ Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Buton terkenal sebagai pelayar-pelayar ulung yang tidak hanya sebatas di kawasan nusantara, bahkan sampai dikawasan luar nusantara kita. Penduduk Buton termasuk ras deutro Melayu yan penyebarannya bermula dari dataran asia melalui Anam, Tonkin, Indo Cina, Kamboja terus ke Asia Tenggara kepulauan. Ada pula yang menjelaskan bahwa penyebaran penduduk di Sulawesi Tengah, dan tenggara dimulai dari sentral gelombang penyebarannya disekitar Danau Matana di Sulawesi Tengah.⁵⁴

Dapat ditegaskan bahwa Wolio di zaman kesultanan merupakan kota yang cukup ramai oleh karena status dan kedudukan sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat pertemuan dari berbagai kelompok suku-suku bangsa, bahkan disebut pula sebagai kota transit di nusantara, diapit oleh dua kota pusat perdagangan Makassar di sebelah barat dan kota Ternate di sebelah timur. Buton yang berada diantara kedua kota ini menjadi penting artinya sebagai Bandar persinggahan para saudagar dari barat ataupun sebaliknya.⁵⁵

⁵³Said. *Op.cit.* hlm 25

⁵⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan : 1978 *Sejarah Kebangkitan Sultra*, Jakarta hlm 79

⁵⁵ Kesultanan Buton sendiri sejak era kesultanan telah menjadi terminal transit untuk kapal-kapal dari barat yang akan ketimur begitu pula sebaliknya

Alam Buton atau kondisi geografis Buton seperti yang digambarkan oleh J.P Coen dalam Surtnya bahwa Buton merupakan pulau besar yang dikenal dengan kayunya yang diminati banyak orang sebagai bahan pembuatan perahu. Kenyataan ini terungkap dalam kesaksiannya “*Dit Is een groot, ende oock peupuleert landt, hebbende schoon hout daeran men, na wens ende begeerten, vaertuych souden connen maken als men maer volck brochte*”⁵⁶. Geografi Buton menggambarkan bahwa pulau-pulau yang tergabung dalam kekuasaan Kesultanan Buton tidaklah subur, dan sebagian besar daratannya di dominasi bebatuan karang.

4.1.2 Demografi Kesultanan Buton

4.1.2.1 Asal mula Etnis Buton

Berbicara mengenai sejarah etnis Kesultanan Buton, setidaknya harus dimulai sejak berdirinya pemukiman-pemukiman perintis yang menghuni berbagai belahan daratan Buton secara menyeluruh. Munculnya permukiman tersebut tidak dapat dilepaskan dengan kehadiran imigran asal semenanjung Melayu, para imigran ini diketahui dari berbagai tradisi lisan ataupun cerita-cerita turun temurun, dikisahkan bahwa jauh sebelum kerajaan Buton di bentuk, bangsa melayu telah menempati sebagian besar daratan pulau Buton.⁵⁷ Diawali dengan kehadiran *Mia Patamiana*⁵⁸ yaitu empat orang pemimpin rombongan imigran dari johor yang datan kepulau Buton di awal abad ke 14 Masehi.

⁵⁶ Tiele. 1886 dalam buku Zuhdi. 2010. *Sejarah Buton yang terlupakan*. Depok. Rajawali Pers. Hlm 30

⁵⁷ Moersidi. 1988. *Naskah Hikayat Negeri Buton*. Baubau. Hlm 5

⁵⁸ *Mia Patamiana* adalah kelompok orang pertama yang pertama berasal dari johor yang datang di pulau buton

Rombongan pertama dibawah pimpinan Si Panjonga dengan wakilnya Si Jawangkati yang mendarat di Kalampa (Kampung Tobe-tobe) di pantai sebelah barat Pulau Buton. sedangkan kelompok kedua yang dipimpin Si Malui dengan pembantu utamanya Si Tamanajo mendarat dipantai Bumbu sebelah Utara bagian pesisir Pulau Buton. Kedua kelompok ini datang secara terpisah dan tidak saling mengenal. Karena kondisi daratan Buton yang mereka tempati berbatu dan bertanah kritis sehingga tidak mendukung kelangsungan kehidupan masyarakat pada saat itu, secara bertahap kelompok *Mia Patamiana* tersebut mulai pindah dari daerah masing-masing.

Kelompok yang berada disebelah utara daratan Buton berpindah keselatan menempati daerah Warumusio yang merupakan daerah pertanian yang subur dan membuat sementara kelompok tersebut untuk menetap. Sedangkan pada kelompok masyarakat yang bermukim dibagian barat pulau Buton melakukan perpindahan tempat kearah timur dengan menempati wilayah Lelemangura (Wolio saat ini). Tetapi wilayah permukiman dipesisir pantai tersebut seccara perlahan-lahan mulai ditinggalkan penghuninya dikarenakan adanya keganasan perompak dan bajak laut yang selalu mengganggu ketentraman hidup masyarakat setempat. Salah satu solusinya adalah dengan menacari wilayah yang lebih aman, dengan menuju kearah selatan dari perbukitan. Dari perbukitan inilah yang mempertemukan kelompok pertama yang dipimpin oleh Si Panjonga dan Kelompok kedua yang dipimpin Si Malui. Wilayah tempat bertemunya kedua kelompok inilah yang menjadi pusat pemerintahan kerajaan Buton atau lebih dikenal Benteng Keraton Wolio.

Untuk mempererat hubungan antara kedua kelompok yang menghuni lokasi Wolio ini diadakan tali perkawinan antara Si Panjonga dengan adik Si Malui yang bernama Si Baana yang melahirkan keturunan Betoambari. Selanjutnya Betoambari dikawinkan dengan anak Raja Kamaru yaitu Wasigirina yang melahirkan anak Laki-laki bernama Sangiariana. Dengan adanya hubungan perkawinan antara kedua kelompok masyarakat tersebut menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk yang mendiami Wolio pada waktu itu sehingga mendirikan beberapa buah wilayah perkampungan yaitu kampung Baaluwu, Barangkatopa, Wandailolo, Kalau, Peropa, Gundu-gundu, Rakia, dan Gama.⁵⁹

Secara temporal berdasarkan kronologisnya bahwa Kerajaan Buton didirikan pada akhir tahun 1332 oleh dewan yang disebut Patalimbona yaitu gabungan dari 4 penguasa kampung besar yaitu Baalawu, Peropa, Barangkatopa, Gundu-gundu. Betoambari dan Sangiarana diangkat menjadi menteri pertama dalam negeri Buton. selanjutnya kedua menteri ini dikenal sebagai tokoh pendiri krajaan Buton. Mereka mengangkat Raja Buton yang pertama bernama Wa Kaakaa, yaitu anak dari Raja Manyuba asal kerajaan Majapahit. Keturunan kedua menteri tersebut ditetapkan sebagai cikal-bakal keturunan bangsawan Walaka, dan keturunan raja Wa Kaakaa ditetapkan sebagai cikal bakal keturunan golongan bangsawan Kaomu. Keturunannya memerintah secara turun temurun selama kurang lebih tiga abad lamanya hingga raja keenam/terakhir dan sultan pertama Sultan Qaimadin (Raja Murhum). Murhum adalah sultan peralihan dari status kerajaan menjadi kesultanan setelah menjadi pemeluk islam dan menetapkan islam sebagai agama kerajaan.

⁵⁹ Madu.1990 : *Wolio Morikana*, Baubau. Hlm 21

Untuk memulai roda pemerintahan dan pembangunan perkampungan yang permanen secara menetap didirikanlah komunitas masyarakat wolio di keraton. Sementara didalam ibu kota didirikan bangunan Baruga sebagai tempat untuk mengadakan musyawarah baik dari pihak aparat ataupun untuk menerima tamu dan utusan kerajaan kerajaan lain. Begitu juga saat itu didirikan juga rumah pegawai kerajaan, seperti Patalibona, raja, dan pembantu raja, bahkan didalam keraton dibangun pula fasilitas pasar sebagai tempat pertemuan para pembeli dan penjual baran-barang kebutuhan sehari-hari yang diperlukan oleh keluarga.

4.1.2.2 Tipikal Etnis Buton

Suku atau orang Buton mendiami pulau-pulau sekitar Jazirah tenggara Pulau Sulawesi tersebar antara laut Banda laut Flores dan laut Seram. Ada tiga pulau besar yakni ; Pulau Buton, Pulau Muna Dan Pulau Kabaena baik orang Buton maupun orang Kepulauan Tukang Besi keduanya berasal dari Deutro Melayu. Orang Buton terutama yang mendiami bagian pesisir pantai timur dan barat Pulau Buton mempunyai aktifitas dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Bentuk tubuh orang Buton sedikit lebih langsing, berotot dan berwarna kulit sedikit lebih cerah dari kulit orang Melayu atau Jawa mempunyai pembawaan watak yang keras dibandingkan dengan anggota-anggota lain dari rumpun Melayu. Salah satu tipikal etnis Buton agak susah diperintah dan dipengaruhi apabila tidak sesuai dengan pemahamannya, dan sedikit keras kepala apabila ingin di intervensi oleh kekuasaan-kekuasaan luar yang memerintahnya.

Orang Buton terkenal juga sebagai pelaut-pelaut ulung dapat disejajarkan dengan bangsa Viking-Noor, atau orang-orang Bugis Makassar sebagai petualang-

petualang laut yang sangat mengagumkan karena itu pengaruh orang-orang Buton tersebar ke seluruh kepulauan Nusantara, bahkan mencapai Melay, Siam, Cina, dan Australia, jejak-jejak pelayaran dan penjelajahan orang Buton masih dapat ditemukan hingga saat ini. Orang Buton terkenal pula dalam bidang kesastraan, orang Buton mempunyai kegemaran kepada sejarah dan penulisan sejarah. Kegemaran akan sastra tersebut sudah dilakukan sejak abad 17, sebut saja haji Abdul Ganiu, Sultan Dayanu ikshanudin, Sultan Muhammad Idrus, dan lainnya merupakan sastrawan ulung dizamannya, kini kejayaan Buton dalam hal sastra telah pudar dan entah kapan akan Berjaya kembali.⁶⁰

4.1.2.3 Bahasa dan Kekerabatan

4.1.2.3.1 Bahasa

Pada umumnya dalam suatu kerajaan atau kesultanan terdapat berbagai macam bahasa dan memiliki berbagai macam budaya dan seni yang khas, tetapi bahasa tetap merupakan alat pemersatu. Demikian pula yang terjadi di Kesultanan Buton. Dalam wilayah Kesultanan Buton menggunakan bahasa pemersatu dengan bahasa Wolio sebagai bahasa nasional. Disamping Wolio sebagai bahasa nasional, Kesultanan Buton juga memiliki beberapa bahasa yang dipergunakan dalam pergaulan sehari-hari, diantaranya bahasa Muna, Pancana, Suai, Moronene, bahasa daerah kepulauan dan Kamaru. Bahasa Wolio merupakan bahasa resmi yang dipergunakan di wilayah pusat pemerintahan kerajaan, telah digunakan sejak masa kerajaan, kesultanan, dan hingga masa sekarang. Bahasa Wolio masih dipergunakan oleh masyarakat Kota Baubau dan Kabupaten Buton, walupun saat

⁶⁰ Lihat Madu, *Op.cit.* hlm 30

ini bahasa persatuan yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari adalah bahasa Indonesia.

Bahasa Muna dipergunakan oleh sebagian besar masyarakat yang mendiami wilayah pulau Muna. Bahasa Pulau dipergunakan oleh masyarakat Buton timur atau dikenal kepulauan Wakatobi, khusus daerah Binongko menggunakan bahasa ciacia. Bahasa pacana, bahasa ini digunakan didaerah utara dan selatan Pulau Buton seperti daerah, Mawasangka, Lakudo, dan Gu. Bahasa Suai dipergunakan diwilayah Pulau Buton bagian Timur tepatnya daerah Pasarwajo dan Sampolawa. Sedangkan bahasa Moronene dipergunakan di pulau kabaena dan jazirah tenggara pulau Sulawesi.

Setelah masuknya agama Islam, bahasa Arab berkembang dalam Kesultanan Buton bersama dengan berkembangnya kasara Arab Khususnya dalam proses belajar mengajar Al-Quran. Demikian pula pengaruh kebudayaan Islam dan Melayu tampak dalam penulisan aksara Wolio yang berasal dari aksara Arab, kemudian ditulis kedalam bahasa Melayu. Sehingga tampak ciri khas tersendiri termasuk Undang-Undang Murtabat Tujuh ditulis dalam aksara Wolio

4.1.2.3.1 Sistem Kekerabatan

Kekerabatan masyarakat Buton menganut sistem kekerabatan patriaki yaitu garis keturunan ayah, yang terdiri atas keluarga batih dan keluarga luas. Keluarga batih dalam istilah Buton disebut *saitinai* yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anaknya yang hidup dalam satu rumah tangga. Sistem kekerabatan dalam keluarga ini, masing-masing mempunyai tugas dan kewajiban. Seorang ayah wajib memenuhi kebutuhan rumah tangga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan perlindungan keluarga serta kesejahteraan keluarga.

Kewajiban suami terhadap istri adalah memenuhi kebutuhan istri secara lahir batin dan bertanggung jawab atas perkembangan dalam mendidik anak, sedangkan seorang ibu berkewajiban dalam mengurus rumah tangga dan perkembangan anak dalam hal mendidik bersama ayah. Kewajiban seorang istri terhadap suami adalah memenuhi kebutuhan lahir dan batin serta membantu suami dalam melaksanakan tugas.

Hal ini sesuai dengan budaya dalam tradisi Buton. Salah satu ajarannya dapat dilihat apabila suaminya seorang sultan maka istrinya juga adalah sultan. Dalam arti ketika suami sementara melaksanakan tugas keluar daerah, maka kewajiban seorang istri secara batin menggantikan kedudukan suami dengan cara berdoa demi keselamatan suami, masyarakat dan negara. Jadi dapat disimpulkan kesetaraan jender pada daerah Buton sudah terjadi sejak masa Kesultanan. Kewajiban seorang anak adalah membantu kedua orang tuanya dalam hal meringankan beban orang tua, misalnya membantu mengurus rumah, dan lain sebagainya.

Keluarga luas bagi masyarakat Buton disebut "*leena walakana*" atau "*Witinai*" artinya berasal dari satu keturunan samapai dengan tingkat ketiga. Anggota keluarga ini terdiri dari ; *Pinoama* (saudara kandung laki-laki dari pihak ayah atau ibu), *Pinoin* (saudara kandung perempuan dari pihak ayah atau ibu), *Tolida* (anak dari saudara kandung ayah atau ibu), *Topendua* (sepupu duakali), *Topentalu* (sepupu tiga kali), Mania (mertua), *dawo* (ipar). Dalam sistem keluarga kekerabatan Buton dikenal pula istilah *ama awo* dan *ina awo* yaitu ibu tiri dan bapak tiri, kakak tiri disebut *aka awo* dan adik tiri disebut *andi awo*. Demikianlah sistem kekerabatan dalam Kesultanan Buton

4.1.3 Sejarah Masyarakat Buton

Seperi yang telah dikemukakan pada bab I pendahuluan bahwa dalam teks Hikayat Negeri Buton Raja Sipanjonga beserta seluruh keluarga dan rakyatnya pertama kali bermukim di Pantai Kalampa (Kampung Tobe-tobe).⁶¹ Kemudian disusul lagi tiga rombongan bangsa melayu lainnya berasal dari Johor, masing-masing rombongan yang dipimpin Sitamanajo bermukim di Kamaru rombongan Simalui bermukim di Bungi dan rombongan Sijawanghati bermukim di Burangasi.

Keempat pemimpin rombongan tersebutlah yang dikenal dengan nama *Mia Patamiana* (si empat orang). Dua orang dari keturunan/*Mia Patamiana* ini masing-masing Betomabari dan Sangariana diangkat menjadi menteri pertama dalam negeri Buton. Selanjutnya kedua menteri ini dikenal sebagai tokoh pendiri Kerajaan Buton. mereka mengangkat Raja Buton yang pertama bernama Wa Kaka.⁶²

Seiring dengan perkembangan kerajaan Buton terutama dalam bidang perdagangan dan pelayaran, Islam kemudian masuk ke Buton pada akhir abad ke-15 M dibawa oleh seorang pedagang yang berasal dari Gujarat. Selama masa pra Islam, di Buton telah berkuasa enam orang raja, dua diantaranya adalah wanita (Wa Kaa kaa dan Bulawambona).

Pada awal abad ke-16 M seorang ulama yaitu Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman Al-Fathani mulai menyebarkan agama Islam di Buton. Beliau

⁶¹ Niampe. 2009. *Kesultanan Buton Dalam Sejarah Dan Naskah Nusantara*. Kendari. Hlm 2

⁶² Niampe. *Lot.cit.* hlm 3. Dikisahkan bahwa Kerajaan Buton pertama dipimpin oleh seorang raja perempuan (ratu) yang berasal dari bambu (cerita Wa Kaka dalam berbagai versi, akan di bahas peneliti di Bab V)

merupakan salah seorang yang paling berjasa dalam perkembangan penyebaran Islam di Buton. Menurut beberapa riwayat bahwa Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman al-Fathani berasal dari Gujarat, sebelum sampai di Buton beliau pernah tinggal di Johor, selanjutnya bersama isterinya pindah ke Adonara (Nusa Tenggara Timur), kemudian beliau sekeluarga berhijrah ke Pulau Batu atas yang termasuk dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Buton.

Di pulau tersebut Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman al-Fathani bertemu Imam Pasai yang sedang dalam perjalanan kembali dari Maluku menuju Pasai (Aceh). Imam Pasai menganjurkan Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman al-Fathani pergi ke Pulau Buton untuk menghadap Raja Buton. Syeikh Abdul Wahid setuju dengan anjuran tersebut, lalu beliau datang menemui Raja Buton yang sedang memerintah saat itu yaitu Raja Mulae (Raja Buton ke-5) dan mendapat sambutan baik dari Raja dan masyarakat Buton. Beliau lalu mulai menyebarkan ajaran Islam kepada seluruh masyarakat Buton yang pada saat itu mayoritas masih memeluk kepercayaan Hindu dan animisme. Namun disebutkan bahwa Raja Mulae wafat sebelum memeluk agama Islam. Beliau kemudian digantikan oleh Raja Halu Oleo atau dikenal pula dengan sebutan Raja Murhum.⁶³

Pada saat Raja Murhum mulai memerintah Kerajaan Buton sebagai raja Buton ke 6 atau Sultan Buton yang pertama. Kerajaan Buton resmi menjadi sebuah Kesultanan pada saat dilantiknya Raja Murhum menjadi Sultan Buton yang pertama pada tahun 1511 M, pengangkatannya sebagai Sultan mendapat

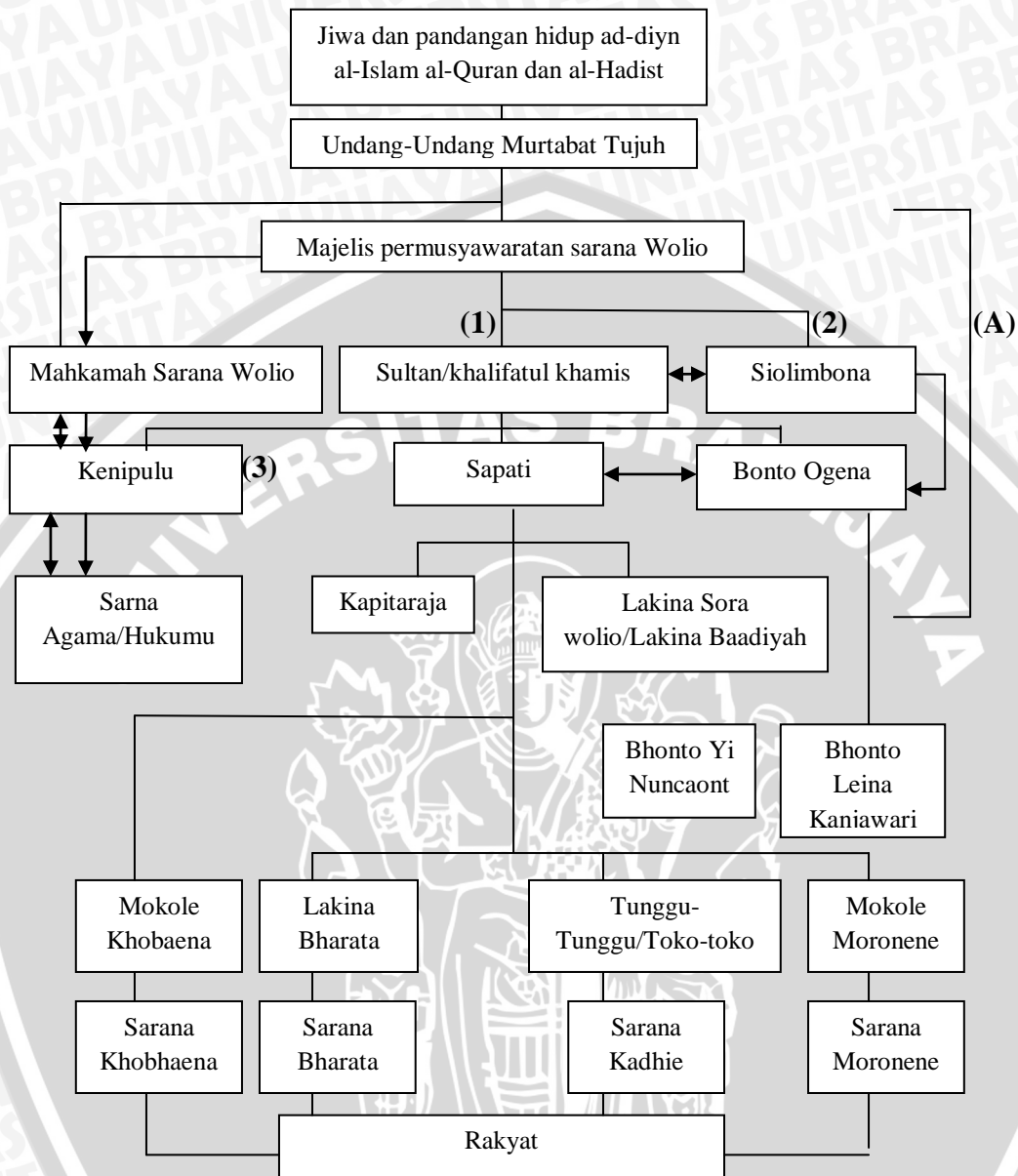
⁶³Lihat, Nurhayati. *Op.cit*, hlm 58

persetujuan langsung dari Kekhalifahan Ustmaniah. Setelah dilantik beliau memiliki gelar Sultan Kaimuddin Khalifatul Kamis.⁶⁴



⁶⁴Ibid.

Struktur Pemerintaha Murtabat Tujuh



Gambar : 4.2

Sumber : Olahan penulis dari berbagai sumber, tahun 2015

Keterangan :

- : Hubungan Komando
- : Hubungan Kerjasama/Konsultasi
- ↔ : Hubungan Koordinasi

(1) : Eksekutif

(2) : Legislatif

(3) : Yudikatif

(A) : Pemerintah Pusat

(B) : Pemerintah Daerah

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

Dalam bab ini akan membahas sistem pemerintahan Kesultanan Buton dari masa kerajaan hingga masa kesultanan pada sub bab ini juga peneliti akan menjelaskan unsur-unsur demokrasi yang terkandung dalam teori demokrasi Robert Dahl dari partisipasi politik, persamaan suara, pemahaman mengenai pemerintahan yang sama, pengawasan agenda hingga pencakupan orang dewasa yang dipadukan dengan kultur Kesultanan Buton.

5.1.1 Bentuk Pemerintahan di Kesultanan Buton

Dari hasil penelitian berupa bukti literatur dan wawancara bahwa praktik Pemerintahan Kesultanan Buton berubah-ubah dari zaman Pra-kerajaan Buton, kerajaan, dan kesultanan dari model aristokrasi, monarki absolute, monarki konstitusional, hingga adanya unsur demokrasi di Buton.

5.1.1.1 Sistem Pemerintahan di Masa Kerajaan

Kisah Putri Wa kaka (Raja Buton Pertama) dalam berbagai versi, versi pertama diriwayatkan bahwa Raja Wa Kaka ditemukan dari dalam bambu di atas perbukitan Rahantula (lelemangura) yang kemudian diberi julukan *mobetana yitombula*⁶⁵, Wa Kaka kemudian dipikul dipayungi, diiringi gong dan gendang lalu diarak menuju rumah Betoambari (Bontono Peropa). Selanjutnya Wa Kaka diangkat oleh Betomabari sebagai anaknya. Setelah melalui musyawarah antara

⁶⁵*mobetana yitombula* istilah dalam bahasa Buton yang berarti gadis yang muncul dari dalam bambu

betoambari dan para Bonto Patalimbona maka putri Wa Kaka dinobatkan menjadi raja Wolio pertama, oleh Betoambari yang didampingi oleh Bonto lainnya.⁶⁶

Versi Kedua mengatakan bahwa putri Wa Kaka berasal dari China putri dari Raja Khubhilaikan yang beribukan Putri Ratnakesari putri dari Jayakatwang. Diriwayatkan bahwa Putri Ratnakesari ditawan oleh tentara tar-tar yang pernah menyerbu Kerajaan Jawa untuk menghukum Kertanegara, konon ketika tentara Tar-tar tiba di Kerajaan Singosari, Kertanegara telah dibunuh oleh Jayatwang.⁶⁷ Dengan kepandayan Radenwijaya untuk mengantisipasi tentara tar-tar dan ingin membalas kematian mertuanya yang dibunuh oleh Jayatkatwang, Raden Wijaya bekerja sama dengan tentara Tar-tar untuk melawan Jayakatwang. Dengan perjanjian jika mereka menang dan Jayakatwang berhasil ditundukan maka sebagai imbalannya Raden Wijaya akan menyerahkan seorang putri dari Tumapel. Sehingga pada tanggal 19 maret 1294 Jayakatwang berhasil dilumpuhkan.

Lumpuhnya kerajaan Kediri tidak membuat Raden Wijaya puas malah dengan taktik bulusnya Raden Wijaya berbalik menyerang tentara Tar-tar. Panglima yang selamat dari Raden Wijaya, pulang kenegerinya dengan membawa harta rampasan dan Putri Jayakatwang sebagai tawanan perang. Menurut kebiasaan, semua persembahan putri-putri dari negara-negara jajahannya dikaini oleh Khubnilaikan. Ketika Khubnilaikan meninggal dunia dan Dinasti Yuan mengalami kekalahan, maka semua orang-orang tawanan dinasti Yuan yang berasal dari nusantara diusir dan kembali kenegaranya, Ratnakesari kembali ke nusantara. Tetapi beliau khawatir untuk tinggal di Jawa pada Kerajaan Majapahit

⁶⁶Yunus. 2009. *Kumpulan naskah buton dan naskah dunia*. Baubau. Hlm 34 dalam buku ini ada yang mngisahkan putrid wa kaka dalam beberapa versi dan akan peneliti bahas di bab ini

⁶⁷Notosusanto. 1977. *Lihat sejarah nasional Indonesia*, Jakarta. Hlm 34

yang sudah dibentuk oleh Raden Wijaya, sehingga Ratnakesari beserta pengikutnya mencari tempat yang aman dan terdamparlah mereka di tanah Buton. Demikianlah riwayat Wa Kaka di pulau Buton, yang diperkirakan pada saat itu Putri Wa Kaka berusia kurang lebih 40 tahun.

Dari kedua versi di atas yang dapat dipertanggungjawabkan adalah versi kedua. Erisi pertama secara historis tidak dapat dipertanggungjawabkan karena secara logika tidak ada manusia yang lahir dari batang bambu atau sejenisnya, tetapi manusia terlahir dari rahim seorang ibu. Adapun sumber lain yang menceritakan kisah Wa Kaka versi kedua yang berlanjut ketika armada wa kha kha tiba di pulau Buton dan ditemukan oleh Betoambari. Ketika itu Betoambari langsung bertanya kepada Wa Kaka, “tuan putri dari mana” ia tidak menjawab, ia hanya membisu karena tidak memahami arti pertanyaan yang ditujukan kepadanya. Tiga kali Betoambari bertanya padanya dengan pertanyaan yang sama, barulah ia menjawab dengan kata *wo-ling* (bahasa Cina) yang artinya saya akan tinggal.⁶⁸ Dari hasil tanah penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa putri Wa Kaka berasal dari negeri Tirai Bambu dan ibunya bernama Ratnakesari yang berasal dari tanah Jawa.

Selanjutnya ketika Wa Kaka ditanya dan diterima oleh Betoambari dan Bonto lainnya serta mengadakan pengawasan dan penyidikan asal usul dan latar belakang terhadap Wa Kaka maka sepatutnya keempat Bonto tersebut untuk mengangkat Wa Kaka sebagai Raja Buton pertama yang telah lama dinantikan. Namun dalam proses pengangkatan Wa Kaka sebagai raja tidak semulus yang dibayangkan, hal ini disebabkan karena muncul pertanyaan dan permasalahan

⁶⁸ Madu. *Op;cit* . hlm 31

dikalangan masyarakat Buton. Bahwa mengapa harus orang asing dan orang yang baru datang di negeri Buton yang harus menjadi Raja mereka.

Untuk mencari solusi dalam permasalahan ini dengan bijak dan hormat Wa Kaka diangkat sebagai anak dari keempat Bonto tersebut. sehingga dengan solusi yang sangat terhormat dan bijaksana yang diambil oleh para Bonto tersebut proses pelantikan Wa Kaka sebagai Raja Buton berjalan dengan aman dan tertib. Raja Wa Kaka dilantik pada tahun 1332. Demikianlah kebijakan politik yang di terapkan secara bijaksana penuh rasa tanggung jawab dan tenggang rasa yang begitu tinggi yang telah dilaksanakan para leluhur tanah Buton pada saat itu. Setelah dilantiknya Wa Kaka sebagai Raja Buton pertama resmilah Buton menjadi satu negara kerajaan yang berdaulat.

Setelah Kerajaan Majapahit berdiri lebih kurang abad 13 muncul gagasan politik untuk mempersatukan wilayah nusantara kedalam kekuasaan Majapahit. Untuk itu diutuslah diplomatik-diplomatik Majapahit keseluruh wilayah Nusantara, untuk dikerajaan Buton sendiri Majapahit mengutus Sibatara sebagai utusannya. Namun ketika tiba di Buton ternyata Buton sudah mempunyai seorang raja. Terjadilah pertemuan diplomasi antara kerajaan Buton dengan kelompok Sibatara yang salah satu inti dari pertemuan itu adalah mengajak Kerajaan Buton untuk mengakui kekuasaan Majapahit atau menolaknya berarti pernyataan perang.

Untuk mengantisipasi hal ini Putri Wa Kaka beserta penasehat dan petinggi Kerajaan Buton mengadakan musyawarah untuk memutuskan solusi apa yang terbaik untuk kedua belah pihak. Dari hasil musyawarah tersebut menghasilkan satu keputusan politik yang sangat beradab dan terhormat yaitu menikahkan Putri Wa Kaka dengan Sibatara. Kebijakan politik yang ditempuh

oleh kedua belah pihak tersebut membuahkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Terjalinlah persabatan dan kekeluargaan yang harmonis diantara kedua belah pihak.

Disebutkan bahwa pernikahan Wa Kaka dengan Sibatara dikaruniai 7 orang putrid, yang tertua bernama Bulawambona karena suatu sebab Wa Kaka bersama semua anak dan istrinya pulang ke Jawa (Majapahit) kecuali Bulawambona. Demi melanjutkan tahta kerajaan. Bulawambona kemudian menggantikan ibunya sebagai raja kedua Buton (1340-1411). Bulawambona menikah dengan La Baluwu putra Dungkacangia. Dari pernikahan ini Bulawambona dikarunia 9 orang anak yang di antaranya Bataraguru yang kemudian menggantikan ibunya sebagai raja ketiga (1411-1460) sedangkan saudara-saudaranya menduduki jabatan Bonto. Raja ke empat adalah Tuarade (1460-1511) beliau adalah putra dari Bataraguru tuarade tidak mempunyai keturunan, sehingga digantikan oleh pinakannya bernama Mulae yang menjadi raja ke lima (1511-1518). Raja ke enam adalah menantu Mulae bernama Laki Laponto atau lebih dikenal dengan nama Murhum, (1518-1538) yang sekaligus menjadi Sultan pertama di tanah Buton.⁶⁹

Deskripsi wacana di atas memaparkan bahwa sistem pemerintahan dimasa Kerajaan Buton berbentuk Monarki karena dikuasai oleh dinasti Wa Kaka yang secara turun temurun berkuasa di Kerajaan Buton. Pada masa kerajaan ini pula dari raja pertama hingga raja ke 5 tidak ditemukan tanda-tanda pengaruh islam bahkan yang tampak adalah pengaruh kebudayaan Hindu yang salah satunya terdapat pada nama-nama raja. Disamping itu dalam aspek keyakinan juga

⁶⁹Yunus. *Op.cit.* hlm 55

dijumpai faham “reinkarnasi”.⁷⁰ Paham ini hingga saat ini masih diyakini oleh masyarakat Buton, prakteknya dapat di lihat pada saat kelahiran. Anak yang lahir mirip dengan anak yang telah meninggal maka anak itu dikatakan sebagai roh dari saudaranya tersebut. Keyakinan ini diprediksi sebagai salah satu pengaruh budaya Hindu.

Dalam masa kerajaan Buton menggunakan bentuk pemerintahan Monarki hal ini terlihat dalam pergantian raja secara turun temurun, yaitu seorang raja yang mangkat atau mengundurkan diri diganti oleh anaknya dan bagi raja yang tidak mempunyai keturunan akan digantikan oleh keponakan, yang telah dijadikan anak angkat.

Struktur Pemerintahan dimasa Kerajaan Buton pertama Wa Kaka:

1. Raja
2. Majelis sara juga sebagai menteri koordinator yang beranggotakan Mia Patamiana, bertugas mengkoordinir tiap-tiap kelompok dalam limbonya.
3. Pemimpin tinggi angkatan perang, juga bertugas sebagai duta dalam hubungan luar negeri. pada masa kerajaan jabatan ini pertama kali dijabat oleh Sibatara dan sekaligus sebagai penasihat raja.
4. Menteri khusus daerah seberang dan perluasan wilayah menteri ini juga menjabat sebagai komando pasukan khusus pengawal istana dipimpin oleh Kaudoro dan Sangiariana.

Pada masa pemerintahan Bataraguru struktur pemerintahan kerajaan bertambah yaitu dengan adanya jabatan baru seorang Sapati yang bertugas membantu raja dalam pelaksanaan pemerintahan di pusat kerajaan dimasa modern

⁷⁰ Schoorl. *Op:cit* hlm 124, dalam buku tersebut di temukan adanya pengaruh kepercayaan Hindu dalam Kerajaan Buton di masa lampau terlihat dari adanya kepercayaan terhadap reinkarnasi.

sering dikenal dengan perdana menteri. Pada masa pemerintahan Raja Tuarade juga terjadi penambahan jabatan yaitu jabatan kanepulu yang fungsinya membantu Sapati/ wakil dari sapati. Hal ini disebabkan makin komplitnya permasalahan pemerintahan karena bertambahnya wilayah kerajaan Buton.⁷¹

Bentuk pemerintahan monarki berlangsung kurang lebih dua setengah abad lamanya dan baru berakhir setelah Buton menerima ajaran islam sebagai agama kerajaan. Perlu dijelaskan bawa sebelum bentuk pemerintahan monarki pemerintahan Buton dimasa sebelum kerajaan masih berbentuk aristokrasi. Pemerintahan kerajan berakhir setelah raja ke enam Lakinaponto memeluk agama islam dan berganti menjadi Sultan Buton pertama.

5.1.1.2 Sistem Pemerintahan di Masa Sultan Pertama hingga Sultan ke Tiga

Islam diterima sebagai agama kerajaan Buton pada maasa pemerintahan raja ke enam (Lakinaponto) pada tahun 948 Hijriah atau lebih kurang 1538 M. setelah memeluk islam Lakinaponto dilantik menjadi sultan dengan gelar Qa'im ad-din, (138-1584) yang ketika beliau dilantik menjadi Sultan lebih dikenal dengan nama Murhum. Menurut riwayatnya bahwa pada masa raja Buton lakilaponto. Datanglah Syekh Abd Wahid bersama istrinya Waode Solo dan anaknya, ledi penghulu, ia dianggap orang keramat turunan Sayyid Mekah, cucu nabi Muhammad. Atas ajakan Laki Laponto bersama menetrinya memeluk islam yaitu pada hari senin, 1 Ramadhan 948 H. Laki Laponto di lantik menjadi sultan oleh Syekh dengan nama kehormatan Qa'im ad-din al Khalifah al-khamis.⁷²

Sejak itu nama Sultan dipuja dalam khotbah jumat atas tanggungan Syekh itu, dan Syeikh itu pula yang akan mengirim kabar kepada Sultan Rum di Turki.

⁷¹ Hambali. 1990. *Sistem Pemerintahan Kesultanan Buton "Ketatanegaraan"*. Skripsi. Hlm 55

⁷² Zahari. 1977. *Sejarah dan adat fiy darul butuni jilid, I,ii,iii*. Jakarta. Depdikbud. Hlm 10

Menurut sumber di Buton Abd Wahid memang sengaja datang ke Buton untuk mengislamkan daerah ini atas perintah gurunya Syeikh Ibnu Batutah yang pernah mampir ke Buton sekembali dari Ternate menuju Jawa. Masa pemerintahan Sultan Murhum merupakan masa transisi dari sistem pemerintahan kerajaan ke sistem pemerintahan kesultanan.

Beralihnya sistem pemerintahan dari kerajaan ke kesultanan, mempengaruhi pola kehidupan sosial budaya masyarakat. Perubahan ini dapat dilihat pada falsafah hidup masyarakat Buton setelah memeluk agama islam yaitu “binci binciki kuli”. Falsafah ini mengandung makna kita sebagai sesama manusia harus mempunyai empati yang tinggi (jika anda merasa sakit dan di hina orang begitu pula perasaan orang ketika anda menghina). Di era transisi pengaruh antara kerajaan ke kesultanan ajaran islam boleh dikatakan dalam tahap sosialisasi ajaran islam diseluruh wilayah kekuasaannya. Pengaruh budaya islam yang lain dapat dilihat pula pada falsafah perjuangan masyarakat Buton yaitu “biar hancur harta, negara, dan pemerintah asalkan agama selamat”.⁷³

Di bidang politik telah terjadi pula perubahan tata cara pemilihan pejabat mulai dari sultan pertama sampai sultan ketiga yakni : Lakinaponto (153-184) Latumparasi (1584-1591) dan masa pemerintahan sultan ketiga Lasangaji (1591-1597) perkembangan islam belum begitu menonjol.⁷⁴ Dan dimasa pemerintahan sultan pertama hingga ketiga masih menggunakan sistem monarki absolute dikarenakan dalam pemilihan Sultannya masih mewariskan putra mahkota yang saling turun temurun. Tata pemilihan sultannya pun tetap menggunakan tradisi

⁷³Falsafah dalam hikayat Negeri Buton yang tertuang juga dalam Murtabat Tujuh

⁷⁴Lihat pada Dokument DPRD Sultra 1977-1982 hlm. 187

yang diturunkan dimasa Kerajaan, dan ajaran Konstitusi Kesultanan Buton (Murtabat Tujuh) belum terbentuk.

5.1.1.3 Sistem Pemerintahan Kesultanan Buton di Masa Sultan ke-4 Hingga ke-38

Pengaruh islam yang lebih jauh dapat di jumpai setelah kesultanan ini memasuki abad ke 16. Yakni pada masa pemerintahan Sultan Dayanu Ikhasunddin yang pada masa pemerintahannya membuat dan memberlakukan undang-undang kesultanan yang disebut dengan Martabat Tujuh versi Kesultanan Buton. Disebut demikian karena berisi ajaran “Martabat Tujuh”, suatu ajaran yang dikenal dalam dunia Tasawuf.⁷⁵ Sultan Dayanu Ikhsanuddin adalah sultan ke 4 dan dimasa pemerintahannya merupakan awal masa pencerahan bagi Kesultanan Buton. Prinsip-prinsip kehidupan berdemokrasi yang bertaktub dalam undang-undang martabat tujuh yang mengatur tentang seluruh nadi kehidupan masyarakat Buton, baik kehidupan pemerintahan maupun masyarakat. Pada masa pemerintahan Sultan ke-4 tersebutlah penegasan undang-undang mengenai pengangkatan seorang sultan tidak lagi berdasarkan keturunan atau dikenal dengan nama putra mahkota. Perubahan-perubahan fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan di masa Sultan Dayanu Ikhsanuddin antara lain;

- 1) Dibuatnya konstitusi tertulis Kesultanan Buton yang dikenal dengan nama Undang-undang Murtabat Tujuh versi Buton yang kental dengan ajaran Islam.
- 2) Mengadakan perbaikan dan penambahan struktur pemerintahan kesultanan dengan menghapus jabatan Tunggu Weti (pemungut pajak). Jabatan ini dihapus karena sistemnya terbukti rawan dengan kemungkinan-kemungkinan penyimpangan seperti korupsi. Sebagai penggantinya diadakan jabatan baru yang disebut Bonto Ogena (pejabat tinggi

⁷⁵ Lihat Yunus, 1995. *Posisi Tasawuf dalam Sistem Kekuasaan di Kesultanan Buton pada abad ke-19*. Jakarta. Depdikbud. hlm 52

kesultanan dibidang perpajakan). Pergantian tunggu weti disamping sudah tidak sesuai jaman, juga untuk menegakkan hokum adat terutama yang menyangkut keuangan Negara. Untuk kelengkapan, kelancaran aktifitas pemerintahan kesultanan maka Dayanu Ikhsanuddin mengadakan pula jabatan juru tulis. Selain itu demi keamanan negara Kesultanan Sultan membuat kebijakan dalam pengadaa Kapitalao(menteri pertahanan). Hal ini sangat relean dengan letak gografis daerah Buton yang dikelilingi laut dan merupakan daerah transit. Kebijakan ini sangat cermat mengingat daerah transit adalah daerah yang rawan gangguan dari luar.

- 3) Dengan diberlakukan Konstitusi Kesultanan Buton (Undang-undang Murtabat Tujuh) supremasi hokum berjalan dengan baik. Sebagai contoh dari 38 sultan yang berkuasa, terdapat satu Sultan yang dihukum mati, karena dianggap melanggar Undang-undang yang berlaku.
- 4) Pada tanggal 5 Januari 1613 Kesultanan Buton mengadakan kerja sama dalam bentuk perjanjian persabatan dengan pihak luar yang diwakili oleh Komandeur Appolonius Sehat atas nama Kompeni Belanda dan Kesultanan Buton sendiri diwakili oleh Sultan Dayanu ikhsanuddin perjanjian ini lebih dikenal dengan istilah janji Baana (janji pertama). Isi perjanjian kerja sama tersebut antara lain:

Pihak kompeni berjanji

- a. Memberikan bantuan dan perlindungan kepada Kesultanan Buton baik bantuan dan perlindungan yang datang dari luar maupun dari dalam Kesultanan Buton itu sendiri. Untuk mempertegas perlindungan kepada Kesultanan Buton pihak kompeni member 4 buah meriam lengkap dengan peluru dan mesinnya.
- b. Menghormati agama dan kepercayaan masyarakat Buton dalam menjalankan kepercayaannya (toleran).
- c. Melalui kompeni, kepada Sultan Ternate dan orang-orang besar Kerajaan Ternate dimintakan perhatiannya supaya memberikan peringatan kepada orang-orangnya yang datang ke Buton dalam urusan kerajaan hendaknya tidak mempersulit keadaan urusannya dan supaya kepada setiap putusan diberikan surat keterangan yang jelas disertai dengan cap kerajaan resmi.
- d. Pemasukan uang logam oleh kompeni yang berlaku di dalam Kesultanan Buton sebagai mata uang sama nilainya dengan uang Kesultanan Buton.

Pihak Kesultanan Buton;

- a. Memerangi musuh kerajaan Ternate dan musuh kompeni
- b. Memberikan tentara bantuan kepada kompeni, bila berangkat ke Solor

- c. Pengawasan penetapan harga atas kebutuhan bahan pokok hari-hari agar tetap dipegang teguh
- d. Tidak mengadakan hubungan perdagangan dengan kerajaan lain selain kompeni
- e. Orang Belanda diberi kebebasan berddagang dalam kerajaan Buton dengan bebas bea/pajak
- f. Menerima pemasukan beras terutama dari Maluku
- g. Tentara kompeni dapat mengawini wanita Buton yang masih lajang
- h. Pembelian budak oleh kompeni dengan ketentuan bahwa pelarian budak dari salah satu pihak harus dikembalikan kepada pemiliknya.
- i. Kontrak perjanjian ini juga dimaksudkan dengan perdamaian dan persahabatan dengan Banda, kecuali jika terjadi peperangan antara kompeni dengan Banda, maka semua orang Buton yang tinggal dibanda di panggil pulang.

Dari perubahan-perubahan fundamental tersebut, terbentuknya konstitusi undang-undang Murtabat Tujuh menjadi fondasi perubahan yang mendasar dalam struktur pemerintahan, hukum, maupun adat istiadat masyarakat Buton. semasa di terapkannya undang-undang tersbut Sultan dalam menjalankan tugasnya selalu menganjurkan serta menegaskan pada masyarakatnya maupun pemerintahannya agar bertindak berdasarkan norma dan petunjuk yang jelas, sesuai dalam undang-undang Murtabat Tujuh bukan lagi berdasarkan inisiasi perorangan ataupun kelompok.⁷⁶

Kebijakannya selalu di jiwai dengan nafas keislaman yang baik itu kebijakan yang menyadarkan bahwa ada keterkaitan dengan politik, sosial budaya, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan. Dalam memutuskan sesuatu, sultan selalu menekankan agar melalui proses musyawarah mufakat atau dalam ajaran islam lebih dikenal dengan nama Syura. Kepimimpinan Sultan ke-4 selalu mempraktekkan nilai-nilai keadilan, ekualitas, kebebasan, penegakan

⁷⁶Zahari. *Op,cit.* hlm 14

hukun, jaminan kesejahteraan bagi semua warga serta perlindungan terhadap kaum minoritas. Pada prinsipnya menyadari yang di pimpinnya bahwa semua manusia sama.

Dalam ajaran Islam ditegaskan bahwa, pada dasarnya manusia memiliki nilai kemanusiaan yang sama, tidak ada yang lebih mulia dari yang lain yang membedakan mereka adalah ketakwaannya terhadap allah swt, yakni bertanggung jawab menjalankan kewajiban pada Allah dan sesama manusia.⁷⁷ Dalam penyusunan undang-undang Murbatat Tujuh, Dayanu Ikhsanuddin mendapat bantuan dana sehat dalam bidang agama dari Syeikh Said Muhammad seorang berkebangsaan Arab. Sultan ke-4 dalam masa pemerintahannya mengadakan reformasi yang progresif. Secara hirarki sistem perundang-undangan di Kesultanan Buton, pada masa Sultan ke-4 tersusun sebagai berikut :

- a. Syara, yakni Undang-undang dasar atau Murtabat Tujuh
- b. Tukuraka peraturan pemerintah Kesutanan
- c. Pitara pedoman dalam mengadili atau memutuskan suatu perkara
- d. Gau masalah-masalah yang berhubungan dengan politik

Berdasarkan hirarki sistim perundang-undangan tersebut, undang-undang Murtabat Tujuh menempati posisi teratas.⁷⁸ Dimasa pemerintahannya Sultan ke-4 telah membentuk sistem pemeritahan yang modern pada masanya dan struktur pemerintahannya sebagai berikut :

- a. Sultan sebagai kepala pemerintahan
- b. Sapati sebagai perdana menteri
- c. Sio Limbona sebagai Legislatif atau saat ini biasa di sebut DPR

⁷⁷ tertuang dalam Al-Quran, Surah Q.S almujarad 13

⁷⁸ Saidi. 2001. *Studi Sosiologi Kultural Dan Historis Tentang Dasar-Dasar Adat Dan Budaya Masyarakat Buton*. Bau-bau. Hasil penelitian Inventarisasi adat dan budaya masyarakat Buton. hlm 56

- d. Kenepulu sebagai sekretaris negara merangkap hakim agung
- e. Kapitalao menteri pertahanan
- f. Bonto Ogena terbagi menjadi dua, Bonto Ogena matanaeo dan Bonto Ogena Sunaao (pejabat tinggi negara yang memiliki multi tugas) lima jabatan diatas biasa disebut Pangka (cabinet/menteri)
- g. Bonto Inunca
- h. Bonto Bonto lancina kanjawari
- i. Bobato
- j. Juru bahasa
- k. Sabandara
- l. Tolombo
- m. Pangalasa

Struktur pemerintahan dalam bidang agama yaitu; Lakina Agama, Imam, Khatib, Moji, Mokimu, dan Bisa. Implementasi sistem pemerintahan Undang-undang Murtabat Tujuh menjalankan praktek kepemimpinan Islam, menjadi fondasi dan suri tauladan pada masa pemerintahan Sultan-sultan berikutnya. Murtabat Tujuh menjadi tonggak perubahan yang mendasar dalam struktur pemerintahan, hukum maupun adat istiadat masyarakat Buton. Buton sebagai negara kesultanan hingga abad ke 19 telah dipimpin oleh 38, sultan masing-masing sebagai berikut:

1. Sultan Murhum (1538-1584)
2. Sultan La Tumparasi (1584-1591)
3. Sultan La Sangaji (1591-1597)
4. Sultan La elangi (1597-1631)
5. Sultan La Balowo (1631-1632)
6. Sultan La Buke (1632-1645)
7. Sultan La Saparagau (1645-1647)
8. Sultan La Cila (1647-1654)
9. Sultan La Awu (1654-1664)
10. Sultan La Simbata (1664-1669)
11. Sultan La Tangkaraja (1669-1680)

12. Sultan La Umpamana (1680-1683)
13. Sultan La Umati (1688-1695)
14. Sultan La Dini (1695-1702)
15. Sultan La Rabaenga (1702-1702)
16. Sultan La Sadaha (1702-1709)
17. Sultan La Ibi (1709-1711)
18. Sultan La Tumparasi (1711-1712)
19. Sultan Langkariri (1712-1750)
20. Sultan La Karambau (1750-1752)
21. Sultan La Hamim (1752-1759)
22. Sultan La Seha (1759-1760)
23. Sultan La Karambau (1760-1763)
24. Sultan La Jampi (1763-1788)
25. Sultan La Masalalamu (1788-1791)
26. Sultan La Kopuru (1791-1799)
27. Sultan La Badaru (1799-1823)
28. Sultan La Dani (1823-1824)
29. Sultan Muh. Idrus (1824-1851)
30. Sultan Muh Isa (1851-1871)
31. Sultan Muh. Salihi (1871-1886)
32. Sultan Muh. Umar (1886-1905)
33. Sultan Muh Asikin (1906-1911)
34. Sultan Muh. Husain (1912-1914)
35. Sultan Muh. Ali (1914-1918)
36. Sultan Muh. Saifu (1922-1924)
37. Sultan Muh Hamidi (1928-1937)
38. Sultan Muh. Falihi (1937-1960)



Gambar 5.1

Sultan Buton Terakhir Muh. Falihi bersama Presiden Ir. Soekarno, membahas penggabungan Kesultanan Buton ke wilayah NKRI .1959

Sumber : Arsip Nasional, Tahun 1960

Perkembangan politik sesudah pemerintahan Sultan ke-4 sampai Sultan ke-38 tidak menunjukkan perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan pemerintahannya. Ini disebabkan karena keseluruhan Sultan yang menjabat sesudahnya dalam menjalankan roda pemerintahan dan bermasyarakat masih menggunakan konstitusi Murtabat Tujuh sebagai pedoman hidup baik dalam kehidupan pemerintahan ataupun dalam bermasyarakat. Adapun perubahan jumlah daerah dan penambahan pejabat disesuaikan dengan tuntutan jaman demi tetap dan mempertahankan persatuan dan kesatuan di negeri Buton.

Pada masa kolonialisme, Kesultanan Buton mengalami masa kekejaman dan intimidasi-intimidasi yang dilakukan oleh kolonialisme Belanda. Belanda melakukan politik adu domba dalam melancarkan serangannya pada pihak kesultanan yang tidak lain bertujuan ingin menguasai negeri Buton sebagai negara jajahannya. Namun demikian karena telah tertanam ajaran-ajaran murtabat Tujuh, masyarakat Buton tetap gigih dan solid mempertahankan norma-norma yang telah

ada sehingga dengan pengaruh apapun Murtabat Tujuh tetap dipegang teguh oleh masyarakat Buton maupun pemerintah kesultanan pada masanya. Sementara itu, proses perjalanan sejarah Buton pun tidak luput dari perubahan-perubahan. Buton sebagai negara kesultanan berakhir setelah Buton masuk sebagai salah satu bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia.

5.2. Praktek Demokrasi Pada Kesultanan Buton

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap negara memiliki bentuk dan sistem pemerintahan yang sistemnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan negara. Demikian halnya dengan Negara Kesultanan Buton, bentuk dan sistem pemerintahannya berpedoman pada Murtabat Tujuh Sara Wolio yang di dalam praktik pemerintahannya terdapat unsur demokrasi. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Sultan yang dipilih oleh lembaga *Siolimbona* (legislative).

Sistem pemeritahan Kesultanan Buton menggunakan sistem presidensial Sultan bertindak langsung sebagai kepala negara dan kepala pemeritahan, serta bentuk pemerintahan menggunakan monarki konstitusional, dalam praktik penyelenggaraan pemeritahannya terdapat unsur demokrasi.

5.2.1. Partisipasi efektif dalam Kesultanan Buton

Partisipasi yang dimaksudkan oleh Robert Dahl dalam sebuah pemerintahan demokrasi yaitu, peran semua lapisan masyarakat untuk turun langsung membahas agenda-agenda yang berkaitan dengan kebijakan, ataupun masalah umum, baik berkaitan dengan politik ataupun kekuasaan. Untuk konteks Kesultanan Buton partisipasi efektif yang dimaksudkan oleh Robert Dahl telah di jalankan ditandai dengan ke ikutsertaan lapisan sosial masyarakat untuk ikut serta dalam membahas sebuah kebijakan umum.

Contoh kongkritnya dalam hal penentuan kebijakan yang menyangkut negara dan masyarakat luas, seorang Sultan tidak dapat memutuskan kebijakan secara sepihak seperti halnya raja-raja. Sistem ini bertujuan untuk meminimalkan bahaya penyelewengan kekuasaan yang dampaknya bisa mengakibatkan tirani. Segala sesuatu yang menyangkut keputusan maupun kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab sebagai aparat negara, diputuskan melalui musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat Kesultanan Buton, baik dari jajaran perwakilan pemerintah pusat, pemerintah daerah (Kadie), dan aliansi pemerintahan (Barata) semua di libatkan serta mempunyai hak yang sama dalam proses musyawarah tersebut.

Beberapa contoh dalam hal peraturan pembagian pajak dalam sebuah kecamatan (Kadie) pihak kesultanan akan meninjau kecamatan tersebut melihat potensi apa yang ada dalam kecamatan tersebut setelah itu menentukan pajak apa yang akan dikenakan oleh kecamatan, tentunya melalui proses tahap musyawarah yang mempertemukan pihak pemerintahan pusat (Sultan dan *Siolimbona*) dan pihak pemimpin kecamatan (Lakina Dan Bonto) untuk membahas besaran pajak tersebut. Sejalan dengan pandangan Al-Quran yang menegaskan tentang prinsip “*syura*” (musyawarah) untuk mengatur proses pembuatan keputusan, Al-Quran dengan tegas menyebutkan “semua keputusan mereka diputuskan melalui proses musyawarah antara mereka”⁷⁹. Dimaksud dengan urusan mereka adalah bukan urusan perorangan, kelompok ataupun elit tertentu urusan yang dimaksud dalam

⁷⁹Tertuang dalam Al-Quran. Surah As Syura 42:38

hal ini yakni “urusan masyarakat pada umumnya” dan milik masyarakat secara keseluruhan.⁸⁰

Keputusan melalui proses musyawarah secara tidak langsung membatasi kekuasaan dan sebagai alat control kekuasaan Sultan. Tradisi musyawarah tidak lain menjadikan rakyat merasa bahwa mereka mempunyai peran dalam proses pemerintahan dengan memberikan partisipasi sehingga membuat membuat pemerintahan berjalan stabil dengan menempatkan warga negara yang mampu pada posisi otoritas publik. Dimana mereka tidak hanya bisa menjalankan fungsi administratif tetapi juga bisa menjaga kepala pemerintahan bersikap bijak dan berkepal dingin dalam memerintah.

Untuk hal inilah seorang Sultan dalam sistem pemerintahan Kesultanan Buton diwajibkan memiliki jiwa kepemimpinan yang berpedoman pada Murtabat Tujuh. Kepemimpinan yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan, kepemimpinan yang mengedepankan keadilan, kebersamaan hak sebagai makhluk ciptaan Allah, egalitarian dan budaya musyawarah. Ada beberapa sifat kepemimpinan Murtabat Tujuh yakni⁸¹:

1. Bersifat sidiq, benar dan jujur dalam segala hal serta ridha berkorban demi kebenaran.
2. Bersifat tabliq, mampu menyapaikan segala perkataan yang mendatangkan manfaat kepada rakyat.
3. Amanah, mempunyai rasa kepercayaan terhadap rakyat dan sebaliknya dipercaya oleh rakyat.
4. Safat fathani, pandai dan fasih berbicara (pasal 3 UU Murtabat Tujuh)

⁸⁰ Ikram, A. 2001. *Katalog Naskah Buton*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. Hlm 10

⁸¹ Muchir. 2003. *Sara Pataaguna: Memanusiakan Manusia Menjadi Manusia Khalifatullah Di Bumi Kesultanan Buton*. BauBau. Tarafu pres. Hlm 37

Hal penting dari kepemimpinan Murtabat Tujuh adalah sifat keperibadian pemimpin. Sebagaimana yang dikatakan oleh Lord Montgomery “taraf pengaruh seseorang tergantung pada kepribadian orang itu pada “kekuatan daya pijarnya” pada nyala yang ada di dalamnya dan pada daya tarik yang akan menarik orang-orang lain kepadanya”. Dalam kepemimpinan pemerintahan Kesultanan Buton, keadilan dijadikan sebagai landasan pemerintahan⁸².

Pemerintah dalam menjalankan tugas disesuaikan dengan kemampuan, kebudayaan dan kematangan sosial rakyatnya. Seperti pernyataan St. Augustine bahwa; “jika pemerintah mempunyai sikap tidak berlebihan dan rasa tanggungjawab dan menjadi pembela yang paling gigih dari kesejahteraan umum, maka dibenarkan menetapkan hukum yang memungkinkan rakyat memilih pemimpin mereka sendiri untuk mengatur masyarakat. Tetapi seiring perjalanan waktu jika rakyat yang sama menjadi begitu korup seperti menjual suara mereka dan menyerahkan pemerintahan mereka kepada para bajingan dan penjahat, hak menunjuk pejabat publik ini bisa dicabut dari mereka dan hak pemilihan berada pada beberapa orang yang baik”⁸³

5.2.1.1 Hubungan Negara (Pemerintah Pusat Kesultanan Buton) dengan Masyarakat

Dalam Negara Kesultanan Buton, hubungan masyarakat dan negara sangat baik, masyarakat sekaligus merupakan kontrol sosial bagi penyelenggaraan pemerintahan. Pada masa Kesultanan Buton belum ada asosiasi, organisasi

⁸² Tertuang dalam pasal 4 Undang-undang Murtabat Tujuh

⁸³ Schmandt. 2002. *A History of Political Philosophy*. Edisi terjemahan Indonesia. Yogyakarta :Pustaka Pelajar. Hlm ;207

masyarakat, (kecuali golongan bangsawan kaum yang mempunyai organisasi fraksi partai untuk menghasilkan bakal calon sultan) negara memperbolehkan masyarakatnya bergerak bebas secara politis, bebas dimaksudkan adalah bebas dalam batasan-batasan koridor yang ada. Negara dalam hubungannya dengan rakyat bersifat *take and give* dan saling melengkapi. Pemerintah yang memiliki fungsi melayani kebutuhan masyarakat, dimanifestasikan melalui pemenuhan pelayanan public yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Negara menyediakan sarana umum seperti membangun beberapa sarana ibadah, rumah sakit dan sarana pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada masanya. Pemerintah Kesultanan Buton dalam melayani masyarakatnya tidak membedakan individu yang satu dengan yang lain. Perbedaan ras, suku, agama dan status sosial ataupun perbedaan-perbedaan lain, bukan merupakan perbedaan yang signifikan bagi negara ataupun masyarakatnya. Kebijakan negara dalam pelayanan ini sesuai dalam nilai Konstitusi Kesultanan Buton. negara memberikan kebebasan dan kesempatan yang sama kepada masyarakatnya untuk berusaha serta mengembangkan potensi yang dimilikinya (Paangka-angkataka), saling menghormati, saling membantu satu sama lain (mengangkat derajat) dan saling memberi kesempatan untuk maju. ⁸⁴

Nilai-nilai di atas didasarkan pada asumsi bahwa manusia pada dasarnya dapat menggunakan atau mengembangkan kemampuan yang dimilikinya Sebagaimana yang dikatakan oleh C.B Macphersons, 193 bahwa pengembangan

⁸⁴ Tertuang dalam Pasal 1 UU Murtabat Tujuh yang menjelaskan mengenai falsafah bhinci-bhinci kuli yang dimanifestasikan kebeberapa makna.

potensi sebagai *developmental power*.⁸⁵ Pada bidang pertahanan keamanan, selain Barata, Matana Sorumba juga merupakan daerah pertahanan. Di samping pengadaan daerah pertahanan, untuk menjamin lebih amannya masyarakat dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam, negara membuat benteng pertahanan dan mengangkat dua orang menteri pertahanan dan keamanan (*Kapitalao*) yang bertugas melindungi negara dari ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar negara.

Pada bidang hukum, Undang-undang Murtabat Tujuh merupakan azas hokum yang negatur batas penggunaan kekuasaan. Setiap penggunaan kekuasaan yang tidak dibatasi oleh undang-undang mempunyai kecenderungan untuk disalahgunakan (*abuse of power*). Oleh karena itu kekuasaan dalam negara Kesultanan Buton terikat oleh hukum (Undang-undang Kesultanan Buton). Tidak mengenal apa dia seorang Sultan ataupun seorang rakyat jelata, kalau ia melakukan kesalahan akan dikenakan sanksi sesuai kesalahan yang diperbuat. Penerapan salah satu supermasi hukum ini dapat dilihat pada peristiwa sejarah yang cukup kelam ketika Sultan Mardan Ali, yang dikenai sanksi hukuman mati, karena telah melakukan pelanggaran hukum. kesimpulannya penegakan supermasi hokum pada masa Kesultanan Buton benar-benar dijalankan dengan baik. Pemerintah dan masyarakat memiliki persamaan yang sama di sepan hukum, sebagaimana; A.v. Dicey' mengatakan untuk terwujudnya *rule of law* diperlukan dua syarat yaitu: *Superemacy o Law dan Euality before the Law*⁸⁶

⁸⁵ Arfani R.N. 1996. *Demokrasi Indonesia Kontemporer*. Jakarta. Rajagrafindo. hlm 22

⁸⁶ Sukarna. 1981. *Kekuasaan, Kediktatoran dan Demokrasi*. Bandung. Alumni. hlm 23

Deskripsi di atas menjelaskan bahwa hubungan negara (pemerintah) dan rakyat dalam sistem pemerintahan Kesultanan Buton, bagaikan hubungan rohani dan jasmani. Karena rohani dan jasmani hakikatnya satu, pemerintah dan rakyatnya satu pula. Pemerintah dan rakyat pada dasarnya satu, mereka seperasaan sepenanggungan, secara lahir rakyat mengabdikan kepada negara dan secara batin negara mengabdikan kepada rakyat. Pada tata pemerintahan Kesultanan Buton, pemerintah memegang kekuasaan berdasarkan pada keadilan dan rakyat memiliki kehendak berlandaskan kebenaran.

Untuk melaksanakan fungsi kekuasaan pemerintah, Sultan diwajibkan mengamalkan empat sifat mulia yaitu⁸⁷:

1. Bijaksanan, yaitu kemampuan kecerdasan akal
2. Adil, yaitu kemampuan kecerdasan perasaan
3. Rahman, yaitu kemampuan kecerdasan qalbi
4. Rahih, yaitu kemampuan kecerdasan budi

Jika negara dalam menjalankan pemeritahan dengan mengamalkan sifat keempat tersebut, negara dapat menciptakan suatu kehidupan masyarakat yang aman, damai dan sejahtera bagi rakyatnya pada khususnya dan negara pada umumnya.

⁸⁷ Saidi. 1999. *Jurnal mengenai Undang-Undang Dasar Murtabat Tujuh Kesultanan Buton Releansinya Dengan Undang-Undang Dasar 1945 RI*. Baubau. Hlm. 17

5.2.2 Status Sosial dalam Lingkup Kesultanan Buton

Syarat demokrasi prosedural yang dipaparkan oleh Dahl, mengenai persamaan suara untuk konteks Kesultanan Buton masi terbatas dalam hal partisipasi politik belum menyentuh, kepersamaan hak dalam pekerjaan ataupun status sosial lebih cenderung menempatkan hak yang sesuai dengan proposinya. Kesultanan Buton mempunyai klaster tersendiri untuk pemangku jabatan-jabatan penting dalam pemerintahannya

5.2.2.1 Stratifikasi Sosial

Menurut naskah-naskah Buton, stratifikasi sosial masyarakat Buton terbentuk pada masa kepemimpinan Sultan Dayanu Ikhsanuddin, yang diawali dengan pembentukan *Kamboru-mboru talu palena* (tiga batang tiang penyangga yang terikat dalam satu kesatuan kaomu) yang terdiri dari :

1. Golongan Kumbewaha, yaitu yang mempunyai garis keturunan dari La Bula.
2. Golongan Tapi-tapi yang mempunyai garis keturunan La Singga
3. Golongan Tanailandu, yaitu yang mempunyai garis keturunan dari La Elangi.

“Statifikasi masyarakat Buton terjadi tidak lain karena alasan politik. Pada masa pemerintahannya, Dayanu Ikhsanuddin melakukan pertemuan dan sepakat dengan sapati yang saat itu dijabat oleh La Singga dan Kanepulu dijabat oleh La Bula. Pertemuan ini didasari atas usul Abdul Wahid, mengingat karena ketiga orang ini mengawini anak dari Abdul Wahid dan untuk mencegah agar tidak terjadi penerus tahta yang hanya keturunan dari Sultan Pertama Hingga yang Ke empat Dayanu Ikhsanuddin (kepemimpinan tahta turun temurun) maka dengan bijak beliau menyarankan kepada ketiga menantunya untuk musyawarah dalam membahas pembagian kekuasaan dan untuk mengantisipasi terjadinya ambisi jabatan dalam menduduki posisi sultan. Sepakatlh ketiga belah

pihak bahwa hanya keturunan mereka yang berhak menduduki ketiga jabatan tinggi kerajaan, yaitu jabatan, Sultan, Sapati dan Kanepulu.”⁸⁸

Keturunan mereka bertiga inilah yang kemudian dikenal dengan golongan kaomo atau bisa disebut juga Lalaki, dan golongan Walaka berasal dari keturunan para Bonto atau kepala kampung dan golongan Papara yaitu golongan yang tidak ada hubungan darah dari kedua golongan tersebut. golongan papara ini adalah masyarakat mendiami Limbo ataupun Kadie. Papara sendiri terbagi atas tiga klaster yaitu ; 1) Papara dari keturunan masyarakat asli yang tunduk pada Kesultanan Buton atas kemaunnya sendiri (Papara Kantinele). 2) Papara yang datang dari luar yang tunduk pada Kesultanan Buton karena tawanan perang (Tolubirana). 3) Papara yang datang menyerahkan dirinya dengan tidak melalui perang (Peraka).

Sedangkan lapisan masyarakat Buton yang paling terbawah adalah Batua (budak) yang dilahirkan dari ibu bapaknya yang seorang budak juga. Jika ibunya saja yang budak, maka anaknya tidak menjadi budak karena dalam sistem kekerabatan/kekeluargaan masyarakat Buton menggunakan sistem patriaki. Kategori dalam budak sendiri terdapat tiga kategori yaitu :

1. Orang yang tunduk dibawah kekuasaan kerajaan dengan paksa dalam adat disebut bente
2. Musuh kerajaan yang kalah dalam peperangan
3. Dan orang luar kerajaan yang dirampas dan dijual kepada golongan kaomu dan walaka.

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Mujazi, 12 oktober 2014

a) **Stratifikasi Sosial Masyarakat Kesultanan Buton**

1) Golongan Kaomu :

Pertama, golongan Kaomu yang menetap di keraton

Kedua, Kaomu yang menetap dikeraton, tetapi pada saat pembagian daerah kekuasaan tidak kembali ke keraton dan tidak menghadiri pengumuman Murtabat Tujuh yang diumumkan oleh Sapati La Singga, sehingga golongan ini diturunkan derajatnya setingkat lebih rendah. Dalam stratifikasi sosial mereka disebut analaki, dan hak mereka sebagai kaomu hilang tapi tidak menjadi golongan Papara.

Ketiga, Kaomu Isambali, yaitu kaomu yang lahir dari kaomu yang telah menetap diluar keraton dan beristrikan orang biasa. Jika mereka kawwin dengan kaomu dan kembali ke keraton mereka tetap dianggap sebagai kaomu. Dan jika tetap menetap di Kadie maka hak untuk menduduki jabatan hilang.

2) Golongan Walaka;

Pertama, Walaka yang menetap di Keraton pusat kerajaan

Kedua, Walaka yang menetap diwilayah Keraton dan tidak kembali ke Keraton pada saat Sultan Dayanu Ikhsanuddin membagi daerah kekuasaan kepada pembesar Walaka sehingga hak mereka sebagai walaka hilang dan derajat mereka turun (analalaki) namun tidak menjadi papara

Ketiga ,Walaka Isambali, Walaka yang sudah lama menetap di luar keraton dan kawin dengan orang Kadie.

3) Golongan Papara;

Pertama, papara yang menghuni wilayah yang berada dibawah kekuasaan langsung penguasa pusat yang disebut Kadie

Kedua, Papara yang menghuni wilayah Barata yang tunduk dibawah kekuasaan sendiri (Barata)

4) Batua (budak) golongan terakhir

Stratifikasi Golongan yang dapat dan tidak dapat menduduki jabatan:

1) Golongan kaomu yang dapat dan tidak memiliki jabatn:

Pertama, Golongan yang dapat menduduki jabatan yaitu kaomu masasa yang beribu bapak dari kalangan kaomu.

Kedua, golongan yang tidak dapat menduduki jabatan dalam kesultanana adalah kaomu isambali yang tinggal diluar keraton, serta kaomo analalaki.

2) Golongan Walaka yang dapat dan tidak dapat menduduki posisi jabatan;

Pertama, golongan Walaka yang dapat menduduki jabatan adalah yang berdomiili didalam keraton dan walaka yang berdomisili di lur Keraton,, Golongan Walaka yang tidak berhak lagi menduduki suatu jabatan adalah golongan Walaka limbo atau labua.

3) Golongan papara dan batua sama sekaali tidak mempunyai hak untuk menduduki suatu jabatan dalam struktur pemerintahan kerajaan.

Stratifikasi masyarakat Buton dibagi berdasarkan fungsi-fungsi organ tubuh manusia. Kalangan kaomu diumpamakan sebagai kepala, kalangan walaka dimisalkan sebagai badan dan kalangan papara sebagai kaki dan tangan yang mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya masing-masing.⁸⁹

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Mujazi, 12 Oktober 2014

Pada dasarnya di Kesultanan Buton terdiri dari beberapa golongan kelas dalam masyarakatnya, namun mereka saling hormat menghormati satu sama lain. Hal ini tentu saja karena masyarakat Buton diatur oleh suatu falsafah yang dikenal dengan binci-binciki kuli (empati yang tinggi). Sehingga walaupun seorang papara kuli (empati yang tinggi). Sehingga walaupun seorang papara atau budak sekalipun yang tidak mempunyai jabatan dalam pemerintahan, tetapi golongan ini tetap dihormati dan saling menghargai satu sama lain, yang besar tidak boleh merendahkan yang kecil begitu pula sebaliknya.

5.2.3 Tanggung jawab Politik dalam Kesultanan Buton

Hak-hak politik eksekutif (Sultan) diawasi langsung oleh badan “*Siolimbona*”⁹⁰ (legislative). Sultan dalam bertindak harus melalui persetujuan aparat negara Kesultanan (Pangka) dan persetujuan dari lembaga Sio Limbona. Sistem pengawasan dewan *Siolimbona* terhadap sultan, bersifat langsung dan berkesinambungan (proaktif). Jadi tidak harus menunggu laporan dari seorang rakyat atau karena adanya aksi demonstrasi baru lembaga eksekutif turun gunung. Tindakan-tindakan seorang Sultan maupun pejabat negara disesuaikan dengan budaya bangsa, kepentingan negara dan kepentingan masyarakat yang dipimpinnya, tidak berdasarkan kepentingan kelompok atau preferensi perorangan. Hal ini didasarkan oleh pasal 1,3 dan 4 undang-undang Murtabat Tujuh.⁹¹

⁹⁰ Siolimbona adalah jabatan yang hanya bisa di tempati oleh golongan walaka, berfungsi sebagai dewan penasehat tertinggi di kesultanan Buton serta sebagai penyeleksi dan pelantik calon sultan

⁹¹ Pasal,1,3,4 dalam pasal pertama mempunyai intisari mengenai pokok adat berlandaskan perikemanusiaan, pasal ketiga mengenai sifat sifat dasar seorang pemimpin, dan pasal keempat yang menjelaskan intisari pokok-pokok adat Kesultanan Buton

Pola rekrutmen pemimpin dalam sistem dan bentuk pemerintahan Kesultanan Buton bersiat tidak langsung. Masyarakat atau rakyat menyalurkan aspirasinya lewat dewan *Siolimbona*, dewan inilah yang memilih seorang Sultan. Dalam pelaksanaan pemeritahan sultan bertanggung jawab langsung oleh rakyat yang dipimpinya. Sedangkan rekrutmen pejabat lainnya, tata cara pengangkatan berdasarkan pengalaman dibidang yang akan dijabat ataupun memiliki pengaetahuan yang cukup sesuai jabatan yang di emban. Selain pengetahuan dalam rekrutman di utamakan pola model moralitas

Disamping hal tersebut, pengangkatan sultan ataupun pejabat pemeritahan negara harus mempunyai syarat yang tertera pada pasal 3, 5, dan 6 Undang-undang Martabat Tujuh.⁹² Khusus dengan *Siolimbona*, sistem pengangkatannya melalui kalangan Kaomu. Pejabat negara kesultanan, selain sapati, dalam melaksanakan roda pemerintahannya wajib bertanggung jawab langsung kepada sultan. Perlu dijelaskan bahwa walaupun sapati dalam sistem pemerintahan adalah sebagai pemimpin dalam melaksanakan pemerintahan, dalam menjalankan tugasnya tidak bertanggung jawab terhadap sultan tetapi bertanggung jawab terhadap dewan *Siolimbona*.

Jika dilihat dari tata cara pengangkatan para pejabat tersebut keahlian dan kesempurnaan batinlah yang diutamakan. Tidak seperti halnya era modern ini pejabat atau pemimpin yang duduk dalam pemerintahan ada indikasi tidak berdasarkan keahlian. Adapun pejabat yang ditempatkan sesuai keahliannya itu hanya sedikit ataupun secara kebetualan. Dari beratus-ratus jabatan kemungkinan

⁹² Pasal 3 menjelaskan sifat-sifat yang diwajibkan atas pemimpin masyarakat, Pasal 5 menjelaskan 7 sifat tuhan yang harus di teladani, Pasal 6 susunan dalam pembentukan sarah pada dan pangkat-pangkat

hanya terdapat satu atau dua orang pejabat yang sesuai dengan keahliannya. Dewasa ini dalam rekrutmen pejabat ada indikasi faktor moralitas bukan merupakan hal yang sangat prinsipal lagi. Ini dapat dilihat pada beberapa pejabat negara yang terindikasi perbuatan korupsi ataupun amoral yang berlebihan.

5.2.3.1 Kesejahteraan

Sistem perekonomian negara Kesultanan Buton menggunakan sistem ekonomi kerakyatan. Negara memberikan sepenuhnya kepada rakyat untuk mengurus perekonomian. Dari hasil perekonomian rakyat inilah salah satu sumber pembiayaan kebutuhan negara. Masyarakatlah yang membiayai pemerintah dengan jalan membayar pajak pada pemerintah. Pajak yang dimaksudkan bukan pajak perorangan tetapi pajak wilayah yang diperoleh dari penyisihan akumulasi pendapatan seluruh warga wilayah yang bersangkutan. Sehingga pada masa Kesultanan, seorang Sultan atau aparat negara tidak diperbolehkan mengadakan atau melakukan kegiatan perekonomian yang siatnya akan menghambat usaha rakyat.

Pada masanya ada seorang permaisuri Sultan menanam pohon srey di halaman rumah, bertanyalah seorang Sultan kepada istrinya “untuk apa engkau menanam pohon itu, kalau pohon itu tujuannya hanya untuk menambah kebutuhan ekonomi maka cabutlah pohon itu, sebab kita akan menciptakan kecemburuan masyarakat”.⁹³

Peristiwa ini mengandung makna bahwa pada masa sistem pemeritahan Kesultanan, dalam bidang ekonomi seorang Sultan maupun aparat negara tidak diperbolehkan melakukan kegiatan bisnis atau usaha dibidang perekonomian selama ia menjabat, sebab apabila mereka membangun usaha ekonomi bisa mengakibatkan terjadinya banyak penyelewengan korupsi dalam tubuh

⁹³ Hasil wawancara Asrul. 21 September 2014

pemerintahan dan tidak menutup kemungkinan akan menghambat dan mematikan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat yang memiliki modal kecil.

Falsafah Buton mengenai perekonomian yang berbunyi “*Podagaaka pamarintah amarombumo zamani*” artinya apabila pihak pemerintah sudah terjun langsung dalam dunia perekonomian maka rusaklah negara itu. Sistem perekonomian Murtabat tujuh mengedepankan kemaslahatan rakyat, bukan kepentingan politik ataupun golongan, sehingga pemerataan kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama negara.⁹⁴

5.2.3.2 Bagaimana Perluasan dan Penguatan Kesultanan Buton

Perluasan kesultanan (kerajaan) dan penguatan hubungan dengan para sekutu. Dimulai pada periode awal ketika para pendatang pertama yang pindah dari pantai menuju wolio menjalin hubungan dengan kepala permukiman tobe-tobe, yang didaerah itu mempunyai perkebunan aren, dan mengadakan persetujuan dengannya. Penguasa ini ialah Dungkucangia yang legendaries dan pada saat itu raja ketiga Bataraguru yang kemudian menikah dengan anak perempuannya. Ini mungkin berlangsung ketika daerah Tobe-tobe dimasukkan dalam Kerajaan Wolio, dalam hal ini peneliti dapat menemukan proses integrasi serupa dalam kisah turun-temurun dimana putra pendiri kerajaan (pemimpin kelompok pendatang pertama dari Johor), Simpanjoga, berpergian kepantai timur pulau Buton dan disana mereka persahabatan dengan pemimpin permukiman kamaru. Dengan demikian Kamaru jadi di bawah pengaruh Wolio. Dengan cara seperti itulah, Sembilan kerajaan kecil di gabungan dengan ke dalam kerajaan Wolio, dan kemudian di sebut siolipuna, Sembilan kerajaan.

⁹⁴ Hasil wawancara Siti Alfiah, 24 September 2014

Perluasan daerah pengaruh kerajaan Wolio selanjutnya berlangsung di masa Sultan pertama Murhum. Ia menggantikan ayahnya sebagai penguasa Muna, tetapi setelah wafatnya penguasa kelima kelima Wolio, Rajamulae, ia mengangkat saudara laki-lakinya Posasu, untuk mengambil alih kedudukannya di Muna. Dan pada saat itu dewan kerajaan Muna agak keberatan mengakui saudara laki-lakinya sebagai penguasa Muna, Murhum memaksa mereka agar menerima Posasu. Proses ini menyebabkan kerajaan Muna bergantung terhadap Wolio. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan kerajaan Muna tergabung dalam aliansi Kesultanan Buton dan menerima kedudukan Barata, bersama tiga kerajaan taklukan lainnya.. konon menurut tradisi lisan, dibawah penguasa kelima,

5.2.4 Pengawasan Agenda dalam Ketersediaan Lembaga Negara di Kesultanan Buton

Kesultanan Buton dalam penerapan pemerintahannya menganut sistem pemisahan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang luas. Hal ini di dasari oleh pasal 1 UU Murtabat Tujuh.⁹⁵ Cabang-cabang tersebut terdiri dari; eksekutif (Sultan), Legislatif (*Siolimbona*) dan yudikatif (*Kenepulu*), hal ini sejalan dengan teori pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu lebih dikenal dengan Teori trias politika, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif, untuk sistem pemerintahannya menganut sistem presidensial dimana raja sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pemerintahan Kesultanan Buton dalam menjalankan tugas negara dibantu oleh jajaran birokrasi yang berada pada wilayah ibukota kesultanan maupun birokrasi yang bertugas diluar ibukota.

⁹⁵ Pasal 1 Undang-undang Murtabat Tujuh yang menjelaskan pokok adat berdasarkan falsafah

Pemerintahan Kesultanan Buton diatur oleh satu konstitusi tertulis yang oleh masyarakat Buton dikenal dengan undang-undang Murtabat Tujuh Sara Wolio. Dalam konstitusi Undang-undang Murtabat Tujuh, implementasi pemerintahan menggunakan sistem “*Responsible Government*” (pemerintahan yang bertanggung jawab). Negara menggunakan prinsip pemisahan lembaga dan pemisahan daerah kekuasaan dengan tujuan untuk menghindari kekuasaan yang tumpah tindih (*separation of powers*).

Pembagian wilayah pemerintahan terdiri dari wilayah pusat pemerintahan yang berada di ibukota kesultanan, wilayah Barata, berada di daerah-daerah Barata dan wilayah Kadie berada di daerah-daerah Kadie. Masing-masing wilayah tersebut dipimpin oleh seorang Bonto atau Lakina. Pemilihan kepala wilayah, baik daerah Barata maupun Kadie, dipilih langsung oleh masyarakatnya tanpa campur tangan pemerintah pusat. Kebijakan dan urusan rumah tangga daerah Barata diserahkan sepenuhnya kepada daerah Barata (otonomi penuh). Khusus daerah Kadie dalam perihal pemimpin apabila salah satu Kadie tidak mempunyai seorang calon pemimpin, seorang Bonto yang bertugas mengontrol pemerintahan di daerah Kadie diperbolehkan menjadi pemimpin Kadie. Dengan persetujuan Sultan atas permintaan masyarakat setempat. Daerah Barata di samping mempunyai hak otonom, juga merupakan daerah pertahanan keamanan negara Kesultanan. Apabila ada penyerangan dari luar, daerah Baratalah yang mengadakan perlawanan terlebih dahulu.

Kapitalao akan mengeluarkan kebijakan (bantuan) apabila Barata yang bersangkutan meminta batuan. Tanpa permintaan dari Barata, kapitalao tidak berhak ikut campur dalam kebijakan daerah Barata walaupun kapitalao dalam

negara modern adalah seorang menteri pertahanan dan keamanan. Untuk lebih lanjutnya peneliti akan membahas sub bab mengenai lembaga-lembaga negara Kesultanan Buton beserta seluruh struktur pemerintahan dan pertahanannya pada sub bab. 5.3 Struktur Pemerintahan dan Pertahanan Kesultanan Buton

5.2.4.1 Hubungan Sultan dan *Siolimbona*

Pada dasarnya, Sultan bertanggung jawab kepada rakyat serta *Siolimbona* dan dapat diberhentikan ataupun diangkat oleh *Siolimbona* tetapi Sultan tidak mempunyai wewenang untuk memecat atau mengangkat anggota Sio Lombona. Hubungan Sultan dengan *Siolimbona* sangat erat, dalam menjalankan pemerintahan. Hubungan erat ini pada falsafah Buton disebut; “*Poromu inda Posangu, poga inda kolata*”, bermakna bahwa hubungan Sultan dengan Sio Liombona itu adalah bersatu tidak sekutu dan berpisah tiada antara.⁹⁶ Artinya hubungan *Siolimbona* bagaikan minyak dan air yang disatukan dalam gelas. Minyak dan air tersebut bersatu tapi tidak bercampur dan minyak air tersebut tidak dapat tercampur melainkan hanya menyatu. Sultan dan *Siolimbona* dalam menjalankan pemerintahan, kedua-duanya harus bersatu, seperasaan, sepenanggungan yang sama dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab. Perasaan yang sama dalam menjalankan pemerintahan akan menghasilkan kinerja yang baik dan dapat menciptakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang aman dan damai.

Nilai Murtabat Tujuh tersebut bermakna bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan, sultan tidak berhak mencampuri urusan yang telah menjadi

⁹⁶ Lihat Schrool. *Op.cit* hlm 76 dikutip dalam Idrus akbar., 2000, *Tradisi Kangkilo Salah Satu Modal Sosial Budaya Bagi Pembentukan Karakter Posistif Masyarakat Buton*. hlm 37

kewajiban dan tanggungjawab *Siolimbona* demikian pula sebaliknya. Dewan *Siolimbona* tidak boleh mencampuri urusan Sultan Kecuali hak-hak yang mengharuskan *Siolimbona* untuk mengadakan pengawasan dan pengontrolan terhadap kinerja Sultan. Kedua lembaga tersebut, sebagai alat negara, mempunyai kewajiban dan tanggungjawab yang sama dalam menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Walaupun kedua lembaga tersebut tidak saling mencampuri tugas masing-masing, akan tetapi apabila seorang Sultan menyalahi aturan dalam konstitusi Kesultanan Buton dengan tegas *Siolimbona* mengambil sikap dalam menangani masalah tersebut.

5.2.4.2 Hubungan Pusat Kesultanan dengan Kadie

Secara resmi kesultanan terbagi dalam 2 Kadie, atau masyarakat desa, yang mempunyai otonomi tertentu atau dalam dunia modern sering disebut kota/kabupaten. Setiap Kadie mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Organisasi ini dapat sangat berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya sesuai dengan perbedaan dalam cara dalam cara pembentukan komunitas tersebut, adat setempat, serta fungsi-fungsi khusus yang berhubungan dengan kesultanan sebagai bagian dari kesultanan.⁹⁷

Peraturan pertama bagi wilayah Kadie ditetapkan sewaktu masa pemerintahan Sultan La Elangi.⁹⁸ Kemudian 72 Kadie dibentuk, akan tetapi jumlah ini bertambah dari yang tadinya 57 menjadi 72 Kadie. Kadie harus membayar pajak tahunan kepada pusat kesultanan. Untuk setiap Kadie ditetapkan

⁹⁷Schrool. *Op.cit.* hlm 78

⁹⁸Ibid

jumlah tertentu yang sangat berbeda-beda tergantung dari potensi tiap Kadie tersebut. sistem perhitungan pajak sumbangan jelas berkembang selama bertahun-tahun lalu, dan berhubungan dengan berbagai pengeluaran kesultanan. Misalnya salah satu sumbangan dari Kadie Bungurasi adalah sebagai berikut :⁹⁹

- a) Jawana: sumbangan untuk para utusan ke Jawa taupun Batavia – 10 Boka
- b) Jupanda: Sumbangan untuk para utusan ke Makassar sejumlah 1 Boka
- c) Kapalikina : pembayaran untuk pemungut pajak (talombo) sejumlah 2 boka
- d) Wetimeana : untuk penyelenggaraan jasa-jasa di pusat Kesultanan - 14 orang laki-laki
- e) Kalongana : sumbangan untuk BontoOgena, atau sultan, yang terdiri dari 20 ekor ayam, 20 butir kelapa, dan 20 keranjang bawang.
- f) Kabutana; sumbangan untuk BontoOgena terdiri ari 2 keranjang injelai.
- g) Kantaburakana; untuk Bonto atau bobato dan BontoOgena 10000 tongkol jagung.
- h) Sandatana; sumbangan untuk seorang utusan dari dewan yang mengunjungi desa diberikan 1000 tongkol jagung.

Sumbangan-sumbangan tersebut diterima oleh *Talombo*, sebagai pembantu dua Bonto Ogena yang bertanggung jawab atas pengumpulan dan pembagian sumbangan pajak dari satu ataupun dua kelompok desa.¹⁰⁰ Di desa Kadie yang lain (*Ronie*) memberikan sumbangan berupa weti, yang terdiri dari hasil bumi, juga merupakan bagian dari upacara panen. Hadiah untuk pemerintah pusat, yang juga dipandang sebagai pusat keagamaan dengan nama Baluwu Peropa, diwajibkan agar tiap waktu panennya terjamin baik.

⁹⁹ Zahari. *Op.cit.* hlm 120

¹⁰⁰ Zahari, *Op;cit* hlm 121

Dalam hal agama ataupun ideologi pemerintahan Kadie bergantung pada pemerintahan pusat. Islam disebarkan ke Kadie dari pusat. Adapun cerita yang mengisahkan tentang Sultan pertama Murhum, yang telah memeluk agama Islam pada pertengahan abad 16, memaksa warganya untuk mengikuti ajarannya. Namun, bersamaan dengan itu, para guru dan sesepuh dari pusat membawa gagasan baru ke Kadie-Kadie dan menyebarkan pengetahuan itu secara terbatas dan tanpa pemaksaan, lewat bermacam-macam cara. Tujuannya adalah mencegah Kadie membentuk barisan melawan pusat.

Cara lain untuk itu (tidak mempersatukan Kadie) ialah dengan memberi tugas atau fungsi yang saling berbeda, untuk membuat mereka merasa saling terpisah, jadi misalnya desa Rongi mempunyai tugas khusus membela kesultanan jika ada serangan musuh, desa rongilah yang pertama menyusun pasukan. Ini memberi mereka kedudukan yang lebih tinggi daripada Kadie disekitarnya. Itu berarti mereka tak dapat menikahi warga Kadie sekelilingnya. Sebanyak 10% sampel yang diambil pada November 1981, menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada perkawinan dengan orang dari luar Rongi.¹⁰¹

Orang dari Kampung Handeya (sekarang bersama Rongi membentuk desa sandang pangan) disebut “*lapora*” yang berarti sebuah kelompok yang dapat melakukan jasa-jasa khusus untuk pasat, namun berstatus lebih rendah dari papara di desa sekeliling mereka. Tetapi, mereka sendiri merasa bahwa posisi khusus itu memberi mereka martabat yang pasti tidak lebih rendah dari martabat orang Rongi. Orang lain menjelaskan kedudukan mereka lewat perbandingan entah dari

¹⁰¹ Akbar. *Op.cit.* hlm 45

sudut pandang nilai benda, hasil pangan, jumlah penduduk ataupun norma dari desa tersebut.

5.2.5 Prosesi Pemilihan Raja/ Sultan Buton

Proses pemilihan pemimpin setiap kesultanan di nusantara mempunyai tahapan yang berbeda-beda baik dari proses penjangkaran sultan dan tata cara pelantikannya. Untuk Kesultanan Buton terdiri dari beberapa tahapan; pertama melalui sistem kepartaian, kedua tahap Fali, (setelah memperoleh calon dari tiap partai), ketiga tahap Penetapan calon Sultan, dan keempat tahap pelantikan Sultan

5.2.5.1 Sistem Kepartaian.

Ikut seertanya rakyat dalam pemerintahan adalah wujud dari demokrasi. Mengetahui akan kehendak rakyat hanyalah rakyat itu sendiri. Rakyat mengetahui nama wakilnya yang baik dan tidak, mana wakilnya yang setia kepada amanatnya dan tidak. Mengingat tidak mungkin seluruh rakyat ikut serta dalam jalannya pemerintahan secara langsung dibentuklah sebuah wadah organisasi politik wadah politik ini oleh masyarakat Buton dinamakan *Kamboru-mboru talu palena* (tiga tiang penyangga). Kemudian dalam sistim kepartaian Kesultanan Buton, *kamboru-mboru talu palena* menjadi raksi. Fraksi fraksi tersebut terdiri dari :

1. Fraksi Tanailambu.
2. Fraksi Taopi-Tapi
3. Raksi Kumbewa.

Melaui ketiga fraksi inilah seorang sultan dipilih oleh dewan *Siolimbona*. Dalam sistem kepartain, lembaga dewan *Siolimbona* bertanggung jawab mewakili rakyat dalam pemilihan sultan. Sistem ini menggunakan sistim pemilihan tidak langsung, rakyat memberikan kepercayaan penuh kepada dewan *Siolimbona*

sebagai wakil mereka dalam pemilihan pemimpin negara/Sultan. Jadi pemerintahan Buton dalam pemilihan kepala pemerintah tidak berdasarkan keturunan atau putra mahkota, tetapi melalui pemilihan dengan cara musyawarah mufakat. Hal ini berdasarkan firman Allah : “*waamruhum syura benahum*” artinya segala urusan mereka bermusyawarah antara mereka.¹⁰² Dalam sistem pemerintahan Kesultanan Buton, masa jabatan seorang Sultan tidak menyalahi aturan maka selama itu pula ia menjabat. Sebaliknya apabila seorang sultan dalam melaksanakan tugas melakukan pelanggaran sultan tersebut dapat diturunkan/dipecat.

Pada sistem politik pemerintahan Kesultanan Buton sultan dipilih oleh dewan *Siolimbona*. Kandidat sultan harus berasal dari fraksi. Proses pencalonan sultan dimulai setelah kekosongan jabatan Sultan mencapai 120 hari. Dalam lowongan kekosongan waktu, jabatan Sultan digantikan sementara oleh Sapaati yang merupakan orang kedua setelah Sultan tampil sebagai wakil sultan dalam menjalankan tugas pemerintahan sampai terlantiknya sultan baru.¹⁰³ Dalam sistem pemilihan setiap raksi diawasi oleh 3 orang *Siolimbona*.

Fraksi Tanailandu diawasi oleh 3 orang Bonto yaitu :

1. Bontona Gundu-gundu
2. Bontona Peropa
3. Bontona Rakia

Fraksi Tapi-tapi diawasi oleh 3 orang Bonto yaitu :

1. Bontona Barangkatopa
2. Bontona Baalawu
3. Bontona Wandailolo

¹⁰² Tertuang dalam Al-Quran. Q.S. Assyura: 38

¹⁰³ Ma'Mun. 1999. *Majalah Buton "Wolio Molagi"* edisi perdana. Kendari. Yayasan Wolio Molagi. hlm 50

Fraksi Kumbewaha diawasi oleh 3 orang Bonto yaitu :

1. Bontona Gama
2. Bontona Siompu
3. Bontona Melai

Siolimbona bertugas mengawasi para kandidat Sultan dari ketiga fraksi.

Pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap para kandidat dimulai sejak kecil. Tugas pengawasan pengamatan dan penilaian terhadap para kandidat dilakukan dengan cara mendeteksi perilaku dari ketiga fraksi. *Siolimbona* mengadakan pendeteksian terhadap riwayat hidup bakal calon Sultan dengan cara mendeteksi perilaku para kandidat dari masa kecil hingga masa dewasa, semua dilakukan secara pengintaian diam-diam tanpa diketahui oleh bakal calon sultan.

Faktor yang dinilai dalam pendeteksian adalah kesempurnaan batin yaitu mempunyai tingkat keerdasan dan memiliki akhlak yang baik, tingkah laku dan moralitas yang baik serta kesempurnaan lahir yaitu gagah berani, kesatria dan tidak cacat tubuh. Apabila dari pengamatan, penilaian dan pendeteksian yang dilakukan oleh *Siolimbona* telah menemukan hasil dari pengawasan ketiga fraksi tersebut selanjutkannya dilaporkan kepada Baluwu Peropa untuk dipertimbangkan.

Setelah mencapai kata mufakat, dewan *Siolimbona* menghadap Bonto Ogena. Agenda sidang paripurna membahas tentang “*buataka katangena*” (membuka rahasia). Sidang dibuka oleh Bontona Peropa sekaligus menjadi juru bicara dari *Siolimbona*, setelah sidang dibuka, Bontona Peropa berkaata:

“*Jou Bonto Ogena, yikawwaaka mami yingkitaa siy temanga andimu akamiu, padamo tapomaampeelo ya kambumbu taluanguna siy yincana kanaindana laki Wwolio sy, modaangiana siy yi Tapi—tapi mini, atawa yi*

Tanailandu atawa yi Kumbewaha, La .,,” (menyebut nama kandidat yang akan diajukan). Artinya, Bonto Ogena yang menyebabkan kami datang kepada tuan bersama dengan adik-adik, kakak-kakak tuan ini, kami telah menemukan beberapa calon kandidat dari ketiga fraksi tersebut lalu nama-nama dari fraksi tersebut disampaikan kepada Bonto Ogena. Jawaban seorang Bonto Ogena “*jou Bontonna Peropa, Baluwu Siy Kurango Kitamo Sepodano, Tabanulepo, takombojayi temanga opuamiu, Pangka teyarona Pangka*” artinya tuan Bontona Peropa Baluwu sekarang saya sudah paham, namun tuan-tuan kembali dahulu berkonsultasi dengan para pejabat dan mantan pejabat.

Setelah diajukan dan disetujui oleh Bonto Ogena, selanjutnya dewan *Siolimbona* melakukan “Kambojai”¹⁰⁴. Pangka yang dikambojai adalah Pangka dari kalangan *Pale Yi Matanaeo* (Sapati dan Kapitalao Matanaeo atau lebih dikenal dengan Kayarona) dikambojai oleh 3 orang dari anggota *Siolimbona*, untuk mengadakan diskusi dengan para Pangka Pale Yimatanaeo tentang kandidat yang telah diajukan dari golongan Tapi-tapi. Sedangkan untuk bagian kawasan pale Sukanaeo atau pejabat yang berada di Sukanaeo, dikambojai oleh 6 orang *Siolimbona* yang bertugas menilai fraksi Tanailandu dan Kumbaweha.

Sesampainya di tempat tujuan *Siolimbona* langsung menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka kepada kayarona baha : “*siy jou yumbaaka mai yingkita siy atumpu kami opua miu tapa rua tapanaa, Tama gimpi tmalalanda yi sapulu ranguna kamondo mami siy tape susuaka dala makate mosakalina kakate tee dalam mainawa mosakalina kainawa*”. Maka para pejabat

¹⁰⁴ Kambojai istilah dalam bahasa Buton yang berarti Kunjungan perjalanan dinas dengan mengunjungi semua Pangka dan Kayarona Pangka. Tujuan kunjungan tidak lain untuk mencari tambahan informasi atau masukan tentang ketiga kandidat Sultan.

tersebut menjawab” *Siy jou padamo kurangoa mbakanomo siy kulawani kitomo, kalalaki yinda toposala-sala. Yikamata-mata siy soo mini La....* (Nama kandidat yang bersangkutan) *Salapasina yincia Sumai, yaku inda kupogaa tee syara*” artinya, maksud kedatangan kami adalah untuk meminta masukan, pertimbangan, pendapat dan sekaligus penilaian terhadap para kandidat yang telah kami sebutkan tadi.

Setelah “*Kayarona*”¹⁰⁵ mendengarkan dan paham maksud kedatangan *Siolimbona*, *Kayarona* menjawab, ya tuan-tuan, kami telah mendengar dan paham maksud kedatangan tuan-tuan. Penilaian dan pengamatan kami selama ini terhadap nama yang telah disebutkan, sama dengan penilain kami. Hanya nama itulah yang menonjolkan tingkah laku dan budi pekerti yang baik selama pengamatan kami. Selain itu tidak ada dan saya sepakat dengan hasil penilain tuan-tuan.

Hasil pertemuan tersebut yang dilakukan oleh dewan *siolimboana* dilaporkan oleh *Bonto Ogena* dalam rapat paripurna. Dalam sidang ini sekaligus mengadakan penyaringan dari ketiga kandidat yang lolos dalam tahap kualifikasi. Siapa yang lebih baik dan mendapatkan suara terbanyak dialah yang lolos ketahap selanjutnya. Apabila proses pemilihan telah selesai dan menghasilkan satu kandidat yang terbaik dari yang terbaik, *Siolimbona* dan *Bonto Ogena* mencari waktu yang tepat untuk tahap fali.

Namun terkadang pada tahap akhir ketiga kandidat lolos dalam proses penjarangan dan ketiga kandidat dapat lanjut ke tahap Fali. Setelah sidang selesai, para dewan *Siolimbona* bermusyawarah untuk membentuk waktu pelaksanaan

¹⁰⁵ Istilah *Buton* seorang pemimpin/ yang dituakan dari fraksi cabang keluarga yang berhak menduduki posisi Sultan. Biasanya diduduki oleh *Sapati* dan *kapitalao* dari fraksi tersebut

“Paso” yaitu peresmian pencalonan. Selanjutnya para *Siolimbona* mencari penentuan waktu malam apa yang paling baik untuk diadakan “ Fali” . acara fali dilaksanakan dalam masjid agung keraton Buton . malam fali biasa jatuh pada malam jumat Pukul 24.00.

Pada tahap Fali, wewenang *Siolimbona* dilimpahkan kepada *Bisa Patamiana* yang telah ditunjuk oleh memfali para kandidat. Apabila calon yang difali satu orang secara fali akan dilakukan hanya untuk mengetahui baik atau buruk masa pemerintahannya. Tetapi apabila calon lebih dari satu maka akan dicari calon yang terbaik dari yang baik untuk kandidat Sultan.

5.2.5.2 Tata Cara Fali

Fali dilaksanakan oleh *Bisa Patamiana*. Acara fali dihadiri oleh *Siolimbona* dan dua orang juru tulis sekertaris kesultanan. Fali dimulai dengan melakukan sholat hajad yang dilakukan oleh salah satu dari *Siolimbona* yang memiliki keturunan dari juru tulis mancuana (la majinpau) dan sesudahnya salah seorang dari *Siolimbona* yang juga keturunan juru tulis tersebut membuka al-quran yang disaksikan oleh kesemua *Siolimbona* yang hadir.

Cara membuka Al-Quran dalam proses Fali :

- 1) Kitab suci al-Quran di buka pada sembarang halaman dengan sekali buka.
- 2) Kemudian dibuka lagi 7 lembar dimulai dari embukaan yang pertama dari halaman tersebut dihitung 7 baris dari atas halaman sebelah kanan.
- 3) Mulai dari baris ke-7 tersebut dimulai perhitungan huruf-huruf H (ha) dan Tsah sampai akhir surah yang kebetulan mengenai yang dibuka itu. Apa bila hanya satu calon yang dipaso maka pada tahap ini diketahuilah baik buruk masa pemerintahannya. Dalam pertemuan

huruf, huruf yang terbaik adalah bila huruf tsah lebih banyak daripada huruf ha.

- 4) Bila calon lebih dari satu orang, pembukaan kitab suci Al-quran dilakukan dua kali, tetapi sembahyang hajat hanya sekali. Dari hasil fali dapat dilihat kandidat fraksi mana yang banyak mendapat huruf Tsah, maka dialah pemenangnya. Hasil ali tersebut kemudian dilaporkan padaa Bonto Ogena.

5.2.5.3 Sokaiyana Pau/Pengukuhan kandidat Sultan

Setelah tahap pelaksanaan fali, Bonto Ogena mengundang semua majelis pemerintahan, Bonto-Bonto, Bobato dan semua aparat Barata, guna menyampaikan calon kandidat sultan yang lolos dari tahap fali. Ketika semua undangan telah hadir dibaruga, berkatalah Bontona Peropa Baluwu; *“jou kapitalao, ia langkumo”* (tuan kapitalao silahkan mendekat). Setelah Bontona Peropa, Baluwu selesai berkata, serta merta kedua kapitalao langsung datang menghampiri Bonto Ogena.

Lalu Bonto berbisik kepada kapitalao tentang siapa kandidat yang akan disahkan. Kedua kapitalao mendengarkan bisikan Bonto lalu keduanya berdiri dan seorang dari pale matanaeo menghadap ketimur sambil memegang pedang (hancu), kapitalao dari Pale Sukanaeo menghadap kebarat dengan posisi memegang pedang yang diletakan pada bagian dadanya, sambil berkata; *“tarango-tarango, bari-bari, kita sy yimondoakana Baaluwu Te Peropa Bari-baria, kabolosinaa laki wolio siy:....* (sebut nama kandidat yang terpilih). *Yincema-yincemamo ko wwala-wwalana ngarandana, moko singku-singkuna ngarangaranda, maimo yitanga-tanga siy beku lae-laeya kea hancu siy”*, artinya dan kapitalao yang menghadap bagian timur mengajak para hadirin untuk

bersorak tiga kali “ha-ha-ha”, yang artinya dengarkan dengarkan, dengarkan hadirin bahwa yang disepakati oleh Baluwu Peropa dan seluruh yang terpilih adalah si (nama kandidat sultan) barang siapa yang ingin mengacaukan hasil ini, datanglah ketengah-tengah ini dan akan ku potong-potong dengan pedang ini. Setelah itu, keduanya duduk kemudian melapor kepada Baluwu Peropa “*talapasimo siy jou*” (kami telah selsai melaksanakan perintah). Kapitalao kembali ketempat duduknya.

Bila calon sultan hadir dalam siding karena jabatannya Bonto Ogena memerintahahkan yang bersangkutan untuk kembali kerumahnya. Tetapi kalau calon tidak hadir ditempat itu, Sara mengutus empat orang Bonto dan empat orang Bobato untuk memberitahu yang bersangkutan agar jangan meninggalkan rumah. Bonto yang diberi tugas utnuik menyampaikan amanat tersebut adalah Bonto Yi Syara empat orang Bobato empat orang. Bonto Ogena berkata pada utusan; “*tapena yianami..takawaaka tatulaa—tulaakamea. Siy jou yi kawaka mami yingkita siy tee manga aamamiu temanga andimiu akamiu mia Ogena teopua miu baluwu operopa teopuamiu tapa ruatapana bolipo takalingka-lingka daangia beaumba tumpuana sara. Teantona rua pula baka*”. Artinya sampaikanlah kepada calon sultan agar jangan meninggalkan rumah sebab sebentar lagi akan datang rombongan pemerintah/sara dengan membawa isi dua puluh boka (perlengkapan sultan).

Amanah tersebut disampaikan kepada calon sultan sedangkan utusan tersebut tidak langsung pulang, tetapi menunggu pemberitahuan dari Bontona gama, Bontona siompu Bontona wandailolo, Bontona rakia Bontona melai, Bontono silae, Bontono lanto, Bontono jawa, 8 orang bobato dan 6 orang talambo.

Ke-8 orang Bonto, 8 orang bobato dan 6 orang talambo ditugaskan oleh Bonto Ogena sebagai utusan untuk berbicara dengan kandidat sultan. Mereka berkata “kami di utus oleh sara, bersama bapak-bapak tuan pada kedua ujungnya (Bonto Ogena) bahwa pada saat ini tuanlah calon Sultan (pemegang sifat yang dua belas) yang mengetahui didalam dan diluar, pada keempat-empat sudutnya, keempat-empat isinya bersama batu-batunya dan kayu-kayunya. Di tangan tuanlah kewenangan memakai,, menguasai dan mengatur penggunaan tanah ini. Isinya dua puluh boka.

Sesudah menerima pesan berangkatlah ke-16 orang utusan menuju rumah calon sultan untuk menyampaikan pesan Bonto Ogena, seperti di atas. Setelah selesai menyampaikan pesan Bonto Ogena mereka berjabat tangan dan berpamitan:: “*Posangaimo randanaaeta waopu*”. Dengan selesainya penyampaian pesan, calon Sultan sudah mempunyai dua gelar yaitu; Randana maeta dan Waopu. Sedangkan hak sembah dan perintah disbanding setelah ia dilantik. Selesai berpamitan pada calon Sultan, semua utusan termasuk utusan pertama pulang menuju baruga guna melaporkan hasil pertemuannya dengan calon sultan setelah melaporkan hasilnya dalam siding di baruga.

Memasuki tahap persiapan pelantikan, Bonto Ogena mengeluarkan perbelanjaan guna memperbarui payung kuning (payung kerajaan) kulambu, langi—langi untuk baruga, kenia (perisai) moloku-pakeana gampikaro, tombina kampanyia dan semua alat-alat perlengkapan harus diperbarui dengan adanya Sultan baru sampai pada pakaian-pakaina yang membawa alat kerajaan. Semua uang yang digunakan adalah hasil upeti rakyat (juwana papara). Daerah-daerah Barata seperti Muna mempersembahkan permadani untuk Sultan baru, Kulisusu

memperssembahkan Kiwulu solo-solo, Kaledupa memperssembahkan lampa dan Tiworo memperssembahkan perisai.

5.2.5.4 Tahap pelantikan

Pada tahap pelantikan, pangalasa yang berasal dari Tobe-tobe bertugas membawa bancana kaluku bula dan air dari tingko (tobula) dan kemudian air tersebut disandarkan pada Batu Wolio (Batu yi gandangi). Batu yi gandangi berada di Lemangura tempatnya pada jantung ibu kota kesultanan. Batu yi gandangi pada malam pelantikan (malam jumat) dan keesokan harinya pelantikan diberi kelambu dan ditempat itu dimeriahkan dengan bunyi gendang dan gong semalam suntuk.

Dalam persiapan pelantikan, *Pata Limbona* memimpin rombongan yang membawa kampanyia, yaitu kompanyia pataguna yang berasal dari Baluwu peropa, Gundu-gundu dan Barangkatopa. Rombongan bertolak dari rumah Bontona Peropa dengan memakai seragam jubah dan destar (mpalangi), di samping itu, 8 anak Baluwu dan peropa (anak-anak dari kaum walaka) dipersiapkan dalam rombongan untuk membawa Tambia (air mandi calon Sultan).

Dengan cara; pertama, kompanyia digalangi (tari pernag), kedua, tingko air dan banca diangkat satu persatu oleh Bontona Peropa dan diserahkan kepada anak Baluwu Peropa. Ketiga, diadakan pembacaan doa selamat. Selesai acara pembacaan doa selamat, rombongan berangkat menuju rumah calon Sultan (Kamali) untuk memandikan calon sultan dikamali *Bonto yi nunca* yang berjumlah 11 orang telah lama hadir di *Galampa*. Setibanya rombongan tersebut, Bontona Dete dan Bontona Katapi melaporkan kedatangan rombongan *Pata Limbona* kepada calon Sultan: “*akawomo opuomiu Baluwu – peropa*”. (telah

datang nenek kalian Baluwu, peropa). Setelah menerima hasil laporan tersebut, calon Sultan turun dari kamali menuju *Galampa* untuk melakukan acara mandi.

Tahap berikutnya masuk pada acara pembedakan, dimana dalam tahap ini, Botona Peropa berkata kepada Calon Sultan; dengar La Ode kami telah memberi tanda peringatan kepada kamu jangan pernah sekutukan negeri ini dengan pihak luar, jangan berikan mahkota di kepalamu kepada orang/pendatang maka kamu beserta keluargamu kerabatmu dan Baluwu Peropa akan hancur binasa.

Setelah ucapan sumpah pertama yang dilakukan oleh *Bonto Pata Limbona*, Bontona Kalau dan Bontona Waberongalu menyerahkan kain ganti. *Pata Limbona* memakaikan kain tersebut kepada calon Sultan, di ikatkan dasternya dan dikenakan bajunya. Sultan hanya menerima apa yang diperbuat oleh *Pata Limbona* kepadanya. Selesai acara mandi rombongan *Pata Limbona* dan rombongan lainnya pulang ke rumah masing-masing untuk mempersiapkan diri menghadiri aara pelantikan yang akan diadakan dalam masjid Agung Keraton Buton.

Pata Limbona dan seluruh *Bonto Yinunca* dan Kampayia seluruhnya sebanyak 11 orang dan semua Belobaruga berkumpul kembali dirumah Botona Peropa. *Pata Limbona* mengenakan jubah dan batas-batasi mpalangi dan katambiade, setelah semua berkumpul berangkatlah rombongan tersebut kebaruga membawa Parinta kerajaan (lambang-lambang kekuasaan kerajaan). *Parinta* diletakan di tengah-tengah Baruga oleh Bonto yi Nunca dan Belo Baruga. Pada saat itu semua Pangka, dan para Bonto sudah berada di baruga, kecuali *Pata Limbona* dan Bonto Yi Nunca setelah melakukan perintah Bonto Pata Limboana pulang menuju Kamali.

Diperkirakan *Pata Limbona* sudah sampai tujuan, Bonto Ogena berkata kepada Sapati sebagai berikut; “*Jou Sapati, ara ea penemo kalawatina randana aena akamiiu*” sesudah Bonto Ogena berkata pada sapati,, berangkatlah 8 orang Bonto dan 8 orang Bobato seperti pada saat Kapoumba. Mereka bertugas membawa seluruh tamburu yang akan dibunyikan di kamali. Didepan kamali, sudah ada galangi. Ketika utusan tiba, serta calon sultan ke luar istana dengan mengenakan seragam serba putih ssaat itu Sultan tidak mengenakan jambe kecuali pegawai sarah masjid.

Pata Limbona mengapit calon Sultan dengan pedang terhunus selama rombongan tersebut menuju tempat pelantikan dan di iringi oleh rombongan tamburu dengan posisi 5 orang berada di depan dan 6 lainnya berada di belakang iringan sultan. Sepanjang perjalanan tamburu dibunyikan. Ketika rombongan Sultan tiba di tempat tujuan rombongan langsung masuk dalam masjid yang telah disediakan. Ketika rombongan sultan telah berada dalam masjid anggota utusan kalawati yang diwakili oleh Bontona Gama turun dari masjid dan melapor kepada Bonto Ogena; “*Jou Bonto Ogena, yi masigimo randanaa aena opua miiu*”. Bonto Ogena setelah mendapat laporan dari Bontona gama, langsung menuju masjid dengan mengajak kapitalao; “*jou kapitalao,takakaaromo temanga andimiiu aku miiu*”. Serentak kedua Kapitalatao menggunakan tandaki dan berjalan bersama seluruh Bobato semua memakai pedang terhunus sedang, kedua kapitalao setibanya di masjid langsung mengapit pintu masuk masjid dengan pedang terhunus.

Sholat jumat pun dilaksanakan dengan judul khotbah “*Khalakal arwah*”. Selesai salam calon Sultan diantar kebawah kaki mimbar dan terus duduk tahiyat

awal. Masuklah pelantikan tahap awal yang dilaksanakan dalam masjid agung keraton. Payung kerajaan diambil dan dibuka dengan salam masjid, diputar di atas kepala calon Sultan yang dilaksanakan oleh turunan atau cucu “Saida Raba”.¹⁰⁶ Payung tersebut diputar sebanyak hingga 9 kali dan peutar payungnyapun bertahiyat awal. Sambil memutar payung, petugas payung berkata : “*bakeakakomo maolaona yiluyi rahamaatimu bea peluakamo walakaa kaomu*”. Bersamaan dengan pemutaran payung, salah seorang yang bertugas dari turunan Saidi Raba dari Sapati Waolima menulis kalimat pelantikan yang sekaligus merupakan sumpah bagi Sultan yang ditulis pada tulang belikat Sultan.¹⁰⁷ Pada acara penulisan sumpah di tulang belikat Sultan boleh mengusulkan siapa yang beliau inginkan untuk menulis sumpah pada bagian belakang Sultan.¹⁰⁸ Setelah selesai acara penulisan, acara diteruskan dengan pembacaan “doa selamat”.

Tahap pelantikan kedua, Sultan bersama rombongan keluar dari dalam masjid menuju batu popaua yang letaknya di depan masjid keraton. Di tempai ini, sultan diputari payung kerajaan oleh *Pata Limbona* yang disaksikan langsung oleh seluruh rakyat dan seluruh aparat kesultanan. Dalam proses pemutaran payung pada saat itu pula Sultan disumpah. Bunyi sumpah tersebut sebagai berikut:

“Rango, La Ode ! Rango, Laode ! Rango, La Ode ! Oouncuramikimea o polangomu te pusakamu, I Syarana Wolio. Dangiapomini uembeli anaana mangaruna imajilisina Syarana Wolio,. Atanaduakako, asipoko, kauponganga, atanduakako waa, indamo, umangau,, soamangaumo, matanduakako,. Asipoko racu, indamo, umalango, soamalangamo, masipoko, asipoko buku, indamo

¹⁰⁶ Saida Raba orang yang ditugaskan untuk mengiringi calon sultan Buton menggukan payung, dan saida raba adalah turunan dari sapati yang menjabat ketika sultan sebelumnya

¹⁰⁷ Moersidi., 1988. Undang-undang Dasar Pemerintah Kerajaan Sendiri di Buton. BauBau. Hlm 8

¹⁰⁸ Moersidi. *Lot.cit*

*atongkoko, soatongkomo mosipoko, ingko soomo tangi te potawa imataumu I tanaa sii, La Ode !*¹⁰⁹

Acara selanjutnya setelah pelantikan dilanjutkan dengan ucapan selamat oleh seluruh jajaran majelis yang ada di pemerintahan kesultanan kepada sultan yang dilakukan di dalam baruga. Empat hari setelah pelantikan Bonto *Pata Limbona* mengadakan leongi (kunjungan) ke istana tepatnya tengah malam dalam rangka peyerahan hak, kewajiban dan tanggung jawab sultan. Pada waktu yang bersamaan juga di datangkan juga 12 orang gadis-gadis pilihan dari masing-masing Kadie yang bertugas melayani keperluan Sultan. Dengan demikian berakhirlah tahap pemilihan dan pelantikan Sultan.¹¹⁰

5.3 Struktur Pemerintahan dan Pertahanan Kesultanan Buton

Untuk mengetahui herarki pemerintahan Kesultanan Buton menurut Undang-undang Murtabat tujuh adalah sebagai berikut :

5.3.1 Pemerintah Pusat

Syarana Wolio adalah pemerintahan pusat yang berada dalam lingkungan ibu kota kesultanan di Benteng keraton Buton. pemerintah pusat meliputi unsur-unsur yaitu; Sultan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan kesultanan dibantu sebuah cabinet yang disebut *Paso Pitumatana, Siolimbona*, dan *Syarana Hukumu* serta staf khusus Kesultanan. Dewan cabinet (*paso Pitumatana*) yang membantu tugas-tugas sultan dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri atas sultan, sapati, kenapulu kapitalau, Bonto Ogena, *lakina sarawolio*, dan *lakiana baadia*.

¹⁰⁹Van den Bergh. 1939; hlm 527

¹¹⁰Sumber proses tahapan pelantikan Sultan yang peneliti paparkan sebagian besar diambil dari hasil wawancara dengan Nurhayati dan Niampe. November 2014. dan di parafrase oleh peneliti

5.3.1.1 Sultan

Sultan memiliki gelar *khalifatul khamis* yang berkewajiban menilik dengan mata hatinya, menjadi penuntun dan pemimpin dalam dan diluar kerajaan, menjadi bapak rakyat didalam kesultanan, memegang keadilan, memperbaiki adat yang bertujuan untuk kebaikan. Pedoman sultan dalam bertindak adalah “*fa aalun lima yuridu*” artinya aku berbuat sekehendakku. Namun demikian sultan diberi kewenangan dalam syarat yang berjumlah 12 butir yang biasa disebut “kamondo sapulu ruanguna”. ketentuan yang mengatur kewenangan sultan terbagi dalam tiga bagian yakni :

Pertama, Syara Jawa (adat jawa) berupa ; payung kain, permadani atau tikar, gambi soda atau tempat sirih dan piring dan somba (sembah)¹¹¹. Keempat pasal tersebut merupakan symbol penghasilan sultan, yakni berupa : prahu yang terdampar, rantai atau barang yang terdampar dipungut oleh rakyat, ambara (semacam hasil laut) dan ikan besar yang dipikul oleh dua orang.

Kedua, Syara Pancana, meliputi Bante, Kabutu, Pomua, Kalonga. Penghasilan ini merupakan hasil perkebunan yang disebut antona tana (isi tanah) meliputi popene (orang yang membawa keberatan kepada sultan) susuna karo (pengganti diri), talitali (tambahan uang denda), dan karambau (kerbau dengan harga 120 boka).

Ketiga Syara Wolio : *isalaaka* (yang menjadikan bersalah), *ikodosaaka* (yang menjadikan berutang), *ibatuaka* (yang menjadikan buda) dan *imateaka* (yang menjadikan mati). Sedangkan isi *Syarana Wolio* adalah belo bamba laki-laki 8 orang, belo baruga perempuan 12 orang, pembantu sultan dari anak pejabat

¹¹¹Zaenu. 1985. 1985. *Buton Dalam Sejarah Kebudayaan*. Surabaya. Suradipa. hlm 23-24

dalam lingkungan keraton (*susua wolio*), dan pembantu sultan dari luar keraton (*susua papara*)

Adapun lembaga-lembaga kesultanan yang berada dipusat pemerintahan yang bertugas membantu sultan masing-masing adalah sebagai berikut :

- *Sapati* dalam pemerintahan *Syarana Wolio*- Buton- bertindak sebagai Ketua Dewan Kabinet atau Perdana Menteri. Jabatan ini untuk golongan kaomu (bangsawan) berfungsi a dolango- melindungi sultan dan rakyatnya, a salambi- menguatkan hasil keputusan, menegakkan hukum dan menjalankan fungsi pada peradilan. Kedudukan dalam Dewan *Syarana Wolio* Buton sebagai anggota.
- *Kenepulu*, jabatan ini untuk golongan kaomu (bangsawan), tugas utamanya adalah menampung keluhan rakyat (aspirasi rakyat) kemudian diteruskan kepada Dewan Syara. Kedudukan dalam Dewan Syara Wolio sebagai anggota.
- *Kapitalau* jabatan ini sama dengan panglima pertahanan, jabatan ini dijabat oleh dua orang yaitu Kapitalau Matanaeo dan Kapitalau Sukanaeo dari golongan kaomu tugas utamanya adalah pertahanan dan keamanan yaitu menjaga wilayah Kesultanan dari gangguan pihak-pihak yang ingin menyerang Kesultanan Buton. dalam Dewan Syara Wolio keduanya adalah sebagai anggota.
- *Bonto-Ogena*- Menteri Besar, dijabat oleh dua orang yaitu: Bonto Ogena Matanaeo dan Bonto Sukanaeo, keduanya adalah jabatan untuk golongan walaka. Dalam Dewan *Syarana Wolio* bertindak sebagai anggota sedangkan dalam Dewan *Siolimbona* bertindak sebagai ketua Dewan Legislatif. Tugas utamanya dalah mengawasi dan memajukan kesejahteraan rakyat serta memperhatikan usul dari kehendak rakyat.
- *Lakina agama* (kadhi), jabatan ini mengurus masalah-masalah keagamaan dalam kesultanan. Jabatan ini untuk golongan kaomu, kedudukan dalam *Syarana Wolio* sebagai anggota. Sedangkan dalam lembaga keagamaan dia mendapatkan gelar syarana hukumu adalah sebagai kepala lembaga atau lakina agama.
- *Lakina sorawolio dan lakina Baadia*, adalah kepala wilayah- raja daerah khusus adalah yang diberikan kepada golongan kaomu sebagai penguasa daerah khusus tersebut. tugas utamanya dalah melancarkan pelaksanaan pemerintahan mengawasi keamanan dan ketrentaman umum. Keduanya diberi hak otonom untuk mengatur rumah tangga daerahnya.

5.3.1.2 *Siolimbona*;

Sio dalam bahasa Buton berarti Sembilan, sedangkan limbo berarti kampung/Kadie. *Bonto Siolimbona* adalah Sembilan kepala wilayah pemerintahan daerah. Lembaga ini dapat dipandang sebagai lembaga legislative atau DPR yang terdiri atas Sembilan orang. Jabatan ini diberikan kepada golongan walaka yang oleh Bonto Ogena (Menteri Besar). Lembaga ini juga termasuk dari anggota *Syarana Wolio* yang bertugas (1) mengangkat dan menetapkan dan bahkan memecat pejabat negara seperti; Sultan, Sapati Kenepelu, Kapitalau, Bonto Ogena dan anggota paso pitumatana serta pejabat pejabat lainnya; (2) bersama sultan dan paso pitumatana menetapkan undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah lainnya; (3) memberikan persetujuan terhadap adanya Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang digunakan oleh pemerintah kesultanan.

Tugas lain yang diemban lembaga ini adalah secara bersama-sama dengan Dewan Kabinet Paso Pitumatana mengurus dan menyelesaikan masalah-masalah peradilan selaku Badan Yudikatif kesultanan.

5.3.1.3 *Sarana Hukumu*

Sarana Hukumu (Syara Kidi/ perangkat Mesjid Agung Keraton), adalah yang berkewenangan dalam pelayanan dan pengawasan terhadap masalah keagamaan dan masalah-masalah pelaksanaan ibadah. Lembaga (Badan Syarana Hukumu) ini dipimpin oleh Lakina Agama. Untuk dapat memperlancar tugas-tugas operasional rumah tangga kesultanan maka dibentuklah staf pembantu-pembantu khusus yaitu:

Staf khusus kesultanan ini terdiri dari tiga bagian antara lain meliputi:

- a. Bonto Yinunca staf istana sehari-hari bertugas membantu kelancaran tugas-tugas sultan, memberikan usul dan pertimbangan kepada sultan, mengawasi tindakan dan perbuatan sultan dalam menjalankan roda pemerintahan. Jabatan Bonto inunca diberikan kepada kaum walaka yang beranggotakan 11 orang, dipimpin oleh Bontona Gampi Karo. Staf khusus istana ini beranggotakan Bontona Dete, Bontona Katapi, Bontona Waberongalu, Bontona Kalau, Bontona Wajo, Bontona Sombamarusu, Bontona Litao, Bontona Tanailandu, Bontona Galampa dan dua orang Bontona Gampikaro mataneo dan Bontona Gampikaro sukaneo. Kesebalas anggota Bonto Inunca, ada beberapa Bonto yang diberi tugas tambahan dan tugas ini mempunyai arti penting bagi kesultanan, antara lain adalah: (1) Bontona Gampikaro yang diberi tugas tambahan adalah mengawasi para petugas pengawal istana, mengawasi benda-benda pusaka peninggalan kesultanan yang ada di dalam istana, dan member informasi atau penghubung antara sultan dengan aparat kesultanan; (2) Bontona Dete, dan Bontona Katapi, tugas khususnya adalah penasehat pribadi sultan, mengawasi tindakan-tindakan sultan serta turut mempertanggungjawabkannya, dan selaku pelindung dan penjaga keselamatan pribadi sultan.
- b. Bontona Lencina Kanjarwari, staf khusus yang berkaitan dengan tugas-tugas tertentu. Jabatan ini diberikan kepada golongan walaka yang beranggotakan 8 orang, terdiri dari Bontona Silea, Bontona Jawa, Bontona Lanto, Bontona Waborobo, Bontona Lantogau, Bontona Pada, Bontona Kancodaa, dan Bontona Barangka. Tugas-tugas tertentu yang diberikan kepada Bontona Lencina Kanjarwari adalah mengawasi amanah kesultanan yang berkaitan dengan falsafa Binci-binciki kuli yang terdiri dari empat pasal dan penegakkan pokok-pokok adat yang menjadi kewajiban bagi setiap pejabat kesultanan, yakni: syara (undang-undang, tuturaka(peraturan atau ketentuan), bitara (peradilan), dam gau (politik/musyawahar).
- c. Staf khusus lain yang langsung berada di bawah sultan adalah; juru basa (juru bahasa) yang bebrtugas secara protokoler sebagai penerjemah atau juru bahasa sultan. (2) sabandara, bertugas menagi pajak pelabuhan (bea cukai) dan mengawasi pelaksanaan bongkar muat barang di pelabuhan Bau-Bau; (3) Talombo pembantu khusus Bonto Ogena dalam menyampaikan berbagai informasi atau pengumuman penting terhadap kesultanan; (4) Pangalasa yakni pembantu khusus Bonto Ogena yang berhubungan langsung dengan pembayaran pajak dari rakyat terhadap pemerintah kesultanan; dan (5) wati, pembantu khusus kesultanan yang berhubungan dengan bidang tugas menunggu perintah atau undangan yang

disampaikan oleh pangalasa menterinya atau didatangi secara langsung oleh talombo.

5.3.2 Pemerintah Kadie (*Syara Kadie*)

Pemerintah Kadie adalah bagian wilayah yang mempunyai hukum adat dan majelis tersendiri yang biasanya disebut *Syarana Kadie*. Kedudukannya dalam pemerintahan mempunyai hak otonom tersendiri. Kadie yang dapat diartikan sebagai wilayah inti kesultanan atau bagian wilayah pemerintahan yang terdiri atas 72 bagian wilayah pemerintahan di masa kontemporer saat ini Kadie lebih dikenal dengan Kecamatan/Desa. Perinciannya adalah 40 Kadie dijabat oleh golongan kaomu dengan sebutan Bobato, namun dalam penamannya lebih dikenal dengan nama Lakina. Sedangkan 30 Kadie lainnya di jabat oleh golongan walaka dengan nama jabatan Bonto. Ketujuh puluh Kadie tersebut berada di luar ibukota kesultanan. Sedangkan dua Kadie lainnya berada didalam ibukota yaitu Lakina Sorawolio dan Lakina Baadia. Ketujuh puluh Kadie yang dijabat Bobato dan Bonto tidak berkedudukan langsung sebagai pejabat tinggi pada masing-masing Kadie tetapi hanya berkedudukan didalam fungsi pengawasan pada pelaksanaan pemerintah pada tingkat Kadie masing-masing.

Pemerintahan *Syarana Kadie*, diberi kekuasaan penuh oleh pemerintah pusat serta berhak mempertahankan tanah dan wilayah kekuasaannya. Berkewajiban mengatur penggunaan tanah, menguasai hutan dan pengambilan hasil hutan. Pejabat Bobato dan Bonto yang menerima mandate dari pemerintah pusat diwilayah tersebut ditugasi bertindak sebagai pengawas pemerintah ditingkat wilayah. Jabatan ini sekaligus mengemban tugas dan amanah sebagai

wakil Sultan pemerintah pusat di daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas kesultanan yang terjadi ditingkat wilayah.

Berdasarkan pertimbangan luasnya wilayah dan banyaknya jumlah Kadie yang ada sehingga dibentuk dua bagian besar sistem pengkoordinasian yang langsung membawahi para Bonto dan Bobato. Pengkoordinasian wilayah yang terbagi atas dua bagian besar tersebut dipimpin oleh dua orang Bonto Ogena yaitu Bagian Barat Pale Sukanaeo dan Bagian Timur Pale Matanaeo. Oleh karena itu sistem pemerintahan Kadie memiliki dewwan syara masing-masing sebagai mana yang terdapat pada pemerintahan pusat.

Kepala-kepala pemerintahan Kadie yang dijabat bobato dan Bonto antara lain : 1) Lakina Tobe-tobe, 2) Lakina Batuaga, 3) Lakina Lasalimu, 4) Lakina Ambeua, 5) Lakina Kumbewaha, 6) Lakina Kamaru, 7) Lakina Kalende, 8) Lakina Lawela, 9) Lakina Baruta, 10) Lakina Karoni, 11) Lakina Wasaga, 12) Lakina Kokalukuna, 13) Lakina Halimambo, 14) Lakina Todanga, 15) Lakina Lipumalanga, 16) Lakina Lambelu, 17) Lakina Takimpo,, 18) Lakina Sampolawa, 19) Lakina taaloki, 20) Lakina Bombona Wulu, 21) Lakina Wou, 22) Lakina Kamelanta, 23) Lakina Labalawa, 24) Lakina Boneage, 25) lakina Kundowa, 26) Lakina Lolibu, 27) Lakina Mone, 28) Lakina Imulu, 29) Lakina Wawoangi, 30) Lakina Bola, 31) Lakina Kambekambero, 32) Lakina Lowu—lowu, 33) Lakina Tumada, 34) Lakina Lea-lea, 35) Lakina Kaesabu, 36) Lakina Lakudo, 37) Lakina Kaluku, 38) Lakina Kambowa, 39) Lakina Lawele, 40) Lakina Burukene 41) Lakina Lia, 42) Lakina Lete, 43) Lakina lakologou, 44) Lakina Bumbu, 45) Lakina Pure, 46) Lakina Wance, 47) Lakina Pangkolou, 48) Lakina Kapota, 49) Lakina KAncina, 50) Lakina Labuandri, 51) Lakina Wasuamba, 52) Lakina



Labulusao, 53) Lakina Watumatabae, 54) Lakina Watulea dan 50) Lakina Wasilomata.¹¹²

Setiap pemerintahan Kadie mempunyai dewan Syarana Kadie, yang terdiri dari jabatan-jabatan ; Bonto, Parabale, Wati dan Pangalasa. Jabatan-jabatan ini apabila ditingkat pemerintah pusat dijabat oleh kaum Walaka, maka ditingkat Kadie jabatan-jabatan ini di isi oleh golongan Papara yang bertugas di wilayah masing-masing Kadie.

5.3.2 Pemerintahan Barata (*Syarana Barata*)

Barata merupakan salah satu bagian dari Kesultanan Buton sekaligus sebagai salah satu unsur dalam pemerintahan Kesultanan Buton. Sistem pemerintahan “Barata”¹¹³ yang disimbolkan sebagai perahu bercadik, maksudnya Kesultanan Buton bersama kerajaan-kerajaan sekutunya laksana sebuah perahu yang tidak gampang tenggelam dan terbalik oleh kekuatan angin yang akan menghancurkannya. Kesultanan Buton mempunyai wilayah Barata terdiri atas empat daerah, yakni Barata Muna, Barata Tiworo, Barata Kalisusu, dan Barata Kaledupa.

Keempat Kerajaan Barata ini dalam sistem pemerintahan dikenal dengan nama “*Barata Patapelana*” berfungsi sebagai negeri negeri sekutu, akan tetapi dalam pelaksanaan pemerintahan masing-masing Barata diberikan hak otonom. Setiap kerajaan Barata mengatur rumah tangga pemerintahannya sendiri berdasarkan undang-undang yang disepakati pemerintah “*Syarana Barata*” dan

¹¹² Zuhdi, 1999. *Labu Wana Labu Rope, Sejarah Buton Abad XVII-XVIII*. Jakarta. Disertasi Pascasarjana UI

¹¹³ Barata bisa dikatakan juga Kerajaan yang berdiri dalam kerajaan (aliansi kerajaan/kerajaan tundukan) atau istilah modernnya negara federal negara bagian dalam sebuah negara. Barata sendiri mempunyai kewenangan layaknya sebuah kerajaan mandiri.

menjadi pusat pertahanan luar Kesultanan Buton. Segala perintah yang disepakati *Syarana Barata* dimaksudkan dibuat dan ditetapkan oleh syarat kerajaan dengan memperhatikan keadaan dari Barata itu sendiri.

Ada dua aturan yang diemban oleh kerajaan Barata sehubungan dengan kekuasaan pemerintah pusat, yakni koordinasi pelaksanaan hukum pemerintahan yang ditangani oleh Lakina Barata dan aturan pelaksanaan hukum militer yang langsung ditangani oleh Lakina Suludadu di Barata Kaledupa, Kapitaraja di Barata Muna, menteri Kompanyia di Kulisusu, dan Sapati di Tiworo.¹¹⁴

Masing-masing Barata mempunyai sistem birokrasi tersendiri berdasarkan Undang-Undang Barata yang diundangkan kembali tahun 1840.¹¹⁵ Tetapi birokrasi pemerintahan Barata tidak lengkap seperti susunan jabatan pada *Syarana Wolio*- Kerajaan Buton, kecuali jabatan-jabatan yang ada di *Syarana Barata* digabungkan semuanya dari keempat Barata yang ada barulah unsure-unsur jabatan yang ada di Barata sama dengan di kerajaan pusat (Kesultanan Buton).

Struktur birokrasi *Syarana Barata* masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Barata Muna
 1. Lakina Wuna :Raja Muna
 2. Kapitaraja 2 orang
 3. Menteri besar 2 orang
 4. Intarano bitara 1 orang
 5. Fataghoerano 4 orang masing-masing
 - a. Mieno T ongkuno
 - b. Mieono Lawa
 - c. Mieno Kambawo
 - d. Mieno Katobu

¹¹⁴ Haliadi. 2000. Buton Islam dan Islam Buton. Yogyakarta. Tesis Pascasarjana UGM. hlm 132-133

¹¹⁵ Undang-undang Syarana Barata, No.323:8 lembar

- b. Barata Tiworo
 - 1. Lakina Tiwono
 - 2. Sapati
 - 3. Mieno lasiampamu
 - 4. Mieno lawa
 - 5. Sabandara
- c. Barata Kalingsusu
 - 1. Raja Kalingsusu
 - 2. Kenepulu
 - 3. Bontona kompania
 - 4. Bontona Kancua-cua
 - 5. Kapitana Lipu
- d. Barata Kaledupa
 - 1. Lakina Kaledupa
 - 2. BontoOgena 2 orang
 - 3. Menteri Kiwolu
 - 4. Menteri Tapa'a
 - 5. Laikan Suludadu 2 orang

Secara umum tugas kewajiban anggota *Syarana Barata* sama dengan tugas anggota syarat kerajaan, selama tidak keluar dari aturan-aturan yang telah ditetapkan di wilayah kekuasaannya. Tetapi dalam hal tata karma di dalam kerajaan Lakina Barata tidak disembah seperti halnya Sultan Buton. Tugas utama kerajaan Barata adalah bertanggungjawab terhadap pertahanan keamanan dan kemananan di wilayah kekuasaannya masing-masing. Setiap kerajaan yang tergabung dalam Barata ini secara mandiri mengusahakan sistem pertahanan yang kuat. Sedangkan pertahanan secara kolektif apabila anggota salah satu Barata tidak dapat lagi menghadapi musuh barulah meminta kepada pemerintahan pusat di Kesultanan Buton. Atas pemerintah Kapitalau di Kesultanan Buton semua anggota Barata sebagai inti kekuatan kolektif memberikan bantuan kepada salah satu kerajaan yang sedang berperang menghadapi musuh. Dalam hal ini Panglima

tinggi Barata yang mengendalikan komando ada di Kapitalau Kesultanan Buton, sedangkan kerajaan kerajaan Barata bertugas mengamankan wilayah kerajaannya.

Pertahanan Barata yang identik dengan pertahanan rakyat semesta yang dianut oleh pemerintah Republik Indonesia, adalah sebagai ‘sistem pertahanan empat penjuror berlapis dari empat lapis sesudah sistem pertahanan *Matana Soromba* dan *Pata Limbona*’.¹¹⁶ Sebagai pertahanan lapis keempat musuh sebelum masuk maka lebih dahulu berhadapan dan menghancurkan musuh sebelum masuk dalam wilayah inti Kesultanan Buton. Menurut teori strategi perang modern pertahanan Barata adalah suatu “sistem pertahanan secara menyerang yaitu menjaga tabal batas terluar dari wilayah kedaulatan negara dengan mengawali dan mengatasi musuh serta menghancurkan sejak dari tapal batas wilayah kedaulatan”.¹¹⁷

Dalam *Syarana Barata* juga diatur tentang kewajiban kerajaan Barata untuk membayar pajak di dalam adat *Syarana Barata* disebut dengan jawana Barata yang disetorkan kepada pemerintahan pusat di ibu kota Kesultanan Buton. Kewajiban jawana Barata ini masing-masing kerajaan Barata tidak sama. Ketentuan ini diatur dalam undang-undang *Syarana Barata*, masing-masing sebagai berikut: Barata Kaledupa sebesar 80 boka dan kalau tidak disanggupi dapat diganti dengan 1 orang budak dan 24 kain langkobida. Pajak yang berasal dari kedua kerajaan Barata ini (Kaledupa dan Kalisusu) menjadi penghasilan sultan, tidak termasuk Dewan Kesultanan menerima beban pajak 40 boka atau dapat diganti dengan 1 orang budak, dan Barata Tiworo sama dengan Barata

¹¹⁶ Lihat Said. *Op.cit.* hlm 49

¹¹⁷ *Ibid.* hlm 50

Muna. Pajak (weti) dari kedua kerajaan Barata ini menjadi penghasilan Dewan *Siolimbona*.¹¹⁸ Selain ketentuan pajak, diatur pula kunjungan para pejabat Kesultanan Buton di wilayah Barata, khususnya Kapitalao dan pengawasan sultan. Bagi rakyat dan aparat atau pembesar kerajaan di wilayah Barata melakukan pelanggaran harus di hukum sesuai dengan kesalahannya. Mulai dari hukuman ringan seperti diberi sanksi, di pecat sampai hukuman gantung.

Pemerintahan Barata juga mengatur perkawinan antara kerajaan yang tergabung dalam Barata baik antara orang-orang dari Kesultanan Buton dengan keempat kerajaan maupun sebliknya. Hal ini merupakan satu politik dan strategi jangka panjang bagi Kesultanan Buton untuk memperluas jangkauan pengaruhnya keseluruhan wilayah termasuk kerajaan-kerajaan yang tergabung dalam Barata.

5.3.4 Sistem Pertahanan dan Keamanan

Kesultanan Buton tergolong negara maritim dengan hamparan pulau kecil maupun besar dimana wilayah perairan lebih dominan dibandingkan dengan daratan. Untuk dapat mewujudkan kerangka keamanan yang ideal terhadap berbagai ancaman yang datang dari luar, merupakan motivasi dasar dalam membentuk sistem pertahanan dan keamanan negara. Dalam proses perjalanan diketahui bahwa bangsa ini membangun sebuah sistem pertahanan yang disebut dengan “Sistem pertahanan empat penjuru berlapis,¹¹⁹

Kesultanan Buton selalu mengatur struktur pemerintahan, juga sangat konsisten mengatur dan memperhatikan sistem pertahanan kesultanan. Sistem

¹¹⁸ Haliadi. 2000. *Buton Islam dan Islam Buton: Islamisasi, Kolonialisme, dan Sinkretisme*. Yogyakarta. Tesis. hlm.132-133

¹¹⁹ Zuhdi. *Op.cit.* hlm 56

pemerintahan tersebut diatur dalam *Syarana Kompanyia* sebagai sistem militer Kesultanan Buton yang memakai sistem pertahanan empat prajurit berlapis.¹²⁰ Sistem pertahanan Kesultanan Buton menganut prinsip strategi menyerang yaitu menjaga wilayah kedaulatannya pada tapal batas terluar. Lapisan pertama dan utama adalah di empat Barata (kerajaan otonom dibawah pengaruh Buton). Pertahanan lapisan kedua adalah pertahanan *Pata Matana Soromba*¹²¹, pertahanan lapisan ketiga disebut pertahanan *Pata Kambarina*¹²², dan pertahanan lapisan keempat pertahanan *Pata Limbona* (empat kampung) berpusat di dalam Benteng Keraton Wolio.

Secara fisik benteng Keraton Kesultanan Buton yang kokoh dan kuat terdiri dari susunan batu-batu cadas dibangun di atas bukit Wolio. Benteng sebagai simbol Kotaraja Wolio itu memiliki 12 pintu ditambah satu pintu rahasia dikelilingi benteng-benteng kecil di dalamnya sebanyak 21 benteng yang disebut Baluara. Benteng pertahanan Kesultanan Buton ini menjadi simbol pertahanan dan juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan atau Kota Istanah Keraton Wolio. Untuk mengamankan teritorium dan kedaulatan pemerintahannya membangun sistem pertahanan rakyat semesta secara kolektif adalah sebagai berikut:

Pertahanan lapisan pertama adalah Barata Pata Palena (empat kerajaan) terdiri atas Barata Kaledupa, Barata Kalisusu, Barata Muna, Barata Tiworo. Keempat kerajaan baru kecil ini menunjang sistem pertahanan Kesultanan Buton yang paling luar atau sebagai lapisan pertama. Tugas Barata sebagai kekuatan

¹²⁰ Said D. *Lot.cit*

¹²¹ Pata Matana Soromba Istilah dalam pertahanan Kesultanan Buton yaitu empat daerah mata angin (Barat,Timur,Utara dan Selatan)

¹²² Pata Kambarina Istilah dalam pertahanan Kesultanan Buton empat benang menunjang mata jarum, juga berfungsi sebagai logistik

pertahanan yang pertama menghadang musuh yang mengancam kedaulatan bersama. Pertahanan dan keamanan secara kolektif ini dibawah kendali komando Kapitalau Kesultanan Buton.

Secara politik wilayah Barata merupakan negeri asal yang otonom dalam wilayah pemerintahan Kesultanan Buton yang diatur dalam Undang-Undang *Syarana Barata* Tahun 1840 pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Idrus Qaim ad-Din. Dalam perspektif keamanan pertahanan Kesultanan Buton, wilayah Barata merupakan basis pertahanan paling luar sebelum *Matana Sorumba*, *kambari pata anguna*, dan *Pata Limbona*. Tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh kerajaan Barata masing-masing sebagai berikut; (1) teritorium wilayah pertahanan Barata Muna menjaga dan mengawal pertahanan bagian utara, (2) teritorium wilayah pertahanan Barata Kaledupa bertanggungjawab atas keamanan Kesultanan Buton dari bagian selatan, (3) teritorium wilayah pertahanan Barata Kulisusu menjaga bagian timur dan (4) teritorium wilayah pertahanan Barata Toworo menjaga musuh yang datang dari arah wilayah barat.

Pertahanan lapisan pertama ini berfungsi sebagai penyeimbang dalam menopang ataupun mendukung jalannya sebuah sistem pertahanan Kesultanan Buton. Simbol penggunaan istilah “Barata” adalah diambil dari perumpamaan sebuah perahu yang dijumpai pada masyarakat Buton disebut jarangka. Perahu tersebut kedua belah sisinya terdapat sebatang kayu atau bambu yang berfungsi sebagai sayap dipergunakan sebagai penyeimbang atau penahan agar perahu tidak mudah tenggelam atau terbalik dari terpaan angin dan gelombang ketika sedang berlayar.

Lapisan kedua, disebut *pata matana soromaba* (empat mata jarum). Terdiri atas empat komponen yang merupakan lascar pilihan dari 70 *Kadie* yang ditempatkan sebagai pertahanan inti dalam wilayah Kesultanan Buton. Keempat wilayah tersebut adalah:

- a. Laskar (*Matana Soromba*) Lasiompu, yang bertugas mengawasi dan mempertahankan territorial dari serangan musuh yang datang dari arah Barat Kesultanan Buton.
- b. Laskar (*metana soromba*) Lambusango, yang diberi tugas mengawasi dan mempertahankan territorial yang akan mengganggu kedaulatan Kerajaan Buton dari arah Timur.
- c. Laskar (*Matana Soromba*) Lacumotobe, bertugas dan tanggungjawab mengadakan penjagaan dan mengawasi musuh yang akan datang dari arah utara Kesultanan Buton.
- d. Laskar (*Matana Soromba*) Lapandewa, bertugas mengadakan pengawasan dan penghalauan musuh yang mengganggu keamanan yang datang dari sebelah selatan Kesultanan Buton.

Pertahanan lapisan pertama, disebut Patalimbona (empat kampung). Pertahanan ini berpusat dan dikendalikan di dalam benteng Keraton Wolio sebagai ibu kota Kesultanan Buton. Keempat pusat pertahanan itu adalah: kampung Baaluwu, kampung peropa, kampung Barangkatopa, dan kampung Gundu-Gindu, yang masing-masing dipimpin oleh searang banto, yakni: Bontona Baluwu, Bontona Peropa, Bontona Gindu-Gundu dan Bontona Barangkatopa. Patalimbona merupakan pertahanan inti yang berpusat di dalam Benteng Kraton atau Ibu Kota kesultanan.

Pertahanan Kesultanan Buton ini, ketika itu dipandang sangat efektif dalam menangkal berbagai bentuk ancaman yang datang dari luar. Sistem ini

disesuaikan atas pertimbangan geografis yang dimiliki Kesultanan Buton dengan memperhatikan kondisi alam terdiri atas pulau-pulau yang dikelilingi oleh Laut Seram, Laut Banda, dan Laut Flores dan diampit oleh dua kerajaan besar yang saling memperebutkan wilayah kekuasaan Kesultanan Buton. Keutuhan wilayah dengan menerapkan sistem pemerintahan desentralisasi dan otonomi menjadi suatu catatan sendiri yang turut menghantarkan perjalanan sejarah kejayaan Kesultanan Buton sampai pada era terintegrasinya dalam negara kesatuan RI. Keberhasilan dalam mengelola pemerintahan dan menjaga kedaulatan negara yang pernah dipraktikkan di Kesultanan Buton semestinya dijadikan sebagai salah satu bahan kajian terhadap strategi pertahanan dan keamanan dewasa ini agar dapat meminimalkan potensi konflik yang mengarah pada disintegrasi bangsa Indonesia.

5.4 Masuknya Ajaran Martabat Tujuh

Martabat Tujuh adalah bagian dari salah satu cabang ilmu tasawuf yang mengkaji tentang pecipta dan yang dicipta (“asal mula ada hingga tiada dari asal ‘zat’ kembali ke asal”) salah satu tokoh besar dunia Martabat Tujuh adalah Ibn Arabi

Tujuh strata martabat ibn Arabi yaitu¹²³;

1. Martabat Ahadiyya (zat yang mutlakk dan tak dapat diraba)
2. Martabat Wahadiyya (Realitas dari pada segala realitas)
3. Martabat Wahda (realitas jalan atau realitas pengenalan obyek dari realitas pertama), ketiga strata ini digolongkan dalam aspek metafisis.
4. Martabat Arwah (RohArwah)
5. Martabat Misal (baying-bayang segala bentuk)

¹²³ Tarafu. 1996. *Martabat Tujuh Dayanu Ikhsanuddin*. Buton. hlm 68

6. Martabat Ajsam (bentuk segala makhluk maupun tumbuhan), ketiga strata ini di golongkan dalam aspek mistis
7. Martabat Insan (manusia sempurna). Strata ketujuh ini digolongkan dalam aspek insani.¹²⁴

Pada abad ke-2, masyarakat kaufah dan basrah sudah mengenal ajaran Martabat Tujuh, jauh sebelum Bagdad mengenal ajaran Tasawuf (3 Hijriah). Pada abad ke-3 H inilah ajaran Tasawuf berkembang di Bagdad hingga ke Persia, Mesir, Syiria, Jazirah Azab, India sampai akhirnya ke Indonesia. Ajaran Tasawuf di Indonesia dibawah oleh para pedagang dari Gujarat melalui Malaka pada abad ke-15, sehingga menurut para orientalis, propagandaris Islam, agama Islam di Indonesia sudah dipengaruhi oleh aliran ajaran kebatinan India.¹²⁵

Beberapa tokoh ulama tasawuf di Indonesia diantaranya:

1. Amongraga dari Jawa
2. Hamzah dari Samudra Pasai
3. Laelangi dari Kesultanan Buton
4. Nuru'din al Raniri Sumatra Utara
5. Abdu'l Rau dari Sumatra Utara
6. Syams al-din dari samudra pasai

Amongraga dalam serai centini di dalam ajarannya kepada istrinya menjelaskan Murtabat Tujuh di ibaratkan bayi dalam kandungan sang ibu. Beliau mengatakan bahwa Martabat Wahidiyya, adalah alam terjadinya pertemuan manikem, kesatuan rasa wanita dan pria itulah Martabat Wahidiyya, belum memiliki arah tempatnya, bentuknya, warna, bau, rasa, belum memiliki tempatnya tetapi pasti adanya, nukat gaib yang berusaha empat puluh hari lamanya disebut ghaibul'I ghuyub alamnya adalah alam lahut tempatnya gelap gulita yaitu

¹²⁴ Hadiwijono. 1985. *Kebatinan Islam. Abad XVI*. Jakarta. Gunung Mulia. hlm 19-20

¹²⁵ Hadiwijono. *Lot.cit*

kegelapan hati. Empat puluh hari kemuddian terjadilah wahda, lalu ada lingkarannya yaitu 'kun' di malakut. Pada empat puluh hari yang ketiga keluarlah wahadiyya kun ayah, lalu ada darah berkumpul (alam jaburat menguasai keempat alam itu). Empat puluh hari lagi alam Misal sudah memiliki bentuk tetapi belum jelas dalam karyanya. Empat puluh hari yang keenam menimbulkan Ajsam yaitu ketika seluruh bentuknya sudah jelas, lelaki atau perempuan tetapi masih melekat. Empat puluh hari yang ketujuh disebut alam insan Kamil, martabat manusia sudah sempurna, sudah terpisah dari alam ajsam jadi umur martabat itu dua ratus delapan puluh hari.¹²⁶

Hamzah memulai dengan mengemukakan hal Allah yang sama dengan Allah yang diungkapkan dalam bukunya "Asrar Al Ariin", bahwa Allah adalah zat yang pertama, zat mutlak yang di tamsilkan sebagai "ut" Batiniyah (balur al-butun) laut yang dalam (balur aal-amiq) laut yang mulia (labalur al ulyan). Strata ini digolongkan dalam martabat Ahadiyya (Laa ta a'yun) tanpa suatu kenyataan belum memiliki hubungan apapun di luar Zatnya. Menurut Hamzah, Zat mutlak itu adalah "Huwa" Pangkat kedua ditafsirkan sebagai "gerak ombak" didalamnya terjadi peninjauan Zat atas dirinya sendiri dari laut yang disebut Ta'ayun awal, kenyataan pertama yang diciptakan oleh zat yang mutlak adalah cahaya yaitu Nur Muhammad (realitas Muhammadiyah), lalu Pangkat asap dan awan di dalamnya realitas yang terpendam berada sebagai suatu kesatuan yang kemudian membagi-bagi diri untuk mengalir kelaut ke dalam dunia gejala atau dunia fenomena. Pangkat hujan didalamnya realitas yang terpendam itu keluar karena perintah ilahi "kun", serta Pangkat sungai yang menggambarkan dunia yang konkrit.

¹²⁶ Lihat Nurhayati. Op.cit. hlm 88. Dikutip dalam Hudiwijono. 1985. *Kebatinan Islam. Abad XVI*. Jakarta. Gunung Mulia

Syams al-din menguraikan Pangkat-Pangkat atau martabat dari pengaliran ke luar zat yang mutlak itu adalah Ahadiyya. Ia berkata; dari pada azalu'l-azal datang kepada abadu'l-abad yaitu Ahadiyya, yang diterangkan sebagai Pangkat La ta'ayyun (tanpa pembeda-bedaan) dan yang adalah Pangkat keesaan yang abstrak, sesudah itu Pangkat wahda yaitu Pangkat pembeda-bedaan yang pertama (Ta'ayyun awal) dan yang adalah Pangkat kesatuan; lalu wahadiyya atau Pangkat pembeda-bedaan yang kedua (Ta'ayyun thani) dimana kesatuan ini terdiri dari hal yang jamak. Ke-4, alam Arwah yaitu Pangkat segala nyawa. Ke-, alam miitsal Pangkat segala rupa' ke-6, alam ajsam Pangkat segala tubuh atau dunia kausal dan trakhir, Pangkat insane yaitu Pangkat segala tubuh.¹²⁷

Murtabat tujuh Laelangi menjabarkan sebagai berikut :

1. Murtabat Ahadiyya adalah Zat Allah semata-mata tanpa sifat dan I'tibar oleh akal, sifat itulah yang disebut Alussauf Laa Ta'ayun artinya tanpa wujud atau kenyataannya sebab belum ada jalan akal untuk mengetahui Zat Allah kalau tiada dii'tibarkan sifat atau asma
2. Murtabat Wahdah, sifat Allah itulah yang disebut Ahlussauf: Ta'ayun awal artinya kenyataan yang pertama karena kenyataan yang pertama itulah permulaan akal, menjadi jalan untuk mengetahui Zat Allah terlebih dahulu mengenal sifatnya, baik sifat salbiah atau sifat ujud, semisal : Zat Allah bersifat adim bersiat baa dan sebagainya.
3. Murtabat Wahadiyah, asma Allah itulah yang disebut Ahlussauf; Ta,ayyun Thani artinya wujud atau kenyataan yang kedua, karena dengan kenyataan yang kedua ini akal bisa menjalani dan mengetahui Zat Allah dan akibat asma itulah yang menunjukkan zat Allah yang layak bersifat dalam zatnya umpamanya Allah bersifat samium dan basirin artinya Allah yang amat mendengar dan melihat, ketiga murtabat di atas bersifat Qadim dan ba, yang menjadikan ia dipermulaan dan

¹²⁷Lihat Nurhayati. *Op.cit.* hlm 90 kutipan dari Hadiwijono. 1985. *Kebatinan Islam. Abad XVI.* Jakarta. Gunung Mulia. Hlm 28-29

menjadikan ia dipenghabiskan atau kemudian ialah akal bukan zaman atau waktu.

4. Murtabat alam arwah, pokok permulaan keadaan sekalian nyawa, baik nyawa manusia maupun nyawa maahluk lainnya. Nyawa pertama yang diciptkan oleh Allah SWT adalah nyawa nabi Muhammad SAW. Karena itu disebut “abu wal arwah” artinya bapak semua nyawa. Dalam bahasa Buton disebut “lipa” artinya pergi atau keluar. Bila Allah menghendaki menghidupkan sesuatu tubuh di tempatkanlah dalam tubuh itu roh dan bila Allah sesudah menghendaki mematikan tubuh itu maka di keluarkannyalah roh itu. Matillah tubuh itu sedangkan roh keluar pergi dan kembali ke asalnya di alam gaib.
5. Martabat alam misal terciptanya misal atau bayangan semua tubuh mahluk yang dijadikan Allah. Jumlahnya di alam raya sangatlah banyak hanya Allah yang mengetahuinya.
6. Murtabat alam ajsam, sudah terwujud segala tubuh di alam raya di tempatnya masing-masing dan sudah dapat dicapai dengan panca indera. Karena itu disebut pula “alam syahadah”. Ajsam yang mula—mula diciptakan Allah berturut-turut adalah Arsy, Kursy, qalam, Lauh Makfud, tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi, dan jasmani yang mula-mula diciptakan Allah di bumi adalah Nabi Adam A.S, karena disebut “abu basyari” artinya bapak dari segala tubuh manusia.
7. Murtabat Alam Insan, itulah yang disebut dengan manusia. Ia disebut pula “insane kamil” atau manusia sebab sudah dilengkapi dengan roh dan jasad. Pangkat ini dinamakan “*Murtabatin Jamaah*” artinya murtabat yang menghimpun seluruh dalil yang menunjukkan jalan menuju kembali ke Zat Allah.

Jika dilihat dari ketujuh Murtabat ibn Arabi, dan dengan melihat beberapa uraian versi martabat tujuh dari para tokoh tasawu Indonesia, penulis dapat menyimpulkan bahwa deskripsi Murtabat Tujuh dari beberapa tokoh tersebut diatas ajarannya mengadopsi ajaran Murtabat Tujuh (tasawuf) Muhammad bin Ali

Ahmad bin Abdullah. Orang pertama yang membawa ajaran agama Islam di kerajaan Buton adalah seorang syekh yang bernama syekh Abdul Wahid berkembangsaan Arab. Sejak kedatangan beliau ajaran agama Islam mulai direalisasikan dari beberapa ajaran Islam yang diperkenalkan, ajaran tasawuflah yang banyak di gemari oleh masyarakat Buton.

Pada masa pemerintahan Sultan Buton ke-4, ajaran Tasawuf sangat berkembang pesat. Murtabat Tujuh menjadi landasan konstitusi Kesultanan Buton yang dibuat dimasa Sultan ke-4, mengingat pada masa pemerintahan sebelumnya sampai pada masa kepemimpinan Sultan ke -3, Kesultanan Buton belum memiliki dasar konstitusi tertulis sehingga membuat kondisi negara/Kesultanan Buton pada masa itu kurang stabil, maka pada masa Sultan Buton ke-4 terjadilah inisiatif untuk membuat sebuah konstitusi tertulis yang kemudian lebih dikenal dengan Undang-undang Murtabat Tujuh. Pada saat pembuatan Konstitusi tersebut, Sultan ke-4 dibantu oleh Syarif Muhammad, penyusunan Undang-undang Murtabat Tujuh berpedoman pada murtabat tujuh yang dibuatnya, juga berpedoman pada kedua puluh sifat Allah, pada alsafah Bhinci Bhinciki kuli dan pada al-quran serta, Al-Hadis.

Dalam sistem pemerintahan di masa Sultan ke-4, ketujuh Murtbat tersebut di tampilkan dalam struktur birokrasi pemeritahan pusat kesultanan yaitu:

- a. Murtabat Ahadiyya, ditampilkan sebagai kaum Tanailandu
- b. Murtabat Wahda, ditampilkan sebagai kaum tapi-tapi
- c. Murtabat Wahadiyya, ditampilkan sebagai kaum Kumbewaha
- d. Murtabat Arwah, ditampilkan sebagai Sultan
- e. Murtabat Misal, ditampilkan sebagai Sapati

- f. Murtabat Ajsam, ditamsilkan sebagai Kanepulu
- g. Murtabat Insan Kamil, ditamsilkan pada Kapitalao dan ditamsilkan pula sebagai masyarakat.

Pada sistem pemerintahan Kesultanan Buton, sultan bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Sultan dikatakan pula sebagai Khalifah (wakil Tuhan). Hal ini berpedomana pada Firman Allah “*Inni Jaailun fil ardhi khaliifatan*” artinya, sesungguhnya aku hendak jadikan seorang khalifah di bumi”.¹²⁸ Sifat dua puluh Allah, siffat ini dalam sistem pemerintahan Kesultanan ditamsilkan sebagai kewajiban dan sifat kelengkapan Sultan dan Sapati. Dari sifat kedua puluh sifat Allah, dua belas sifat menjadi alat perlengkapan Sultan dan delapan sifat menjadi kewajiban Sapati, dan jumlah Bonto pada Kesultanan Buton berjumlah 30 orang hal ini berpedoman pada jumlah Juz dalam Al-Quran. Lebih jelasnya dapat dilihat pada apasa 8 undang-undang Murtabat Tujuh.¹²⁹

Nilai falsafah *Bhinci-Bhinchiki kuli* menjadi sumber nilai dalam undang-undang Murtabat Tujuh yang diartikan melalui pomaa masiaka, popia, piara, pongka angkataka dan pomae maeka (*Sara Pataaguna*), serta nilai falsafah pengabdian terhadap negara yaitu ; *ainda-indamo arata somanamo karo, ainda indamo karo karo somanamo lipu, ainda-indamo lipu somanamo sara dan ainda-indamo sara karo somanamo agama*.¹³⁰ Nilai-nilai inilah yang dijadikan sebagai nilai yang terkandung dalam konstitusi Undang-undang Murtabat Tujuh yang dalam sistem pemerintahan kesultanan Buton dijadikan sebagai pedoman dalam

¹²⁸ Tertuang dalam Al-Quran. .Surah Al Baarah: 30

¹²⁹ Abubakar. 1999. *Majalah Budaya Buton “Wolio Molagi”*. Kendari: Yayasan Wolio Molagi. Hlm 77

¹³⁰ Kepentingan umum lebih penting dari harta benda, kepentingan negara lebih utama dari kepentingan pribadi, kepentingan pemerintah lebih utama dari negara, dan agama lebih utama dari pemerintah. Ungkapan tersebut bagian dari manifestasi falsafah *Bhinciki-bhici kuli*

bersikap dan bertindak ataupun melaksanakan tugas negara, serta menjadi landasan masyarakat dalam bernegara dan bermasyarakat.

Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dalam nilai-nilai Murtabat Tujuh adalah nilai yang terkandung dalam nilai falsafah Murtabat Tujuh yang menjadi acuan adat istiadat dalam negara Kesultanan Buton. Dari uraian singkat di atas mendeskripsikan bahwa sistem pemerintahan Kesultanan Buton bersifat semi Demokrasi, dan nilai-nilai demokrasi tersebut di pengaruhi oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Murtabat Tujuh. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Sub bab berikutnya yang lebih mendalam membahas unsure demokrasi dalam Kesultanan Buton.

5.4.1 Keistimewaan Konstitusi Murtabat Tujuh

Berbicara tentang keistimewaan suatu konstitusi berarti berbicara pula tentang sejauh mana konstitusi itu dapat mensejahterakan dan menciptakan kedamaian dalam masyarakatnya. Semua konstitusi mempunyai keistimewaan. Keistimewaan setiap undang-undang dapat dilihat pada seberapa kontribusi Undang-undang tersebut dapat menjamin ketentraman, keadilan dan kenyamanan masyarakatnya keistimewaan undang-undang Murtabat Tujuh :

Pertama, sebagai dasar ilmu dan sumber hukum dalam ketatanegaraan yang mengambil hikmat Al-Quran dan hadits yang dipersatukan dalam kesatuan sistem yaitu sistem pemerintahan, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Murtabat tujuh bersiat universal dengan kata lain nilai yang terkandung dalam murtabat Tujuh dapat diterapkan kapan saja dan dimana saja. Jika dilihat dari letak geografis yang beranekaragam suku dan budaya serta bahasa yang berbeda di Kesultanan Buton, dapat dikatakan sebagai Nusantara mini. Kendatipun

masyarakat sangat plural dan memiliki bahasa yang beraneka ragam, nilai-nilai Murtabat Tujuh dapat menyatukan seluruh lapisan masyarakat di Kesultanan Buton.¹³¹ nilai yang bersifat universal tersebut bisa dilihat pada falsafah yang terkandung dalam Murtabat Tujuh yaitu “*Bincci-bhinciki kuli*” (nilai rasa empati) dalam pemaknaannya bisa diartikan mencubit kulit sendiri sebelum mencubit kulit orang lain maksud dari falsafah tersebut adalah mengenai rasa empati yang tinggi serta rasa saling menghormati dan menghargai.

Nilai rasa tersebut dapat mempersatukan negara Kesultanan Buton. *Bincci-bhinciki kuli* dalam pergaulan sehari-hari dimanifestasikan dalam bentuk saling menyayangi satu sama lain, saling menghormati satu sama lain, saling memelihara satu sama lain dan saling taat menaati. Taat menaati bukan karena kedudukan atau jabatan seirang sehingga ia ditaati tetapi karena setiap manusia memiliki hak lebih yaitu hak asasi. Hak ini tidak boleh dilanggar oleh siapapun.¹³² Empat dasar inilah yang ditrapkan oleh masyarakat Buton dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penerapan nilai-nilai Murtabat tujuh tersebut dapat menciptakan akhlak yang baik dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Dengan terciptanya akhlak yang baik, masing-masing orang atau masyarakat akan bekerja sesuai aturan yang dikehendaki oleh semua pihak. Dengan demikian kerukunan, kedamaian dan kesejahteraan yang diinginkan dapat terwujud.

Kedua, undang-undang Murtabat tujuh digali dari ilmu Tasawuf khususnya ilmu kebatinan yang mengadopsi dari Murtabat Tujuh ersi Ibnu Arabi

¹³¹ Abubakar, *Op.cit.* hlm 81

¹³² Pasal 3 undang-undang Murtabat Tujuh. Dalam pasal ini berisi mengenai sifat-sifat yang diwajibkan oleh seorang pemimpin untuk memimpin masyarakatnya

dan digali dari dua puluh sifat Allah SWT melalui jalan ijthihad sehingga mampu bertahan dalam segala zaman. Nilai yang terkandung dalam undang-undang Murtabat Tujuh tiada lain adalah memanusiaikan manusia, menjadi manusia Khaliffatullah, sejahtera Zahir maupun bathin. Oleh sebab itu, rakyatnya patuh dan tunduk terhadap pemerintah melalui hokum adat. Seseorang yang tidak beradap dan beradat, jelas sekali orang itu menghinati agamanya yang dipanutinya. Sehingga pada jamanya orang akan merasa malu kalau dikatakan tidak beradat dan lebih baik mati daripada dikatakan demikian.

Ketiga, nilai-nilai Murtabat Tujuh bersifat horizontal dan vertical, Murtabat Tujuh menjamin dan mengatur kehidupan masyarakat bukan hanya kehidupan dunia tapi juga kehidupan akhirat. Nilai-nilai yang terkandung didalamnya adalah:

1. Nilai agama yang mendalam
2. Nilai kemanusiaan yang tinggi
3. Nilai sosial yang kokoh
4. Nilai persatuan yang kental
5. Nilai kebangsaan yang tinggi
6. Nilai kejujuran yang transparan.

Nilai-nilai tersebut senantiasa dapat menjamin ketentraman masyarakat

Buton dari masa ke masa

5.4.2 Nilai Konstitusi Kesultanan Buton Yang Berhubungan Dengan Proses Politik

Tidak ada sendi kehidupan, pengetahuan dan peradaban manusia yang tak tersentuh gairah pemikiran politik. Politik digunakan untuk beragam makna. “politik bisa berarti seperangkat hipotesa mengenai proses atau institusi pemerintahan, atau juga bisa merujuk pada prinsip-prinsip dan norma-norma yang mengontrol perilaku politik. Aristoteles sepakat dengan Plato bahwa manusia adalah hewan politik yang bisa memenuhi wataknya hanya dalam polis; bahwa negara adalah institusi moral yang ada untuk membantu manusia mencapai kesempurnaannya; bahwa negara yang benar berupaya menciptakan kesejahteraan bagi semua dan bukan hanya untuk kebaikan sekelompok saja.¹³³

Aristoteles menjelaskan hakekat kehidupan sosial adalah merupakan kegiatan politik dan interaksi satu sama lain dari dua tau lebih orang sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa proses politik dipengaruhi oleh norma atau nilai yang dimiliki oleh masyarakat negara melalui interaksi politik dengan orang lain dalam suatu kerangka kelambagaan (pemerintah). Manakala manusia ingin menentukan posisinya dalam masyarakat dan untuk mewujudkan keinginan bersama (tujuan sosial tercapai). Mereka melakukan interaksi musyawarah bersama orang lain yang melembaga akan menghasilkan suatu distribusi keputusan bersama.

Politik dalam Kesultanan Buton disebut Gau/musyawarah. Permulaan segala peraturan negara berasal dari pemufakatan yang tidak lampau keputusan tetang negara atau hasil proses politik di Kesultanan Buton tercapai dengan baik melalui

¹³³ Lihat Schmandt. *Op.cit.* hlm 85

proses pemufakatan bersama. Nilai Murtabt Tujuh yang berhubungan dengan politik adalah nilai-nilai pengabdian masyarakat terhadap negara yaitu ;

1. *Ainda—indamo aurata sumanamo karo*, (kepentingan diri orang banyak lebih utama dari harta benda), adalah wujud dari pengabdian dan pengoraban rakyat terhadap sesama warga negara dan umat manusia, harta benda yang dimiliki seberapapun harganya rela dikorbankan demi keselamatan diri atau orang banyak. Apalah artinya harta kalau diri atau masyarakat lain tidak merasa aman dan nyaman, harta tidak mempunyai nilai, justru harta itu akan menimbulkan kecemburuan masyarakat lain yang akan mengakibatkan persatuan menjadi renggang. Sehingga apabila kerenggangan ini terjadi persatuan untuk mencapai tujuan bersama negara untuk mewujudkan keidupan yang sejahterah demi kepentingan sendiri ataupun orang lain dan harta bukanlah segala-galanya.
2. *Ainda-ndamo karo somanamo lipu* (kepentingan negara lebih utama dari kepentingan pribadi) karo adalah diri pribadi, orang seorng atau orang banyak, yang wajib dilindungi keselamatannya oleh negara atau pemerintah namun untuk mempertahankan dan membela kepentingan yang lebih tinggi Lipu (negara), karo atau warga negara rela berkorban demi membela dan mempertahankan lipu sekalipun mengorbankan nyawa mereka. Nilai ini wujud dari pengabdian masyarakat terhadap kepentingan negara.
3. *Ainda-indamo lipu somanamo sara*, (kepentingan pemerintah lebih utama dari negara) Sara atau negara berazaskan musyawarah adalah milik bersama seluruh rakyat dan pemerintah. Negara wajib dipelihara dan dipertahankan keutuhannya dari bahaya yang menganam dari manapun datangnya. Namun

apabila kepentingan yang lebih tinggi dan lebih utama mengendakikeselamatan pemerintah (sara), bagian-bagian negara tertentu dalam keadaan terpaksa boleh dikorbankan

4. *Ainda-indamo sara somanamo agama*, (agama lebih utama dari pemerintah). Maksudnya apabila eorang atau beberapa orang aparat kesultanan berbuat melanggar peraturan negara atau melanggar hukum yang berlaku, aparat yang bersangkutan wajib disingkarkan dari jabatannya demi keutuhan agama yang menduduki tingkat tertinggi pada falsafah Buton. atau dengan makna lain sara dikatakan bahwa lebih penting dari negara. Namun apabila keadaan yang sangat genting dimana keselamatan sara benar-benar sudah terancam, dua alternative terpaksa harus diambil; 1) pemerintah menyerah, asalkan agama selamat 2) pemerintah ikut terjun ke medan perang dengan keyakinan mereka berjuang dan mati di jalan yang benar demi membela kebenaran.¹³⁴

Benang merah dari nilai-nilai di atas adalah :

- a. Pertama, harta (araata)
- b. Kedua, diri manusia itu sendiri (karo)
- c. Ketiga, negara yang utuh (lipu)
- d. Keempat, perangkat negara yang berasaskan permusyawaratan (sara)
- e. Kelima, agama adalah keyakinan kepercayaan yang dianut oleh negara.

¹³⁴ Morsidi, 1990. *Undang-undang dasar pemerintahan kerajaan sendiri di Buton*. Baubau. Jurnal Hlm 11

Keempat nilai yang berhubungan dengan negara tersebut, aindam-indamo lipu somanamo saralah yang dalam dunia politik, berhubungan langsung dengan proses politik. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa keputusan politik (*gau*) dalam negara Kesultanan Buton berproses melalui musyawarah mufakat yang dilakukan melalui lembaga sara (pemerintahan). Kebijakan pemerintah merupakan salah satu kegiatan politik, dimana kegiatan politik seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan adalah melalui interaksi politik dengan orang lain dalam satu kerangka kelembagaan sebagaimana Montesquieu mengemukakan mengenai politik, bahwa semua fungsi pemerintah dapat dimasukkan dalam kategori legislatif, eksekutif dan yudikatif.¹³⁵



¹³⁵ Roode C.C. 1995. *Introduction To Political Science*. Jakarta. Rajagrafindo. Edisi terjemahan Indonesia. Hlm 5

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan tentang beberapa temuan yang ada selama proses penelitian berlangsung di Kesultanan Buton.

6.1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Proses peralihan sistem pemerintahan pada masa Kesultanan Buton terjadi tiga kali, yaitu pada masa peralihan kerajaan ke kesultanan dan pada saat periode sultan ke empat yang merubah dari monarki menjadi monarki kontitusional ditambah praktek demokrasi yang terkandung dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Adapun beberapa perubahan penting yaitu :
 1. Transisi dari pemerintahan kerajaan ke pemerintahan kesultanan yang mengubah hampir seluruh praktek pemerintahannya termasuk kepercayaan yang di anut di masa itu.
 2. Masuknya ajaran Islam yang mempengaruhi bentuk pemerintahan menjadi sebuah pemerintahan Kesultanan dengan berpedoman pada ajaran Tasawuf
 3. Terbentuknya Undang-undang Murtabat Tujuh yang di buat oleh Sultan ke -4 Dayannu Ikshanuddin, Murtabat Tujuh menjadi dasar pedoman peraturan di jazirah Kesultanan Buton

2. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Kesultanan Buton terjadi praktik demokrasi ala Murtabat Tujuh Sarana Wolio, yang peneliti padukan dengan syarat demokrasi Robert Dahl.
 1. Adanya persamaan hak dalam bertoleransi antar kelas sosial, walaupun dalam Kesultanan Buton sendiri terdapat stratifikasi sosial yang membedakan golongan kelas dalam masyarakatnya, namun mereka saling hormat menghormati satu sama lain. Hal ini dikarenakan masyarakat Buton menganut Falsafah *Bhinci-Bhinciki Kuli* yang bermakna empati yang tinggi.
 4. Partisipasi efektif dalam Kesultanan Buton, dalam hal ini penentuan kebijakan yang menyangkut negara dan masyarakat luas, seorang Sultan tidak dapat memutuskan kebijakan secara sepihak seperti halnya raja-raja. Sistem ini bertujuan untuk meminimalkan bahaya penyelewengan kekuasaan yang dampaknya bisa mengakibatkan tirani. Segala sesuatu yang menyangkut keputusan maupun kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab sebagai aparat negara, diputuskan melalui musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat Kesultanan Buton, baik dari jajaran perwakilan pemerintah pusat, pemerintah daerah (*Kadie*), dan aliansi pemerintahan (*Barata*) semua dilibatkan serta mempunyai hak yang sama dalam proses musyawarah tersebut.
 5. Tanggung jawab politik dalam Kesultanan Buton, hak-hak politik eksekutif (Sultan) diawasi langsung oleh dewan *Siolimbona* (legislative). Dan dalam pelaksanaan pemerintahan seorang Sultan bertanggung jawab

langsung pada rakyat, karena rakyatlah yang telah memilih Sultan melalui aspirasi yang disalurkan lewat dewan *Siolimbona*.

6. Pengawasan agenda dalam ketersediaan lembaga negara di Kesultanan Buton. Kesultanan Buton sendiri menggunakan pemisahan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang luas,; yang terdiri dari eksekutif (Sultan), legislatif (*Siolimbona*) dan yudikatif (*Kanepulu*). Serta segala aturan yang mengikat Kesultanan Buton tertuang dalam Konstitusi undang-undang Murtabat Tujuh Sarana Wolio.
7. Prosesi pemilih Sultan. Pemilihan Sultan di Kesultanan Buton agak berbeda dengan pemilihan raja/sultan di nusantara pada umumnya. Kesultanan Buton pemilihan rajanya tidak berdasarkan garis keturunan langsung dari sang raja. Prosesinya dilakukan melalui tahap musyawarah yang disaring oleh kebijaksanaan *Siolimbona*. Proses pencalonannya melalui tahapan yang mencakup pengecekan latar belakang, karakter, wawasan, dan pemahaman agama.
8. Penerapan Praktek demokrasi yang terjadi di Kesultanan Buton hampir memenuhi kriteria dari demokrasi Robert Dahl, dengan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dalam lingkup musyawarah, adanya lembaga parlemen, serta konstitusi tertulis walaupun beberapa syarat belum terlaksana pada era Kesultanan Buton
9. Tata pencalonan pemimpin kesultanan yang cenderung unik dengan melalui tahap yang demokratis berbeda dengan model pencalonan raja-raja di nusantara

3. Keistimewaan konstitusi Kesultanan Buton terlihat dari penerapan nilai-nilai falsafah yang terkandung didalamnya dan bisa di terima secara universal oleh semua masyarakat Buton yang berbagai macam suku, seperti halnya falsafah Bhinci-bninciki kuli yang bermaksna empati yang tinggi terhadap sesama manusia.. Jabatan Sultan, pemimpin desa serta masyarakat bisa saling menghormati dan menghargai.

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan di atas, peneliti menawarkan beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian masalah, diantaranya adalah sebagai berikut:

Perubahan transisi pemerintahan yang terjadi di Kesultanan Buton mengingatkan kembali akan peristiwa transisi pemerintahan Indonesia yang bergulir dari era orde lama, orde baru, dan reformasi. Sehingga menjadikan bahan pembelajaran untuk perbandingan transisi pemerintahan negara Indonesia kecil versi kerajaan dan negara Indonesia pasca kemerdekaan

Praktik demokrasi yang terjadi di Kesultanan Buton belumlah sepenuhnya sempurna seperti halnya demokrasi prosedural yang dipaparkan Robert Dahl, untuk unsur pemangku kepentingan penting dalam struktur pemerintahan tetap di kuasai oleh beberapa golongan walaupun dalam proses penyelenggaraan pemerintahannya cenderung terbuka dan lebih demokratis

Konstitusi Kesultanan Buton sendiri sayangnya mulai tersisihkan di masa kini, orang-orang di Pulau Buton sudah mulai melupakan ajaran-ajaran yang

tertuang dalam konstitusi tersebut, disinilah peran pemerintah baik Kota Baubau ataupun Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melestarikan warisan-warisan leluhur, untuk dilestarikan dan di munculkan kembali sehingga biasa menjadi bahan acuan pembelajaran kedepannya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abubakar, 1999, *Majalah Budaya Buton "Wolio Molagi" Edisi, I, II, III*. Kendari: Yayasan Wolio Molag,
- Agung, Ide Agung Gde. 1985. *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Ancaux J.C., 1987. *Wolio Dictionary (kamus bahasa wolio)*. Dordrecht: Foris Publications Holland
- Berg, E.J. van den, 1939, *Adatgebruiken In Erband Met De Sultansinstallatie In Boeton*, TBG. Vol.79
- Bungin Burhan, 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Grafindo Persada. Jakarta
- Budiarjo Miriam
- Corteseo Armado, 1944. *The Suma Oriental of Tome Pires*. Vol. 1. London: Printed For The Hakluyt Society
- Dahl, 2003. *Perihal Demokrasi*, Yayasan Obor Indonesia, Cetakan Pertama Edisi Terjemahan, Jakarta
- Darmawan. 2009. *Naskah Buton, Naskah Dunia*. Respect. BauBau.
- Danandjaja, James., 1994. *Folklore Indonesia Ilmu Gosip, Dongen, dan Lain-lain*. Jakarta: Grafiti
- De Jong, J.J.P., 1998. *De Waaier van het Fortuin*. Den Haag: der uitgeerij
- Hunt Lynn, 1989. *The new cultural history*. Los Angeles; University of California Press.
- Husein A. Chalik dkk, 1985. *Sejarah Sosial Daerah Sulawesi Tenggara*. Jakarta: Inventarisasi Dan Dokumentasi Depdikbud
- Ikram, 2001, *Istiadat Tanah Negeri Buton Edisi Teks dan Komentator*, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Jakarta.
- Kartodirjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

- Ligtvoet, A., 1878. *Beschrijving en Geshiednis van Boeton*. Belanda: Gravehagen. BKI No.26
- Muchir, 2003, *Sara Pataaguna Memanusiakan Manusia Menjadi Manusia Khalifatullah Di Bumi Kesultanan Butuni*. Tarafu. Buton
- Moleong. 2013. *Metode Peneliatian Kualitatif Edisi Revisi*, PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Purwardi, 2009, *Sejarah Sastra Jawa Klasik*. Panji Pustaka. Yogyakarta
- Said D., 2006. *Menelusuri Jejak Kota Baubau dalam Lintas Sejarah Nusantara*. Prisma. Baubau
- Schoorl J.W., 1994. *Power, Ideology, And Change In The Early State Of Buton. State And Trade In The Indonesia Archipelago*. Belanda: Laiden KITLV Press.
- , 2003. *Masyarakat, Sejarah,, dan Budaya Buton*. Djambatan. Jakarta
- Soekanto, 2001, *Hukum adat Indonesia*, P.T Raja Grafindo, Jakarta
- Susanto Zuhdi, 2010. *Sejarah Buton yang terabaikan Labu Rope Labu Wana*, PT Grafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Pamudji, 1983, *Perbandingan Pemerintahan*, P.T Bina Aksara, Jakarta
- Pramudito. 2006. *Kitab Negara Kartagama : sejarah tata pemerintahan dan peradilan Keraton Majapahit*. gelombang pasang. Yogyakarta
- Priyadi Sugeng. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Sejarah*. Penerbit Ombak. Yogyakarta
- Resink, G.J., 1987. *Raja dan Kerajaan yang Merdeka di Indonesia 1850-1910: Enam tulisan Terpilih* (terjemahan). Jakarta: Penerbit Jambatan
- Rodee,C.C, 1995, *Introduction to Political Science edisi terjemahan*, P.T Raja grafindo, Jakarta
- Tarafu, 1996, *Martabat Tujuh Dayanu Ikhsanuddin Jilid 1*, Lamra. Buton
- Wiliam H. Frederick dan Soeroto, 1982. *Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum Dan Sesudah Revolusi*. Jakarta; LP3ES
- Yunus, 1995, *Posisi Tasawuf Dalam Sistem Kekuasaan Di Kesultanan Buton Pada Abad Ke-19*, Indonesian Netherland Corporation In Islamic Studies, Jakarta.
- Zaenu La Ode, 1985, *Buton dalam Sejarah Kebudayaan*, Suradipa, Surabaya

Zahari, 1977, *Sejarah Dan Adat Fiy Darul Butuni Jilid, I, II, III*, Depdikbud, Jakarta

HASIL PENELITIAN DAN JURNAL

Aslim, 1995. Kesultanan Buton pada masa pemerintahan Muhamad Idrus 1824-1851. Yogyakarta: Skripsi S1 Universitas Gajah Mada

Departemen Agama Republik Indonesia, 2000, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta : CV. Atlas

Haliadi, 2000. Buton Islam dan Islam Buton: Islamisasi, Kolonialisme, dan Sinkretisme. Yogyakarta: Tesis Pascasarjana UGM

Hasanudin Anwar. Jurnal : Warisan Demokrasi Gorontalo

Jumadi. 2010. Konsep Demokrasi To Manurung. Jurnal Al-Risalah ; Volume 10 Nomor 2 November

Mattulada, H.A., 1993. Kepemimpinan Dan Demokrasi Dalam Tradisi Masyarakat Nusantara. Ujung Pandang: Majalah Ilmiah Universitas Hasanuddin Edisi XXIX No.1

Nurhayati, 2003. Sistem Pemerintahan Kesultanan Buton Pada Masa Kepemimpinan Dayanu Ikhsanuddin, Yogyakarta; Tesis Program Pascasarjana S2 Universitas Gajah Mada.

Niampe. 2009. Kesultanan Buton dalam Sejarah dan Naskah Nusantara. Kendari. Jurnal Universitas Halu Oleo

Parani,J., 1982. Sumber Tradisional untuk Penulisan Sejarah Buton. Jakarta: Makalah seminar sejarah nasional III

Said D., 1984. Pengaruh Perkembangan Islam Terhadap Masyarakat Buton Abad XV-XX. Ujung pandang; Skripsi S1 FPIPS-IKIP

-----., 1993. Sejarah Birokrasi Pemerintahan Pada Masa Kesultanan Buton. Kendari; Laporan hasil penelitian

Saidi, Mohd, dkk, 2001, Studi Sosiologi Cultural Dan Historis Tentang Dasar-Dasar Adat Dan Budaya Masyarakat Buton, Hasil Penelitian Proyek Inventarisasi Adat Dan Budaya Masyarakat Buton, Baubau

Susanto Zuhdi. 1999. Disertasi Labu Rope Labu Wana Sejarah Buton Abad XVII--XVIII. Program Doktorat Universitas Indonesia. Jakarta

Zahari. 1980. Sejarah masuknya islam di Buton dan perkembangannya. Jurnal

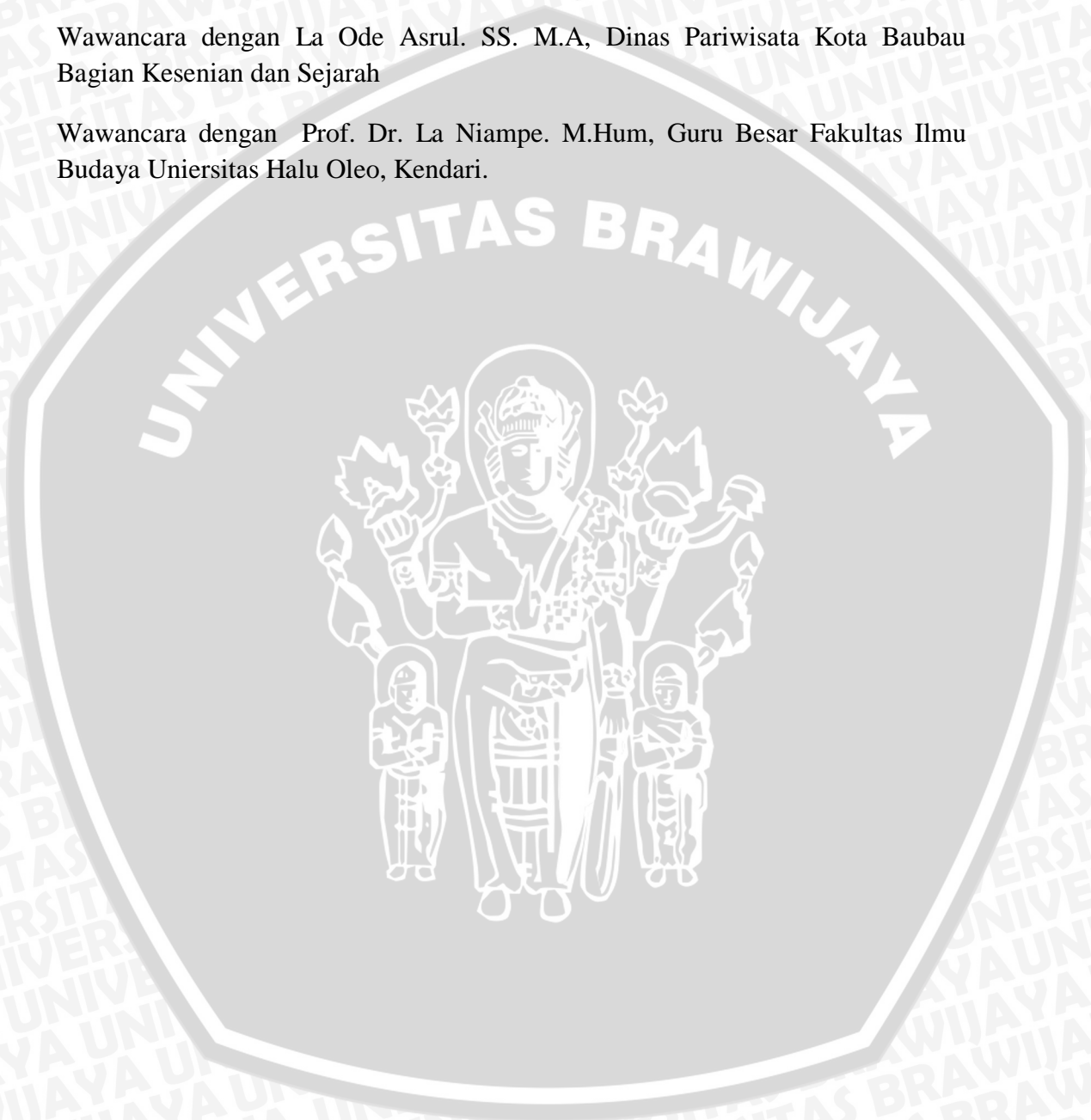
WAWANCARA

Wawancara dengan Siti Alfiah Mukmin, SS, Pemerintah Kota Baubau Dinas Pariwisata Bagian Perencanaan

Wawancara dengan Mujazi Pengelola Musium Kebudayaan Wolio

Wawancara dengan La Ode Asrul. SS. M.A, Dinas Pariwisata Kota Baubau Bagian Kesenian dan Sejarah

Wawancara dengan Prof. Dr. La Niampe. M.Hum, Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Uniersitas Halu Oleo, Kendari.





Lampiran 1 Dokumentasi



Foto Bersama bapak Mujazi orang yang dipercayakan oleh Sultan Buton terakhir untuk menjaga dan melestarikan museum Kesultanan Buton



Foto Bersama jajaran Dinas Pariwisata Kota Baubau



Pusat Musium kebudayaan Wolio



Masjid Agung Keraton



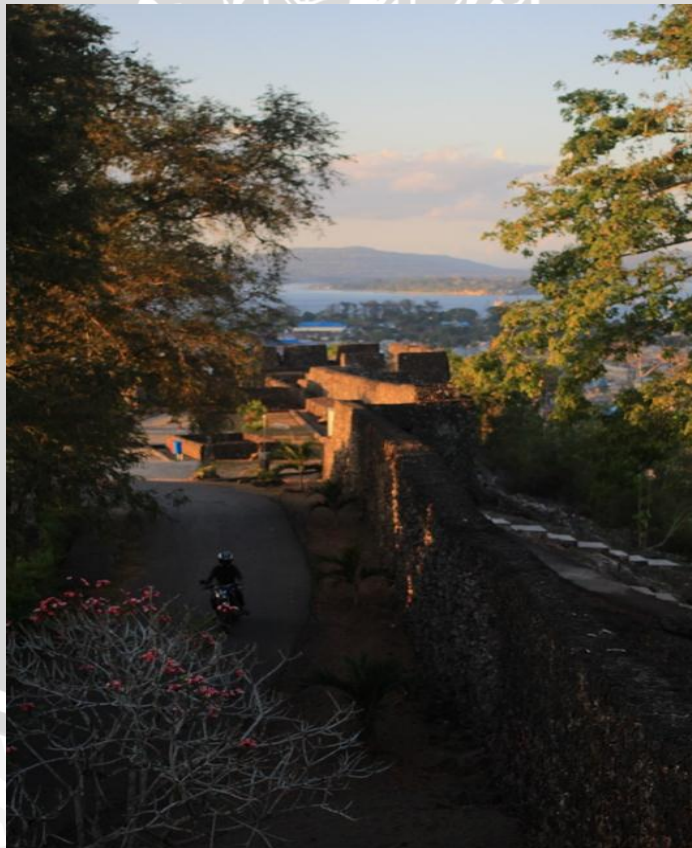
Proses Pelantikan Sultan Buton



Tarian Penyambutan Pross Pelantikan Sultan Buton



Kediaman yang menjabat sebagai Sultan pada Kesultanan Buton (Malige)



Kawasan Benteng Keraton Buton Kelurahan Melai Kota Baubau

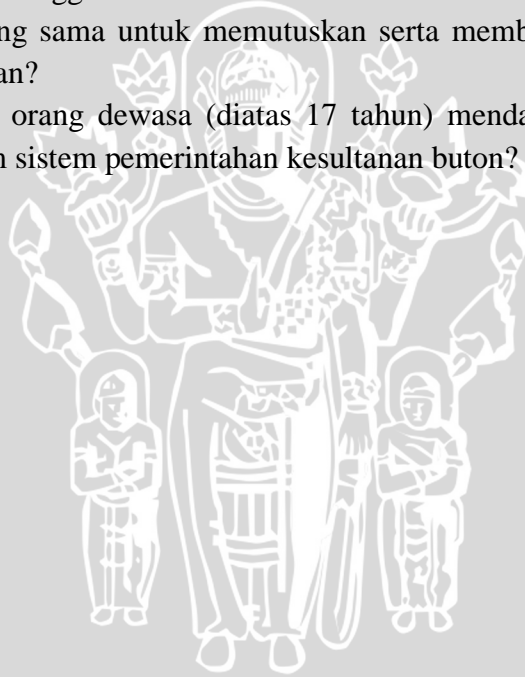
LAMPIRAN 2. PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Umum

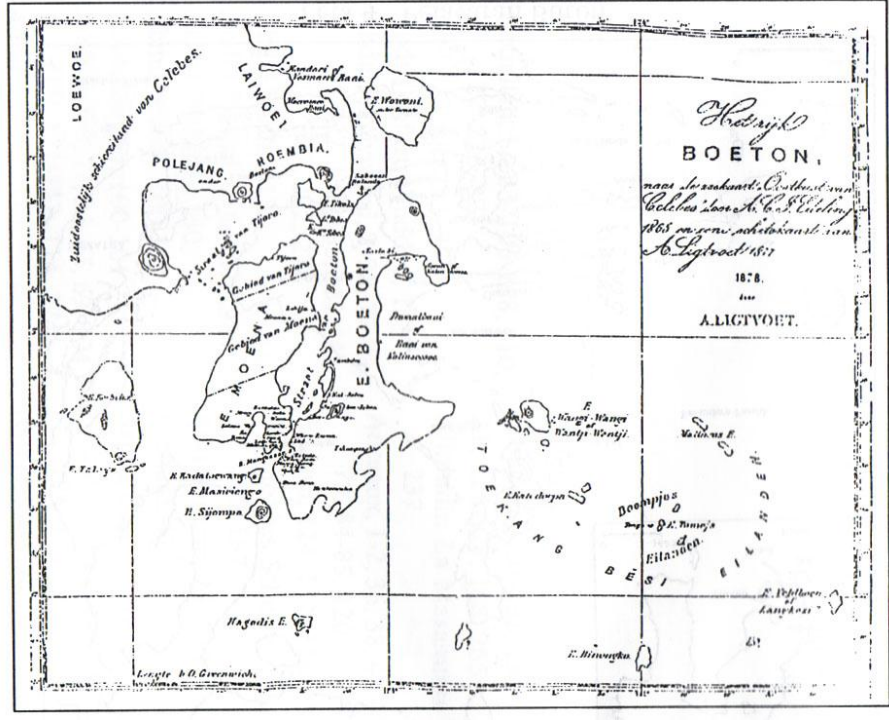
1. Dapatkah anda menceritakan bagaimana sistem Pemerintahan pada masa Kesultanan Buton ?

Kriteria Demokrasi

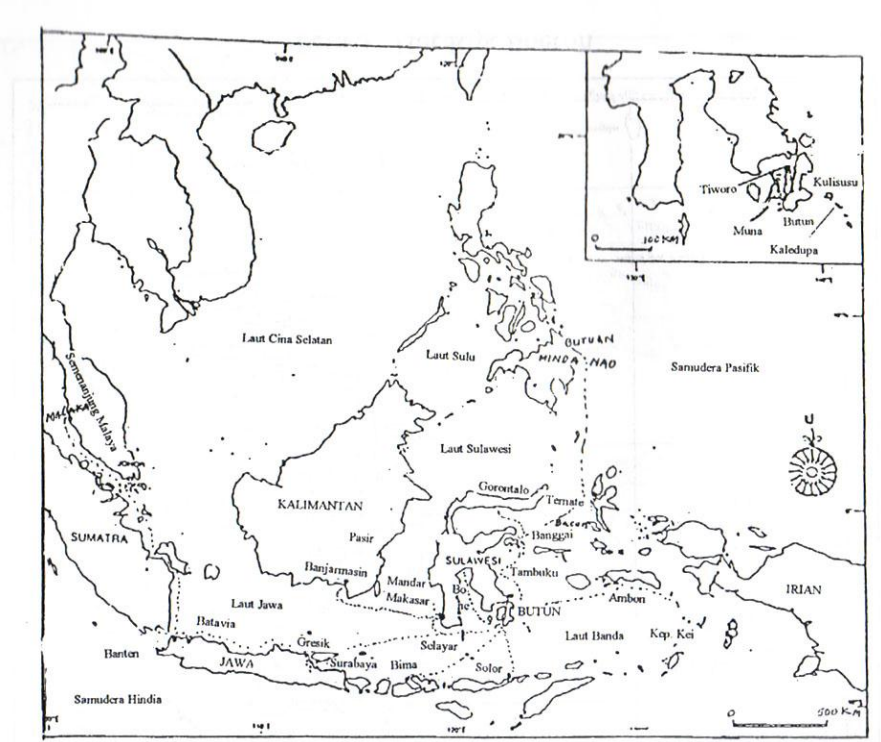
1. Apakah Pemerintahan Kesultanan Buton dan masyarakat mempunyai kesempatan hak yang sama untuk berpartisipasi membuat sebuah kebijakan?
2. Apakah setiap elemet yang ada dikesultanan buton baik pemeritah maupun masyarakat memunyai hak suara yang sama dalam penentuan suatu kebijakan
3. Apakah setiap anggota dewan(saran pangka, sarana gau, sarana bhintara) pemerintah kesultanan buton mempunyai hak yang sama untuk mempelajari ataupun mendekonstruksi kebijakan pada Kesultanan Buton?
4. Apakah setiap anggota dewan kesultanan buton berhak mempunyai kesempatan yang sama untuk memutuskan serta membuat agenda dalam sebuah kebijakan?
5. Apakah semua orang dewasa (diatas 17 tahun) mendapatkan hak untuk ikut serta dalam sistem pemerintahan kesultanan buton?



LAMPIRAN 4. DOKUMENTASI UMUM

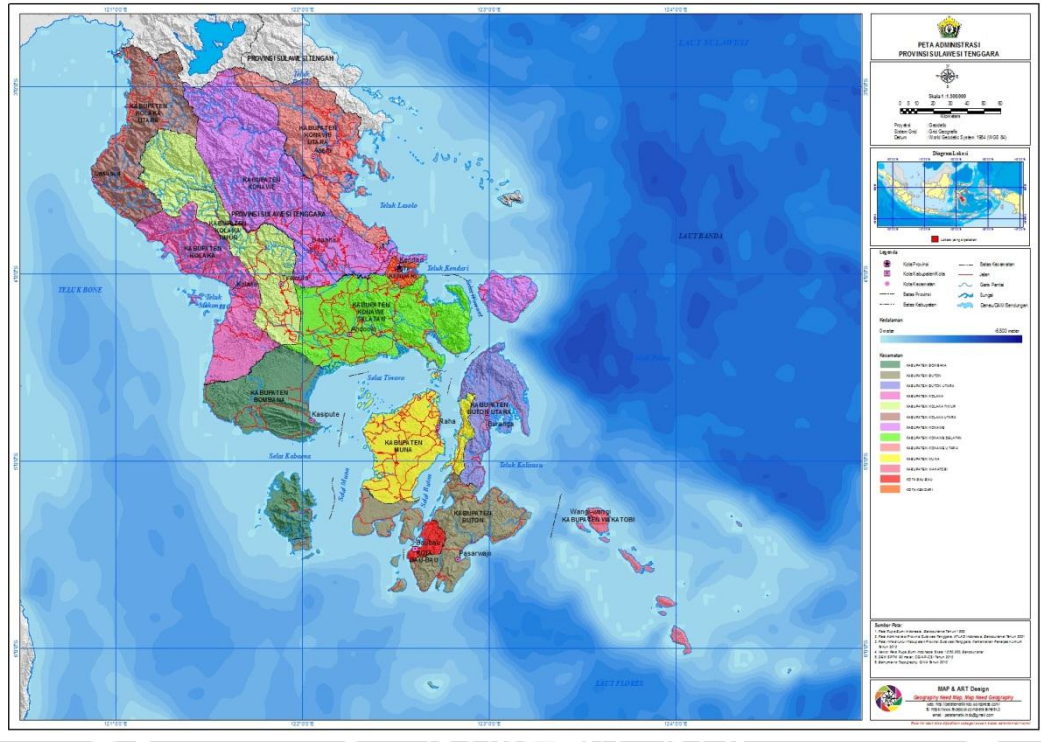


Gambar : Het Rijk Boeton



Gambar : Pelayaran Buton





Gambar : Peta Provinsi Sulawesi Tenggara



Gambar : Bendera Kesultanan Buton

